



LKIP

2023

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2023

No.	Reviewer	Catatan/Koreksi
1.	Sub Koordinator Substansi PDE	<ul style="list-style-type: none">• Verifikasi Data Capaian Kinerja 2023, baik keberhasilan dan kegagalan• Persentase Capaian• Rapikan penulisan
2.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">• Sesuaikan cara penulisan laporan• Konsistensi Data dan Laporan• Verifikasi Data Capaian
3.	Kepala Dinas	<ul style="list-style-type: none">• Lengkapi Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Kupang, Januari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur, **Y**



Lecky Frederich Koli, STP
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas tuntunan dan penyelenggaraannya-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dapat telah terselesaikan dan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun LKIP yang merupakan bagian dari pelaporan hasil kinerja instansi pemerintah, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKIP Tahun 2023 pada dasarnya menggambarkan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara utuh selama Tahun 2023, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja dari setiap program (*intermediate outcome*), kegiatan (*immediate outcome*), dan sub kegiatan (*output*).

Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan usul saran penyempurnaan terhadap dokumen ini.

Kupang, Januari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Y



Lecky Frederich Koli, STP
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.5 Struktur Organisasi	5
1.6 Ketersediaan Sumber Daya Manusia	6
1.7 Prasarana, Sarana dan Fasilitas Penunjang	10
1.8 Isu Strategis.....	11
1.9 Sistematika Penulisan	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis Organisasi.....	13
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	16
2.3 Perjanjian Kinerja (PK).....	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja.....	25
3.2 Capaian Pelaksanaan Anggaran	29
3.2.1. Capaian Pelaksanaan Anggaran APBD	33
3.2.2. Capaian Pelaksanaan Anggaran APBN	57
BAB IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	121
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Golongan Tahun 2023	6
Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan dan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	7
Tabel 1.3 Komposisi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	8
Tabel 1.4 Komposisi PNS dan PPPK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Golongan Tahun 2023	9
Tabel 1.5 Prasarana, Sarana dan Fasilitas Penunjang	10
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	15
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023.....	17
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	18
Tabel 2.4 Rincian Anggaran Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sumber Dana APBD Tahun 2023	19
Tabel 2.5 Rincian Anggaran Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sumber Dana APBN Tahun 2023	21
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	24
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.....	25
Tabel 3.3 Skor PPH Provinsi NTT Tahun 2023	28
Tabel 3.4 Angka Konsumsi Energi dan Angka Konsumsi Protein Provinsi NTT Tahun 2023	29
Tabel 3.5 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama TA. 2023.....	30
Tabel 3.7 Realisasi Pelaksanaan Anggaran, Sumber Dana APBD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	33
Tabel 3.8 Sasaran TJPS Pola Kemitraan Berbasis KUR/KMM dan Non KUR/KMM Tahun 2023.....	40
Tabel 3.9 Target dan Realisasi MT II 2023 TPJS Pola Kemitraan	41
Tabel 3.10 Target pelaksanaan TJPS Pola Kemitraan MT I Okmar 2023/2024	42
Tabel 3.11 Target dan Realisasi PAD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023	55
Tabel 3.12 Target dan Realisasi Anggaran Per Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Sumber Dana APBN, Sesuai PK Kepala Dinas Tahun 2023	57
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249099 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	58
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249158 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	60
Tabel 3.15 Alokasi Kegiatan Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) Bantuan Budidaya Padi Kaya Gizi di Provinsi NTT Tahun 2023	67

Tabel 3.16 Alokasi Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida di Provinsi NTT Tahun 2023.....	68
Tabel 3.17 Realisasi Tanam Jagung Hibrida, Sumber Dana APBN TP Provinsi per 31 Desember 2023	72
Tabel 3.18 Realisasi Tanam Jagung Hibrida, Sumber Dana APBN TP Pusat per 31 Desember 2023.....	73
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249030 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	74
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249159 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	80
Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249031 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	88
Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249160 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	90
Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249033 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	94
Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249165 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	97
Tabel 3.25 Data Realisasi Penetapan LP2B, LCP2B dan KP2B di 3 Kabupaten Provinsi NTT TA. 2023	99
Tabel 3.26 Alokasi Awal Pupuk Bersubsidi Tahun 2023	103
Tabel 3.27 Rincian kebutuhan perjenis pupuk bersubsidi di Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	105
Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 403457 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	108
Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 403457 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023	113
Tabel 3.30 Data Hasil Pengujian Sampel Standar Keamanan Pangan	114
Tabel 3.31 Sebaran Lokasi Pengembangan Desa B2SA	116
Tabel 3.32 Efisiensi Anggaran APBD	119
Tabel 3.33 Efisiensi Anggaran APBN	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi	5
Gambar 3.1. Peta LP2B, LCP2B Kabupaten Timor Tengah Selatan	100
Gambar 3.2. Peta LP2B dan LCP2B Kabupaten Timor Tengah Utara	100
Gambar 3.3. Peta LP2B dan LCP2B Kabupaten Malaka	101

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam Renstra.

Penyusunan LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018-2025, Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2023, PK Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023.

Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT diarahkan untuk mendukung pelaksanaan "NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", khususnya yang terkait dengan bidang pertanian dan ketahanan pangan, yaitu "Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani". Kedaulatan pangan yang merupakan penjabaran pelaksanaan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018-2023 untuk menuju swasembada pangan.

Peningkatan Produksi untuk beberapa komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan seperti data diatas karena adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana berupa; sarana produksi, alat dan mesin pertanian serta penataan aset dan kelembagaan petani pada umumnya mulai menunjukkan perbaikan dan peningkatan yang berarti demi kemajuan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan saat ini.

Namun demikian hingga tahun 2023 masih terdapat beberapa capaian sasaran pada program/kegiatan yang belum mencapai target seperti yang diharapkan, hal ini disebabkan karena masih dihadapkan berbagai tantangan dan kendala struktural dan non struktural baik secara internal maupun eksternal yang memerlukan penanganan dan koordinasi secara terus menerus untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target yang direncanakan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

Adapun ringkasan prestasi capaian sasaran kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dicapai di tahun 2023 sebagai berikut:

➤ **Share PDRB Sektor Pertanian terhadap Total PDRB**

Realisasi sebesar 29,24% (9.469.000.000), dari target untuk tahun 2023 sebesar 12,72% atau dengan kategori **Sangat Berhasil**.

➤ **Nilai Tukar Petani (NTP)**

Realisasi NTP tahun 2023 pada bulan November sebesar 97,54 poin dengan capaian kinerja 92,90 atau dengan kategori **Sangat Berhasil**.

➤ **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Skor PPH tahun 2023 untuk Provinsi NTT adalah 74,3 poin dari target 71 poin jika dengan capaian kinerja 104,75 atau dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Total Alokasi Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Sumber Dana APBD Rp.74.720.980.332,- dengan realisasi sebesar Rp.65.313.841.344,- (87,41%) sedangkan APBN Rp.62.588.053.000,- terealisasi sebesar Rp.55.571.050.897,- (88,79).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal.

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, yang juga menjadi komponen dari prinsip "*good governance*" sebagai persyaratan bagi setiap instansi dalam upaya mewujudkan ketercapaian tujuan organisasi. Penyusunan LKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja dimaksud untuk mengukur keberhasilan dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang berdasarkan Indikator Kinerja. Selain itu, penyusunan LKIP juga mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023, RKT Tahun 2023, PK Tahun 2023, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023.

Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen LKIP yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT harus mampu menghadirkan proses pelaksanaan anggaran yang inklusif, transparan dan akuntabel. Hal mendasar yang ingin dicapai adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Adapun LKIP ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya good governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang.
- 3) Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
- 4) Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis.
- 5) Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang landasan hukumnya antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
- 4) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT mempunyai fungsi yaitu pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur NTT sebagai berikut:

a. *Tugas Pokok*

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

b. Fungsi

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT mempunyai fungsi:

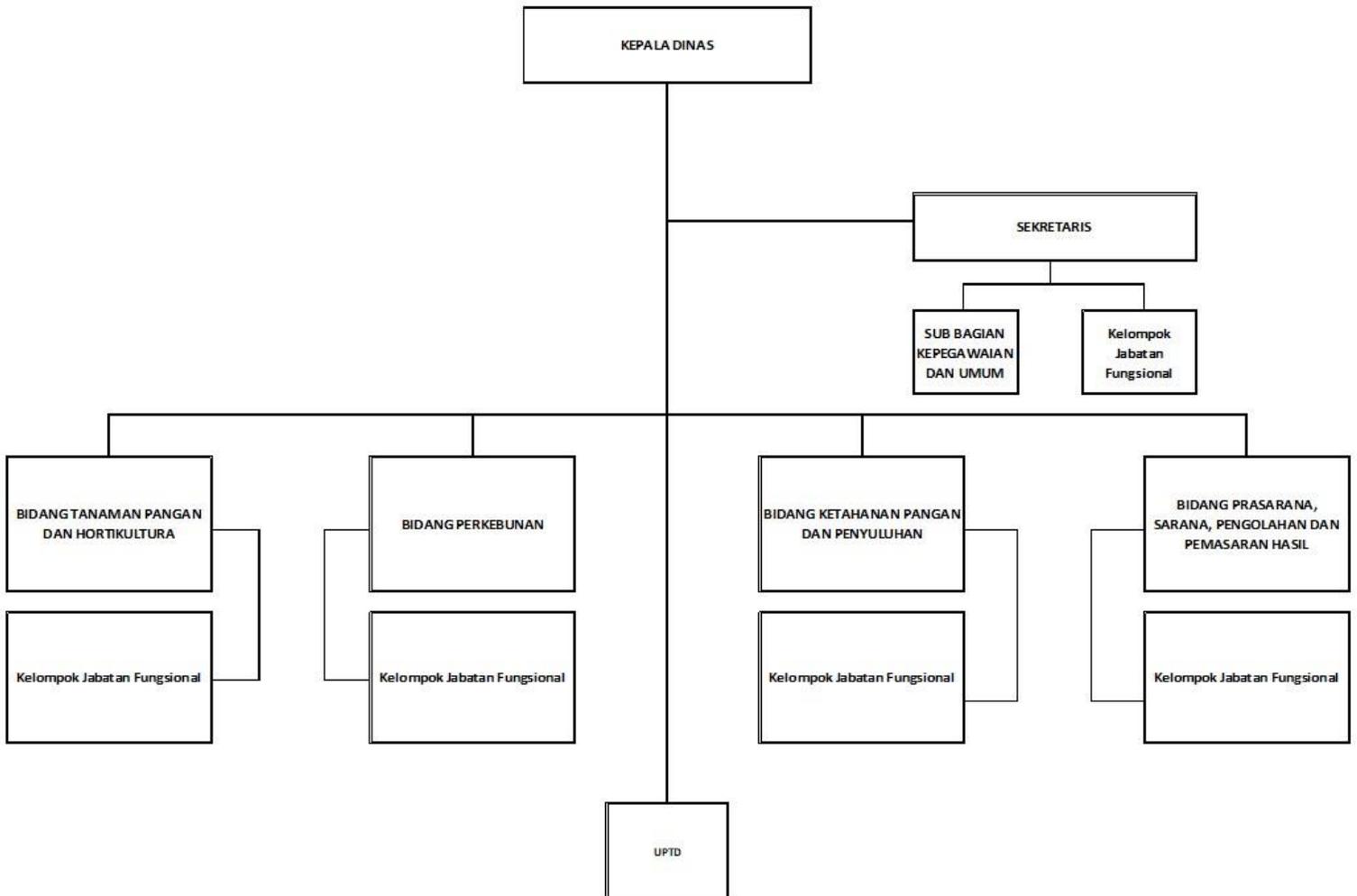
1. Perumusan kebijakan dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian dan ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, berikut struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi langsung:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kepala UPTD.

1.5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT



1.6. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT didukung oleh SDM dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pangkat dan Golongan

Komposisi jabatan dalam Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT adalah 1 (satu) orang Eselon II yaitu Kepala Dinas; 5 (lima) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang; serta 1 (satu) orang Eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT berdasarkan Golongan Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
1	ESELON II-a	1
2	ESELON III-a	5
3	ESELON III-b	4
4	ESELON IV-a	1
5	Jabatan Fungsional Tertentu	38
6	Jabatan Fungsional Umum	273
	JUMLAH	333
7	PPPK	19
	TOTAL PNS DAN PPPK	352

2. Jenis Kelamin

Komposisi ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 215 orang laki-laki (61,07%) dan perempuan sebanyak 137 orang (38,93%), sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Rekapitulasi ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT berdasarkan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
PNS				
1	S2	10	7	17
2	S1 Teknis	97	82	179
3	S1 Non Teknis	12	14	26
4	D3 Teknis	9	6	15
5	D3 Non Teknis	4	4	8
6	SLTATeknis	18	5	23
7	SLTA Non Teknis	40	14	54
8	SLTP	4	0	4
9	SD	7	0	7
JUMLAH		201	132	333
PPPK				
1	S1	0	2	2
2	SLTA Teknis	14	3	17
JUMLAH		14	5	19

3. Tingkat Pendidikan

Komposisi jumlah ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar terhadap hasil pembangunan pertanian. Berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 17 orang (4,83%), Sarjana (S1/D4) sebanyak 207 orang (58,81%), dan Diploma sebanyak 23 orang (6,53%) SLTA sebanyak 94 orang (26,70%), SLTP sebanyak 4 (1,14%) orang dan SD sebanyak 7 orang (1,99%) seperti tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3

Komposisi Jumlah ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	17
2	S1 Teknis	179
3	S1 Non Teknis	26
4	D3 Teknis	15
5	D3 Non Teknis	8
6	SLTATeknis	23
7	SLTA Non Teknis	54
8	SLTP	4
9	SD	7
JUMLAH		333
1	S1	2
2	SLTA Teknis	17
JUMLAH		19
TOTAL PNS DAN PPPK		352

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023

4. Golongan

Komposisi Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT berdasarkan golongan yaitu golongan IV sebanyak 23 orang (6,53%), golongan III sebanyak 259 orang (73,58%), golongan II sebanyak 45 orang (12,78%), dan golongan I sebanyak 6 orang (1,70%) sementara PPPK golongan IX sebanyak 2 orang atau (0,57%) dan golongan V sebanyak 17 orang (4,83%) sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 1. 4
Komposisi PNS dan PPPK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT
berdasarkan Golongan Tahun 2023

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORG)	LAKI-LAKI(ORG)	PEREMPUAN(ORG)
1	IV/d	0	0	0
	IV/c	1	1	0
	IV/b	5	2	3
	IV/a	17	11	6
	JUMLAH GOL IV	23	14	9
2	III/d	95	41	54
	III/c	58	31	27
	III/b	59	40	19
	III/a	47	33	14
	JUMLAH GOL III	259	145	114
3	II/d	26	20	6
	II/c	11	8	3
	II/b	7	7	0
	II/a	1	1	0
	JUMLAH GOL II	45	36	9
4	I/d	4	4	0
	I/c	1	1	0
	I/b	1	1	0
	I/a	0	0	0
	JUMLAH GOL I	6	6	0
	JUMLAH	333	201	132
	PPPK			
1	IX	2		2
2	V	17	14	3
	JUMLAH	19	14	5
	TOTAL PNS DAN PPPK	352	215	137

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023

1.7. Prasarana, Sarana dan Fasilitas Penunjang

Tabel 1. 5
Prasarana, Sarana dan Fasilitas Penunjang

No	Jenis Prasarana/Sarana	Lokasi	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	Provinsi, dan Kabupaten	72 Bidang	Bersertifikat
2	Kantor	Airnona	2 Buah	2 Berfungsi
		Nonbes	1 Buah	Berfungsi
		Oebobo	5 Buah	Berfungsi
3	Rumah Dinas	Airnona	12 Buah	Berfungsi
		Noelbaki	1 Buah	Berfungsi
		Nonbes	1 Buah	Berfungsi
		Oelbubuk	2 buah	Berfungsi
4	Gudang	UPTD PSB/ Airnona	1 Buah	Berfungsi
		Noelbaki	2 Buah	Berfungsi
		Tarus	4 Buah	Berfungsi
		UPT Proteksi	1 Buah	Berfungsi
5	Laboraturium	UPT PSB Ainona	3 Unit	Berfungsi
6	Asrama A Kebun Dinas	Asrama	2 Unit	Berfungsi
7	Kendaraan Roda 6	Dinas	0 Unit	1 Unit Sudah Dilelang
8	Kendaraan Roda 4	Dinas	7 Unit	Berfungsi (2 unit sudah dilelang)
9	Kendaraan Roda 2	Dinas	291 Unit	Berfungsi
10	Traktor Roda 4	Dinas	4 Unit	Berfungsi
11	Komputer	-	6 Unit	Berfungsi
	P.C.Unit	-	1 Unit	Berfungsi
12	Kamera		1 Unit	Berfungsi
13	Laptop		16 Unit	Berfungsi
14	Scener		1 Unit	Berfungsi
15	Infokus		8 Unit	Berfungsi
16	Meja		221 Unit	Berfungsi
17	Kursi		336 Unit	Berfungsi
18	Alat Rontok Padi	Kupang, Nagekeo, Sikka, Rote Ndao, Mabar, dan	6 Unit	Berfungsi

	Sumba Timur		
--	-------------	--	--

1.8. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Berdasarkan hal tersebut Isu Strategis Tahun 2023 menjadi kondisi yang sangat penting diperhatikan dalam menyusun Prioritas Pembangunan Tahun 2023.

Untuk merespon kebijakan dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT merumuskan program prioritas yang merujuk pada Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Dengan Indikator kinerja yang terukur yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi NTT.

Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan pada hakekatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tidak saja terbatas pada petani itu sendiri tetapi juga meliputi masyarakat luas. Dengan demikian peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT sangatlah penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pemberdayaan sumber daya di sektor pertanian. Melihat hasil evaluasi capaian kinerja atas pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya pada RPJMD 2018-2023 mencakup aspek sebagai berikut :

- a. Adanya perubahan iklim global;
- b. Kerusakan infrastruktur dan sarana prasarana;
- c. Status dan luas kepemilikan lahan;
- d. Sistem perbenihan dan pembenihan belum berjalan optimal;
- e. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan;
- f. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani;
- g. Rendahnya nilai tukar petani;
- h. Rendahnya produksi dan produktivitas, mutu dan nilai tambah komoditi pertanian;
- i. Tingkat kehilangan hasil pertanian relatif tinggi;
- j. Aspek konsumsi dan panganekaragaman pangan;
- k. Aspek ketersediaan dan akses pangan;

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

Tahun 2023 terdiri dari:

BAB I

Menyajikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis serta Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II

Menguraikan tentang Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

BAB III

Menguraikan tentang Hasil Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB IV

Menguraikan kesimpulan atas Capaian Kinerja, pemasalahan dan hambatan serta langkah-langkah strategis dalam percepatan pencapaian target kinerja pada masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, serta tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi dan Misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang telah ditetapkan sebagai visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 adalah "NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara

Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki peran dalam mewujudkan misi:

Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil. Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) yakni melibatkan semua pihak (*stakeholders*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan.

Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*). NTT memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan pembangunan sektor pariwisata, karena itu misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
1	2	3	4		
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pertanian, hortikultura dan perkebunan	1. Peningkatan Produksi tanaman pertanian, hortikultura dan perkebunan	1. Peningkatan Produksi Perbenihan Pertanian	1. Pengembangan Pusat Perbenihan		
			2. Revitalisasi Kebun Dinas Dan Balai Perbenihan		
			3. Pengembangan Desa Mandiri Benih		
			4. Pemberdayaan Penangkar		
		2. Peningkatan Produktivitas di luar Kawasan Sentra Produksi	3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	1. Penganggaran APBD Provinsi diprioritaskan pada wilayah diluar kawasan nasional.	1. Pengembangan komoditi pertanian terintegrasi melalui pola TJPS-PK
					2. Pengembangan Intensifikasi Padi Palawija dan
					3. Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					4. Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu
					5. Penerapan Standar Operasional Prosedur Bubidaya tanaman yang baik
					6. Kerja sama dengan TNI dan stakeholders lainnya dalam pengembangan komoditi di wilayah perbatasan
7. Perluasan Areal Tanam (PAT) Komoditi pertanian strategis					
8. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)					
		4. Pengembangan Tanaman Lokal spesifik	1. Budidaya tanaman Marungga, Aneka kacang dan umbi spesifik lokal		
			2. Pengembangan Sorgum		
		5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	1. Penyediaan alat mesin pertanian		
2. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani	1. Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	1. Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing dan Mutu Produk Hasil Pertanian	1. Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil		
			2. Fasilitas Pengolahan Hasil Komoditi Pertanian		
			3. Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis		
	2. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)	1. Peningkatan Satabilisasi Harga dan iklim pemasaran	1. Meningkatkan pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian serta asuransi pertanian.	2. Meningkatkan Produktivitas dan penganekaragaman produk hasil	
				3. Fasilitas pemasaran Produk Pertanian	
3. Terwujudnya	Skor Pola Pangan	1. Peningkatan Peran	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM		

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

kedaulatan dan ketahanan pangan	Harapan (SPPH)	Penyuluhan pertanian secara maksimal	2. Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani
---------------------------------	----------------	--------------------------------------	--

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			3. Peningkatan Kapasitas Petani Dalam Bidang Kewirausahaan/Bisnis Berbasis Pertanian (Korporasi)
			4. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
		2. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan Ketersediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan; Distribusi pangan serta pemasaran dalam pengendalian harga pangan	1) Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari
			2) Fasilitasi Cadangan Pangan Masyarakat
			3) Pemantauan Situasi Pangan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
			4) Pengembangan sistem Informasi Pasar dan
			5) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan
			6) Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTIC)
			7) Gelar Pasar Murah (GPM)
		3. Pemantauan, pengkajian dan pembinaan keamanan dan mutu pangan	1. Melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap pangan segar asal tumbuhan
			2. Sosialisasi dan edukasi keamanan pangan berdasarkan standar nilai pangan
			3. Sertifikasi Pangan Segar asal Tumbuhan (PSAT)
			4. Meningkatkan peran lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Daerah.
		4. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan kualitas konsumsi dan penganekaragaman pangan	1. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal berpola B2SA(beragam, bergizi, sehat dan aman
			2. Mengembangkan penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
		5. Mengembangkan forum koordinasi ketahanan pangan tingkat Kabupaten dan Kecamatan;	1. Membentuk dan mengaktifkan peran Dewan Ketahanan Pangan

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

RKT merupakan penjabaran dari sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, dan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring

dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan perangkat daerah pada tahun berjalan yang mengacu pada IKU Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL		OUTCOME
			2022	TARGET 2023	
1.	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan perkapita sesuai Angka Kecukupan Gizi	2,42%	2,72%	Meningkatnya Konsumsi Sayuran, Buah dan Protein Hewani
2.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Benih Bersertifikat	100%	100%	Tersedianya Benih/Bibit Tanaman Pangan yang memenuhi persyaratan mutu, penyediaan benih dan peredaran
3.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :			
		- Produksi Jagung	54,38% (767.054 Ton)	100% (1.856.552 Ton)	Tersedianya produksi Jagung
		- Produksi Padi	55,13% (772.475 Ton)	100% (1.471.176 Ton)	Tersedianya produksi Padi
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Areal Serangan OPT yang Dikendalikan	75%	75%	Terkendalinya Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

PK merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

PK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT disusun dengan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Dokumen RKT Tahun 2023 dan DPA TA. 2023 serta DIPA TA. 2023.

Selanjutnya, dari Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran yang tertulis dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 menjadi IKU Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam rangka mendukung pencapaian IKU Gubernur yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Gubernur yang merupakan Indikator Kinerja yang terkait langsung dengan PK Kepala Dinas yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT untuk bisa mencapai target yang ditentukan.

Adapun Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2023, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi 2022	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Share PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB	%	12.31	12.72	29.24	229.87
2	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	95.22	105	97.54	92.90
3	Meningkatnya Keanekaragaman Pangan yang dikonsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	75.30	71	74.37	104.75

Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang dijabarkan dari RPJMD ke dalam Renstra diharapkan bernilai strategis dan

memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja dalam mendukung pencapaian IKD. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Rincian Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT TA. 2023 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.

*Rincian Anggaran Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT,
Sumber Dana APBD TA. 2023*

No	Uraian	Alokasi
1.	APBD	
	a) Belanja Program	Rp. 74.720.980.332,-
	1. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 662.000.000,-
	2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 42.799.275.667-
	3. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 17.015.773.000,-
	4. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 13.927.671.505,-
	5. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 316.260.160,-
	b) Pendapatan	Rp. 3.100.000.000,-
	Jumlah Belanja+Pendapatan	Rp. 77.820.980.332,-

Berdasarkan tabel diatas rincian anggaran setiap program Sumber Dana APBD adalah sebagai berikut:

a). Belanja Program: Rp.74.720.980.332,-

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) Kegiatan, yaitu :

- ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) Kegiatan, yaitu :**
- ❖ Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
- 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Kegiatan, yaitu;**
- ❖ Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - ❖ Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
- 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) Kegiatan, yaitu;**
- ❖ Penataan Prasarana Pertanian
- 5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) Kegiatan, yaitu;**
- ❖ Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
- b). Pendapatan Rp. 3.100.000.000,-**

Tabel 2.5.

Rincian Anggaran Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Sumber Dana APBN TA. 2023

No	Uraian	Alokasi
2.	APBN	
	a). Dekonsentrasi	
1.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker Tanaman Pangan)	Rp. 3.875.123.000,-
2.	Dukungan Manajemen (Satker Tanaman Pangan)	Rp. 60.200.000,-
3.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Satker Hortikultura)	Rp. 126.192.000,-
4.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker Hortikultura)	Rp. 2.870.315.000,-
5.	Dukungan Manajemen (Satker Hortikultura)	Rp. 1.274.000.000,-
6.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Satker Perkebunan)	Rp. 198.400.000,-
7.	Dukungan Manajemen (Satker Perkebunan)	Rp. 396.310.000,-
8.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	Rp. 566.800.000,-
9.	Dukungan Manajemen (Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	Rp. 340.000.000,-
10.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Satker Penyuluhan)	Rp. 14.024.934.000,-
11.	Ketersediaan, akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker Ketahanan Pangan)	Rp. 3.437.554.000,-
12.	Dukungan Manajemen (Satker Ketahanan Pangan)	Rp. 110.000.000,-
	Jumlah Dekonsentrasi	Rp. 27.279.828.000,-
	b). Tugas Pembantuan	
1.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Satker Tanaman Pangan)	Rp. 2.086.240.000,-
2.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker Tanaman Pangan)	Rp. 14.972.750.000,-
3.	Dukungan Manajemen (Satker Tanaman Pangan)	Rp. 1.392.107.000,-
4.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Satker Hortikultura)	Rp. 1.388.944.000,-
5.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker Hortikultura)	Rp. 3.250.550.000,-
6.	Dukungan Manajemen (Satker Hortikultura)	Rp. 250.000.000,-
7.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Satker Perkebunan)	Rp. 1.608.584.000,-
8.	Dukungan Manajemen (Satker Perkebunan)	Rp. 225.191.000,-
9.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	Rp. 8.166.633.000,-
10.	Dukungan Manajemen (Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	Rp. 1.269.930.000,-
	Jumlah Tugas Pembantuan	Rp. 34.610.929.000,-
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. 61.890.757.000,-

Berdasarkan tabel diatas rincian anggaran setiap program Sumber Dana APBN adalah sebagai berikut:

a). Dekonsentrasi: Rp.27.279.828.000,-

- 1. Satker Tanaman Pangan, telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Program, yaitu :**
 - ❖ Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp.3.875.123.000,-
 - ❖ Dukungan Manajemen Rp.60.200.000,-
- 2. Satker Hortikultura, telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) Program, yaitu :**
 - ❖ Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp.126.192.000,-
 - ❖ Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp.2.870.315.000,-
 - ❖ Dukungan Manajemen Rp.1.274.000.000,-
- 3. Satker Perkebunan, telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Program, yaitu;**
 - ❖ Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp.198.400.000,-
 - ❖ Dukungan Manajemen Rp.396.310.000,-
- 4. Satker Prasarana dan Sarana Pertanian, telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Program, yaitu;**
 - ❖ Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp.566.800.000,-
 - ❖ Dukungan Manajemen Rp.340.000.000,-
- 5. Satker Penyuluhan, telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) Program, yaitu;**
 - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp.14.024.934.000,-
- 6. Satker Ketahanan Pangan, telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Program, yaitu;**
 - ❖ Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp.3.437.554.000,-
 - ❖ Dukungan Manajemen Rp.110.000.000,-

b). Tugas Pembantuan: Rp.34.610.929.000,-

- 1. Satker Tanaman Pangan, telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) Program, yaitu :**
 - ❖ Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp.2.086.240.000,-
 - ❖ Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp.14.972.750.000,-
 - ❖ Dukungan Manajemen Rp.1.392.107.000,-
- 2. Satker Hortikultura, telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) Program, yaitu :**
 - ❖ Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp.1.388.944.000,-
 - ❖ Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp.3.250.550.000,-
 - ❖ Dukungan Manajemen Rp.250.000.000,-

- 3. Satker Perkebunan, telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Program, yaitu;**
 - ❖ Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp.1.608.584.000,-
 - ❖ Dukungan Manajemen Rp.225.191.000,-
- 4. Satker Prasarana dan Sarana Pertanian, telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Program, yaitu;**
 - ❖ Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp.8.166.633.000,-
 - ❖ Dukungan Manajemen Rp.1.269.930.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam penyusunan LKIP ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Permenpanrb Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

Capaian	Kategori Capaian
$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
$70\% \leq X < 85\%$	Berhasil
$55\% < X < 70\%$	Cukup Berhasil
$X \leq 55\%$	Belum Berhasil

Tabel diatas merupakan acuan untuk menilai capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi.

Capaian Indikator Kinerja diukur dengan menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT telah menyusun Indikator Kinerja yang menjadi kerangka acuan untuk menetapkan PK Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja

PK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT beserta target, realisasi dan capaiannya dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi 2022	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Share PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB	%	12.31	12.72	29.24	229.87
2	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	95.22	105	97.54	92.90
3	Meningkatnya Keanekaragaman Pangan yang dikonsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	75.30	71	74.37	104.75

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB

Indikator Kinerja:

Share PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB

Sasaran Strategis 1, **Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB** Pertanian dengan Indikator Kinerja **Share PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB**.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebesar Rp.32.382.000.000,- (Data BPS Triwulan III Tahun 2022). Sumbangan terbesar adalah dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan 29,24% (Rp.9.469.000.000,-) Data PDRB yang ada saat ini belum sampai pada data sumbangan PDRB per sub sektor, dikarenakan data PDRB per sub sektor baru akan dipublikasikan BPS pada tanggal 28 Februari 2024.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB

Indikator Kinerja:

Nilai Tukar Petani (NTP)

Sasaran Strategis 2, **Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB**, Indikator kinerja **Nilai Tukar Petani (NTP)**

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Realisasi nilai tukar petani tahun 2023 pada bulan Desember sebesar 98,46 poin dengan capaian kinerja 93,77 atau dengan kategori Sangat Berhasil. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yakni 95,41 poin nilai NTP mengalami peningkatan, artinya kemampuan/daya beli petani mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB

Indikator Kinerja:

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Sasaran Strategis 3, **Meningkatnya Keanekaragaman Pangan yang dikonsumsi Masyarakat**, Indikator Kinerja **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

PPH adalah Susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan.

Data konsumsi pangan ditinjau berdasarkan aspek kuantitatif dan kualitatif, melalui penghitungan konsumsi energi dan protein berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas fisik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dalam perhitungan analisis PPH ini menggunakan Angka Kecukupan Energi anjuran sebesar 2.100 kkal dan Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gram (berdasarkan AKG hasil WNPNG Tahun 2018).

Skor PPH tahun 2023 untuk Provinsi NTT adalah 74,3 poin dari target 71 poin jika dengan capaian kinerja 104,75 dengan kategori Sangat Berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 75,3 poin menunjukkan bahwa ada penurunan sebesar 1% disebabkan karena pola konsumsi yang belum Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang diakibatkan pemahaman akan pola konsumsi B2SA yang masih rendah.

Berikut ini adalah Tabel Skor PPH Tahun 2023:

Tabel 3.3
Skor PPH Provinsi NTT Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	357,3	1.313	67,7	62,5	0,5	33,9	31,3	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	39,4	50	2,6	2,4	0,5	1,3	1,2	2,5	1,2
3	Pangan Hewani	80,2	135	7,0	6,4	2,0	14,0	12,9	24,0	12,9
4	Minyak dan Lemak	18,6	168	8,7	8,0	0,5	4,3	4,0	5,0	4,0
5	Buah/Biji Berminyak	2,8	15	0,8	0,7	0,5	0,4	0,4	1,0	0,4
6	Kacang-kacangan	10,9	37	1,9	1,8	2,0	3,9	3,6	10,0	3,6
7	Gula	18,0	67	3,4	3,2	0,5	1,7	1,6	2,5	1,6
8	Sayur dan Buah	222,1	108	5,6	5,1	5,0	27,9	25,7	30,0	25,7
9	Lain-lain	67,2	45	2,3	2,2	-	-	-	-	-
	Total		1.938	100,0	92,3		87,3	80,6	100,0	74,3

Keterangan :

*) Angka Kecukupan Energi = 2.100 Kkal/Kapita/Hari

Sumber Data : Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa skor PPH dari kelompok padi-padian sebesar 25,0% dan sudah memenuhi standar ideal. Untuk kelompok umbi-umbian sebesar 1,2% dari skor ideal 2,5% berarti ada kekurangan sebesar 1,3%. Untuk kelompok pangan hewani sebesar 12,9% dari skor ideal sebesar 24,0% artinya ada kekurangan sebesar 11,1%. Untuk kelompok Minyak dan lemak tercapai 4,0% dari skor ideal 5,0% yang artinya ada kekurangan 1%. Kacang-kacangan tercapai sebesar 3,6% dari skor ideal 10,0% maka ada kekurangan sebesar 6,4%. Gula sebesar 1,6% dari 2,5% maka ada kekurangan 0,9%. Untuk kelompok sayur dan buah tercapai 25,7% dari skor ideal 30,0% maka ada kekurangan sebesar 4,3%.

Berikut adalah Tabel AKE dan AKP Tahun 2023:

Tabel 3.4

Angka Konsumsi Energi dan Angka Konsumsi Protein Provinsi NTT Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
		Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Gram/ Kapita	%	% AKP**)
1	Padi-padian	1.313	67,7	62,5	30,3	55,5	53,1
2	Umbi-umbian	50	2,6	2,4	0,4	0,7	0,7
3	Pangan Hewani	135	7,0	6,4	13,6	24,9	23,8
4	Minyak dan Lemak	168	8,7	8,0	0,0	0,0	0,0
5	Buah/Biji Berminyak	15	0,8	0,7	0,1	0,3	0,3
6	Kacang-kacangan	37	1,9	1,8	3,1	5,6	5,4
7	Gula	67	3,4	3,2	0,0	0,1	0,1
8	Sayur dan Buah	108	5,6	5,1	5,2	9,6	9,1
9	Lain-lain	45	2,3	2,2	1,8	3,3	3,2
	Total	1.938	100,0	92,3	54,5	100,0	95,7

3.2. Capaian Pelaksanaan Anggaran

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap belanja program. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya.

Dukungan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT pada TA. 2023 bersumber dari APBD dan APBN. Alokasi anggaran awal APBD sebesar Rp.78.234.514.049,- namun anggaran tersebut mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali menjadi sebesar Rp.74.720.980.332,-. Target Pendapatan awalnya sebesar Rp.8.000.000.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.3.100.000.000,- sedangkan Anggaran APBN sebesar Rp.61.890.757.000,-

Tabel 3.6

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama TA. 2023

Keterangan	Jumlah				
	DPA Awal (Murni)	Revisi I (15 Feb)	Revisi II (14 Apr)	Revisi III (06 Jun)	Revisi IV (10 Nov)
Total	78,231,514,049	78,231,514,049	78,538,080,349	78,538,080,349	74,720,980,332
Pendapatan	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	3,100,000,000
Belanja Operasi	57,671,160,699	61,720,920,699	62,027,486,999	62,027,486,999	58,210,386,982
Belanja Modal	16,510,593,350	16,510,593,350	16,510,593,350	16,510,593,350	16,510,593,350
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	662,000,000	662,000,000	662,000,000	662,000,000	662,000,000
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	45,704,002,492	45,704,002,492	45,722,588,392	45,722,588,392	42,799,275,667
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10,483,718,265	14,533,478,265	14,821,458,665	14,821,458,665	13,927,671,505
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17,015,773,000	17,015,773,000	17,015,773,000	17,015,773,000	17,015,773,000
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	316,260,292	316,260,292	316,260,292	316,260,292	316,260,160

Pada Tahun 2023, Alokasi Anggaran Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan mengalami 4 (empat) kali perubahan, rinciannya sebagai berikut:

1. Perubahan I

Perubahan anggaran terjadi pada:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Anggaran pada DPA awal untuk program ini sebesar Rp.9.829.631.685,- mengalami penambahan menjadi Rp.13.876.391.68 antara lain:

- Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian yang semula Rp.4.082.035.685,- menjadi Rp.4.082.035.670,-.
- Sub Kegiatan Perbanyak Benih Jagung yang semula Rp.3.751.596.000,- menjadi Rp.7.801.356.015,-

2. Perubahan II

Perubahan anggaran terjadi pada beberapa program antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Anggaran pada DPA Revisi I untuk program ini sebesar Rp.10.420.744.692,- mengalami penambahan menjadi Rp.10.439.330.592,-. Adapun kegiatan yang anggarannya bertambah yaitu:

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang semula Rp.10.116.126.720,- menjadi Rp.10.134.712.620,-.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Anggaran pada DPA Revisi I untuk program ini sebesar Rp.9.797.356.015,- mengalami penambahan menjadi Rp.10.085.336.415,- antara lain:

- Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan yang semula Rp.7.801.356.015,- menjadi Rp.8.089.336.415,-.

3. Perubahan III

Pada Revisi III tidak terjadi perubahan pagu anggaran.

4. Perubahan IV

Perubahan anggaran terjadi pada beberapa program antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Anggaran pada DPA Revisi III untuk program ini sebesar Rp.45.185.175.264,- mengalami perubahan menjadi Rp.42.302.889.332,-. Adapun kegiatan yang anggarannya berubah yaitu:

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang semula Rp.34.998.000,- menjadi Rp.96.880.360,-.
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang semula Rp.34.630.802.872,- menjadi Rp.31.724.887.000,-.
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu yang semula Rp.0,- menjadi Rp.10.000.000,-.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang semula Rp.10.252.161.320,- menjadi Rp.10.127.832.000,-.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang semula Rp.5.017.200,- menjadi Rp.140.170.200,-.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material yang semula Rp.3.292.200,- menjadi Rp.3.281.400,-.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Anggaran pada DPA Revisi III untuk program ini sebesar Rp.14.167.372.085,- mengalami perubahann menjadi Rp.13.145.540.725,- antara lain:
- Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura yang semula Rp.0,- menjadi Rp.493.732.235,-.
 - Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan yang semula Rp. 8.089.336.415,- menjadi Rp.7.225.738.380,-.
 - Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan yang semula Rp.2.125.788.000,- menjadi Rp.1.601.866.640,-.
- c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Anggaran pada DPA Revisi III untuk program ini sebesar Rp.316.260.292,- mengalami perubahann menjadi Rp.316.260.160,- antara lain:
- Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura yang semula Rp.264.149.492,- menjadi Rp.264.149.360,-.

3.2.1. Capaian Pelaksanaan Anggaran APBD

Tabel 3.7

Realisasi Pelaksanaan Anggaran, Sumber Dana APBD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Tahun 2023					Sisa Anggaran (Rp)
			Target		Realisasi			
			Fisik %	Keu %	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	APBD	77,820,980,332			67,053,264,361		86.16	
	a) Belanja Program	74,720,980,332	100	96.00	65,313,841,344	73.27	87.41	9,407,138,988
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	662,000,000	100	96.00	359,831,750	54.50	54.36	302,168,250
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	42,799,275,667	100	96.00	39,779,896,471	92.95	92.95	3,019,379,196
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17,015,773,000	100	96.00	14,816,044,791	87.10	87.07	2,199,728,209
4	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13,927,671,505	100	96.00	10,172,393,934	73.05	73.04	3,755,277,571
5	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	316,260,160	100	96.00	185,674,398	58.75	58.71	130,585,762
	b) Pendapatan	3,100,000,000	100	96.00	1,739,423,017	100	56.11	

Total Anggaran sumber dana APBD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT TA. 2023 sebesar Rp.77.820.980.332,- terdiri dari Belanja Program Rp.74.720.980.332,- realisasi sebesar Rp.65.313.841.344,-(73,27%) dan Pendapatan dari target sebesar Rp.3.100.000.000,- realisasi sebesar Rp.1.739.423.017,-(56,11%).

✓ **Realisasi Belanja Program**

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Anggaran sebesar Rp.662.000.000,- realisasi sebesar Rp.359.831.750,-(54,36%).

Didukung 1 kegiatan:

❖ ***Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi***

Bantuan Pemerintah Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebesar Rp.521.912.500,- realisasi Rp.292.271.000,-(56%) dan dukungan operasional sebesar Rp.140.087.500,- realisasi Rp.67.560.750,-(48,22%). Target kegiatan pada 25 Kelompok/250 Rumah Tangga di 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Realisasi/Capaian (Fisik): 14 Kelompok/140 Rumah Tangga pada 12 Kabupaten di Provinsi NTT (56%).

Sub Kegiatan yang dilaksanakan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) melalui P2L.

Tujuan Umum: memberikan bantuan untuk kelompok sasaran berupa bibit sayur dan buah serta alat dan bahan pertanian sederhana dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

Tujuan Khusus: memberdayakan rumah tangga penerima bantuan dalam penyediaan sumber pangan dan gizi melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal; meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat atau rumah tangga penerima bantuan dalam mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA sebagai bentuk pencegahan terhadap stunting.

Sasaran P2L adalah 250 Rumah Tangga yang tergabung dalam 25 Kelompok pada 22 Kabupaten/Kota di NTT dengan sebaran lokasi sesuai Keputusan Gubernur NTT No.51/KEP/HK/2023 tentang Lokasi Prioritas Penanganan Stunting di Provinsi NTT Tahun 2023 tanggal 01 Februari 2023.

Kegiatan P2L terlaksana sampai pada tahap identifikasi CPCL di 12 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Flores Timur, Sikka, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya sedangkan untuk 10 kabupaten/Kota yaitu: Kota Kupang, TTU, Rote Ndao, Alor, Lembata, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai dan Sumba Timur tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Hasilnya: meningkatnya frekuensi konsumsi pangan B2SA (sayur, buah, protein dan karbohidrat) pada rumah tangga/kelompok penerima manfaat P2L.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah:

- Adanya keterbatasan anggaran sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana bantuan pemerintah dan hanya tersalurkan ke 12 Kabupaten dengan 140 rumah tangga penerima;

Upaya pemecahan masalah:

- ✓ Membangun koordinasi yang baik dengan Kabupaten/Kota terkait dengan keterbatasan anggaran sehingga pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan P2L dilakukan oleh Kabupaten penerima dan menyampaikan laporan perkembangan secara periodik ke Provinsi;
- ✓ Dukungan anggaran melalui Dana APBD II sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi Program P2L bagi Kabupaten dengan angka stunting tinggi.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi anggaran sebesar Rp.42.799.275.667,- realisasi sebesar Rp.39.779.896.471,-(92,95%), terdiri dari kegiatan:

1) ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***, Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Hasilnya adalah tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT TA. 2023.

2) ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***, digunakan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Hasilnya adalah terlaksananya kegiatan administrasi keuangan yakni pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

3) ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***,

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Hasilnya adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran.

- 4) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Hasilnya adalah terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terdiri dari 6 unit Printer, 2 unit AC, 3 unit komputer dan 1 unit laptop.
- 5) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Hasilnya adalah terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yakni jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta pelayanan umum kantor dan pelayanan administrasi perkantoran.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Anggaran sebesar Rp.17.015.773.000,- realisasi Rp.14.816.044.791,-(87,07%):

❖ **Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya** Sasarannya adalah Pembangunan Ruang Laboratorium Benih, Ruang Penilaian Varietas, Ruang Penyimpanan Benih, Ruang Sertifikasi Benih.

Hasilnya adalah terlaksananya kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian, meliputi:

- a. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih:
 - Renovasi: Ruang Pengawasan Pemasaran 1 unit; Ruang Penilaian Varietas 1 unit; Ruang Penyimpanan Sampel 1 unit; Ruang Sertifikasi Benih 1 unit; Laboratorium Benih 1 unit.
 - Pengadaan: Anakan Timbangan 2 unit; Grinding Mills 4 unit; Thermo Couple Data Logger 1 unit.
- b. UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura:
 - Pengadaan: Traktor Roda 2 (TR2) 1 unit; Combine Harvester 2 unit; Pembangunan Sumur Bor dan Instalasi 2 unit.
 - Renovasi: Gudang Alsintan 1 unit; Gudang Penyimpanan Benih 6 unit; Lantai Jemur 3 unit.
- c. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:
 - Pengadaan: Alat Potong Rumput 15 unit; Mini Sensor 15 unit; Genset 2 unit; Bor Mesin 10 unit; Timbangan Neraca Digital 8 unit; Hand Sprayer Electric 15 unit; Mist Blower 15 unit; Digestion Apparatus 2 unit; Digital Orbital Shaker 2 unit; Dissection Set 10 unit; Haemocytometer 2 unit;

Micro Pipet 3 unit; Microscope 2 unit; Peralatan pPembuatan Specimen Voucer opt 10 unit; PH Meter 4 unit; Shaker 1 unit; Pompa Jinjing 4 unit; Pompa Punggung 22 unit; Camera Digitsl 3 unit; Drone 2 unit; Laptop 8 unit; Alat Pelindung Diri lengkap 20 unit; Perlengkapan Pengamanan Petugas Kebakaran 10 unit.

- Renovasi: Balai Proteksi Perkebunan 1 unit; Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) 1 unit.

Dari target 220 unit terealisasi 199 unit, terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan pada UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu Pembangunan Sumur Bor 1 unit di BBI Mbay, Kabupaten Nagekeo karena lokasi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, sementara pada UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pengadaan Mini Sensor sebanyak 15 unit dan Cooler Box Chest Freezer sebanyak 5 unit karena kedua alat tersebut tidak terdapat dalam petunjuk teknis DAK TA.2023.

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian anggaran sebesar Rp.13.927.671.505,- realisasi Rp.10.172.393.934,-(73,04%) terdiri dari kegiatan:

1. Pengawasan Peredaran Sarana

a) Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian

Tujuannya adalah:

- Mengembangkan sistem penyediaan dan pelayanan jasa alsintan dalam mendorong percepatan peningkatan produksi dan produktifitas, efisiensi usaha dan kualitas hasil pertanian;
- Mendorong pengembangan pemanfaatan teknologi pertanian modern;
- Mendorong Percepatan perluasan areal tanam dan meningkatkan luas lahan terolah.

Sasarannya adalah Kelompok Tani (Poktan) Penerima Bantuan Alsintan di 21 Kabupaten/Kota dan Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Hasilnya adalah pengadaan alsintan TR2 sedang sebanyak 75 unit, pompa air 2 dim 25 unit, pompa air 3 dim 9 unit dan cultivator 18 unit yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan petani terhadap alsintan pengolah lahan.

b) Pengembangan Jagung di Bena, Kabupaten TTS

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Desember 2023 untuk membuka lahan pertanian seluas 15 ha dan olah lahan dengan menggunakan traktor roda empat (TR4) seluas 10 ha.

Hasilnya adalah terolahnya 10 ha lahan Poktan Hetven di Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS; dibukanya lahan baru seluas 15 ha di Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS.

2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman anggaran sebesar Rp.9.845.635.835,- realisasi sebesar Rp.6.825.391.081,-

a) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan

- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, Tujuannya adalah kegiatan perbanyak benih tanaman hortikultura.

Hasilnya: tersedianya alsintan untuk kegiatan perbanyak benih hortikultura. di 5 BBH.

- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan

Tujuannya adalah menyediakan benih padi dan jagung Sasaran: 9 Balai Balai Benih Induk/Utama Tanaman Pangan dan 1 Kebun Palawija yang dilaksanakan pada Musim Tanam Asep 2023 dan Musim Tanam Okmar 2023/2024.

Hasilnya: tersedianya benih sumber untuk penangkaran/pengembangan padi seluas 612 Ha dan jagung seluas 28 Ha. Dampaknya terjadi pengembangan areal produksi padi seluas 612 Ha; terjadi pengembangan areal produksi jagung seluas 472 Ha; tersedianya kebutuhan pangan; meningkatnya pendapatan ekonomi petani; Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b) Tanam Jagung Panan Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK)

Target Luas areal tanam berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR)/Kredit Mikro Merdeka (KMK) dan Non KUR/KMM seluas 300.000 ha. Realisasi pada Musim Tanam (MT) II April-September (ASEP) 2023 TJPS-PK Non Kredit dari target seluas 39.800 ha terealisasi seluas 27.535 ha. Sedangkan pada MT. I Oktober-Maret (OKMAR) 2023/2024 targetnya seluas 260.200 ha, perkembangan realisasi tanam khususnya MT. I (Oktober-Desember) 2023 seluas 56.792 ha.

Tujuannya:

- Meningkatkan luas areal tanam jagung yang dibiayai petani secara mandiri berbasis teknologi;
- Meningkatkan produktivitas dan produksi jagung;
- Mendorong petani menjadi wirausahawan mandiri;
- Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan ketahanan ekonomi masyarakat;
- Meningkatkan usaha ternak masyarakat;
- Memberikan arah menuju pertanian terpadu.

Sasarannya dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Sasaran TJPS-PK berbasis KUR/KMM dan Non KUR/KMM Tahun 2023

No	Kabupaten	Sasaran Tanam		Total MT II dan MT I
		MT II ASEP 2023	MT I OKMAR 2023/2024	
1	Sumba Barat	100	5.400	5.500
2	Sumba Timur	1.250	11.350	12.600
3	Kupang	360	15.040	15.400
4	Timor Tengah Selatan	100	24.900	25.000
5	Timor Tengah Utara	260	13.740	14.000
6	Belu	125	9.375	9.500
7	Alor	200	9.300	9.500
8	Lembata	150	12.350	12.500
9	Flores timur	-	12.500	12.500
10	Sikka	50	14.450	14.500
11	Ende	100	5.400	5.500
12	Ngada	500	7.000	7.500
13	Manggarai	250	3.250	3.500
14	Rote Ndao	-	5.000	5.000
15	Manggarai Barat	150	3.850	4.000
16	Sumba Tengah	-	3.500	3.500
17	Sumba Barat Daya	35.090	61.910	97.000
18	Nagekeo	100	4.900	5.000
19	Manggarai Timur	350	17.650	18.000
20	Malaka	665	19.335	20.000
Total		39.800	260.200	300.000

Dari target seluas 39.800 ha Pada MT. II 2023 TJPS-PK Non Kredit terealisasi seluas 27.535 ha, dengan capaian produksi sebesar 61.980 ton. Rincian per kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi MT. II 2023 TPJS-PK

No	Kabupaten	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Integrasi Ternak			
					Sapi	Babi	Kambing	Ayam
1	Sumba Barat	290	273	630				
2	Sumba Timur	171	160	376				
3	Kupang	266	250	627		2		
4	TTS	117	110	285				
5	TTU	1.118	1.017	2.351				
6	Belu	113	106	240				
7	Alor	1	1	2				
8	Lembata	12	10	23				
9	Flores timur	78	71	160				
10	Sikka	43	40	97		3	5	5
11	Ende	147	138	295				
12	Ngada	707	665	1.708	7	18	1	18
13	Manggarai	195	183	485				
14	Rote Ndao	65	59	126				
15	Manggarai Brt	314	297	763				
16	Sumba Tengah	253	230	484		11	4	45
17	SBD	18.968	17.261	43.424				
18	Nagekeo	274	258	600				
19	Manggarai Tmr	368	346	771	8	38	57	54
20	Sabu Raijua	1	1	1				
21	Malaka	3.897	3.546	8.451		7	2	149
22	Kota Kupang	37	35	81				
Total		27.435	25.057	61.980	15	79	69	271

Pada MT. I 2023/2024 target seluas 260.200 ha yang tersebar di 20 Kabupaten, perkembangan realisasi tanam khususnya MT.I (Oktober-Desember) 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Target Pelaksanaan TJPS-PK MT. I 2023/2024

No	Kabupaten	Rencana Tanam MT. I (OKMAR) 2023/2024	Realisasi Tanam MT. I (OKDES) 2023
1	Sumba Barat	5.400	179
2	Sumba Timur	11.350	3.571
3	Kupang	15.040	1.747
4	Timor Tengah Selatan	24.900	14.774
5	Timor Tengah Utara	13.740	2.513
6	Belu	9.375	7.499
7	Alor	9.300	2.923
8	Lembata	12.350	545
9	Flores Timur	12.500	2.300,50
10	Sikka	14.450	2.515
11	Ende	5.400	1.095
12	Ngada	7.000	827
13	Manggarai	3.250	90
14	Rote Ndao	5.000	790
15	Manggarai Barat	3.850	1.127
16	Sumba Tengah	3.500	861,5
17	Sumba Barat Daya	61.910	10.704
18	Nagekeo	4.900	952
19	Manggarai Timur	17.650	1.010,55
20	Malaka	19.335	768
	Total	260.200	56.792

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah:

- Terbatasnya sumber air yang berdampak pada kekeringan;
- Terbatasnya pengetahuan petani dalam mengakses KUR/KMM;
- Terbatasnya jumlah Perbankan yang terlibat (hanya bank NTT);
- Terlambatnya proses SLIK, Verifikasi Lapangan sampai akad kredit di Bank;
- Terlambatnya sarana produksi pertanian oleh offtaker;
- Offtaker masih sering berganti dan atau mengundurkan diri bahkan mendekati waktu tanam;

- Masih ada petani yang tidak menjual hasilnya ke Offtaker tapi ke pedagang/pengepul karena adanya selisih harga.

Upaya pemecahan yang dilakukan:

- ✓ Melakukan koordinasi secara periodik dengan semua *stake holders* terkait;
- ✓ Melakukan pertemuan koordinasi, teknis, monitoring perkembangan dan evaluasi secara periodik di tingkat Provinsi dengan Kabupaten dan petugas lapangan;
- ✓ Melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dan pengawalan secara kolaboratif sampai dengan tingkat lapangan.

c) Bantuan Benih untuk Antisipasi Gagal Panen

Target Areal tanam padi seluas 2.041 ha, jagung seluas 2.550 ha dan kacang hijau seluas 150 ha. Realisasi bantuan benih seluas 2.041 ha (51.025 kg atau 100%) untuk komoditi padi, 1.974 ha (49.350 kg atau 97%) untuk komoditi jagung dan 150 ha (3.750 kg atau 100%) untuk komoditi kacang hijau.

Tujuannya:

- Memberikan bantuan benih padi, jagung dan kacang hijau kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan produksi;
- Meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga;
- Meningkatkan pendapatan petani;
- Meningkatkan peran serta kelembagaan petani.

Sasarannya adalah Kabupaten terdampak kekeringan, adanya serangan hama penyakit tanaman (belalang) dan terkena bencana banjir.

Hasilnya adalah tersalurnya benih:

- Padi varietas Ciherang di 9 Kabupaten: Kupang 238 ha, Belu 20 ha, Malaka 200 ha, Manggarai Timur 97 ha, Ngada 546 ha, Sikka 522 ha, Sumba Timur 50 ha, Sumba Tengah 168 ha dan Rote Ndao 200 ha.
- Jagung seluas 2.550 ha, realisasi penyaluran benih di 11 Kabupaten seluas 1.974 Ha = 49.360 Kg (97%), yaitu: Kupang 300 ha, Belu 300 ha, Malaka 500 ha, Manggarai Timur 120 ha, Ngada 153 ha, sikka 218 ha, Sumba Timur 50 ha, Sumba Tengah 350 ha, Nagekeo 20 ha, Rote Ndao 340 ha, Alor 200 ha, hanya untuk 1.974 ha (49.360 ha) atau hanya 97%. Sisanya sebesar 3%

(1.640 Kg) tidak dapat tersalur karena benih tidak tersedia. Untuk Kabupaten Sumba Tengah, dari 7.000 kg (350 ha) yang dialokasikan, tersalur 5.360 kg.

- Kacang Hijau seluas 150 ha di 3 kabupaten: Kupang, Malaka dan Sumba Timur masing-masing 50 ha.

Kabupaten Kupang dan Sumba Timur belum dilakukan penanaman karena adanya kemarau yang berkepanjangan sebagai dampak dari El Nino, sedangkan untuk Kabupaten Malaka, telah dilakukan penanaman pada September 2023. Hal ini disebabkan karena kondisi air tanah dan tingginya kelembaban yang mendukung pertumbuhan kacang hijau.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah:

- Terjadinya kemarau panjang sebagai dampak dari El Nino sehingga sebagian besar wilayah belum melakukan penanaman benih padi, jagung dan kacang hijau;
- Kekeringan dan keterbatasan debit air irigasi pada beberapa wilayah, terutama pada musim kemarau sehingga terjadi persaingan dalam penggunaan air irigasi;
- Benih tidak tersedia sesuai kalender tanam sehingga terjadinya pergeseran jadwal tanam;
- Terdapat benih yang tidak lulus Uji Laboratorium.

Upaya Pemecahan masalah:

- ✓ Melakukan koordinasi dengan pihak BMKG untuk mendapatkan informasi perkembangan El Nino dan rekomendasi musim hujan Tahun 2024;
- ✓ Petani lahan basah melakukan penanaman pada areal yang beririgasi dan atau ada sumber air lainnya;
- ✓ Meningkatkan penangkaran benih secara maksimal, untuk mendukung ketersediaan benih insitu sesuai kebutuhan masing-masing;
- ✓ Pendampingan oleh PBT dan SOP Pengawasan dan sertifikasi benih yang benar;
- ✓ Memanfaatkan lahan yang terdapat sisa-sisa air.

d) Pengembangan Jagung di Bena, Kabupaten TTS

Target seluas 10 ha dan produksi 4 ton/ha. Tujuannya adalah meningkatkan produksi, pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan diawali dengan membuka lahan baru menggunakan excavator yang dilanjutkan pengolahan lahan dengan TR 4.

Untuk saprodi (benih dan pupuk) telah disalurkan ke poktan untuk penanamannya.

Melalui kegiatan ini diharapkan adanya produksi jagung pipilan kering sebanyak 40.000 kg (1 ha = 4.000 kg) sehingga meningkatkan pendapatan petani.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah: Adanya fenomena iklim El Nino yang tidak menentu sehingga mengakibatkan jadwal tanam bergeser dari bulan Desember ke akhir MT. I

Upaya Pemecahan masalah: mempercepat penanaman jagung pada saat turun hujan.

e) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

Kegiatan DBHCHT Tahun 2023 diarahkan pada kegiatan utama, yaitu:

❖ **Kegiatan Pengembangan Tanaman Tembakau** dilaksanakan di 5 Kabupaten: Kabupaten Kupang: 60 ha, TTS: 40 ha, TTU: 40 ha, Belu: 20 ha, dan Kabupaten Malaka: 40 ha.

Tujuannya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman tembakau melalui penggunaan bibit bermutu, penggunaan saprodi, dan pemeliharaan tanaman sesuai anjuran.

Sasarannya adalah petani tembakau yang telah mengusahakan penanaman tembakau namun produksi maupun produktivitasnya masih dibawah potensinya.

Hasilnya: meningkatnya mutu hasil tembakau menjadi lebih baik dan memenuhi kebutuhan pasar baik lokal maupun nasional dan internasional serta meningkatnya luas tanam dan produksi tembakau yang berpengaruh pada meningkatnya dana DBHCHT tahun berikutnya.

- ❖ **Kegiatan Pelatihan budidaya dan Pascapanen Tembakau** dengan melibatkan 125 orang petani tembakau, masing-masing 25 orang petani di 5 kabupaten Kegiatan DBHCHT.

Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman petani pada teknik budidaya dan cara pengelolaan tembakau setelah panen agar produksinya meningkat dan mutu tetap terjaga.

Hasilnya: petani dapat mempraktekkan sendiri cara budidaya tembakau yang baik sehingga berdampak pada efisiensi dalam pemanfaatan waktu pemeliharaan tanaman untuk peningkatan produksi.

- ❖ **Pelatihan Pupuk dan Pestisida Organik** dilaksanakan di 5 Kabupaten masing-masing diikuti 25 orang petani, total peserta sebanyak 125 orang. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman petani agar dapat memanfaatkan sisa bahan organik disekitarnya guna meningkatkan hasil tanaman tembakau. Kegiatan ini berdampak pada pertanian petani aman dari kekurangan pupuk dan gangguan OPT dan memberikan hasil yang optimal.

- ❖ **Pengembangan Tanaman Cengkeh**

dilaksanakan di 2 Kabupaten: Ngada dan Manggarai Barat seluas 80 ha dengan alokasi per Kabupaten: Ngada 40 ha dan Manggarai Barat 40 ha. Tujuannya untuk peningkatan luas areal petani cengkeh dengan komoditi perkebunan lain agar dapat meningkatkan pendapatan petani.

- ❖ **Pengadaan Peralatan Perajang Mesin Maupun Manual**

Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam teknis budidaya, pasca panen tembakau. Sasarannya petani tembakau dengan mutu rajangan yang rendah.

Hasilnya: tersalurkannya 4 unit mesin perajang tembakau dan 18 unit alat perajang tembakau manual kepada petani tembakau di 5 kabupaten.

Masalah dan Upaya Pemecahan:

Masalah:

- Perlakuan budidaya oleh petani sangat minim, baik persemaian, pemeliharaan, pemupukan maupun pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman tembakau sehingga menurunkan produksi dan produktifitas hasil tembakau;

- Masih rendahnya sumber daya dalam penanganan panen dan pasca panen tembakau. Petani tidak memperhitungkan produksi yang diperoleh karena hanya untuk konsumsi keluarga;
- Kekeringan yang melanda wilayah NTT berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau sehingga menjadi perhatian khusus.

Upaya Pemecahan:

- ✓ Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menyiapkan dana untuk pemeliharaan, dan evaluasi kegiatan secara kontinyu sehingga keberhasilan yang diharapkan dapat tercapai;
- ✓ Pengawasan dan pendampingan oleh petugas Provinsi dan Kabupaten, penentuan waktu tanam disesuaikan dengan keadaan iklim di lokasi sasaran serta pengairan tanaman dengan menggunakan irigasi tetes saat tanaman mengalami cekaman air;
- ✓ Perlunya pelatihan petani dan petugas Kabupaten tentang penggunaan dan manfaat pupuk organik bagi tanaman, sehingga petani mengetahui manfaat dan dapat mengaplikasikannya secara berkelanjutan guna peningkatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman tembakau.

❖ Pengembangan Kawasan Tanaman Buah Jeruk

Sarana Produksi berupa benih Jeruk 400 anakan/ha dan pupuk NPK 80kg/ha sudah disalurkan ke Kelompok Tani di Kabupaten Kupang luas lahan 50 Ha. Tujuannya membantu Petani/Kelompok Tani untuk pengadaan Sarana Produksi dalam rangka Pengembangan Kawasan Tanaman Buah Jeruk serta meningkatkan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jeruk pada kawasan pengembangan tanaman buah.

Mengingat kegiatan ini baru terealisasi di P-DPPA ke-IV Tahun 2023, maka penyaluran benih dan sarana produksi baru dilakukan pada Minggu ke-III bulan Desember sehingga belum seluruhnya ditanam oleh kelompok tani. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan populasi jeruk Keprok Soe yang

berdampak pada meningkatnya produksi dan pendapatan petani di Kabupaten Kupang.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah: Sarana produksi/pupuk yang disalurkan belum sesuai kebutuhan tanaman karena keterbatasan anggaran

Pemecahan Masalah: Memantapkan proses perencanaan dengan memperhatikan kebutuhan benih/anakan serta sarana produksi sesuai rekomendasi teknis kegiatan pengembangan kawasan tanaman jeruk serta mendorong petani untuk menyediakan sarana produksi lanjutan yang mendukung kegiatan pengembangan kawasan tanaman jeruk secara swadaya.

- ❖ **Pengembangan Tanaman Kelor**, semula direncanakan pengembangan sebanyak 500.000 anakan dengan sistem lelang direvisi menjadi 125.000 anakan dengan sistem swakelola oleh kelompok tani.

Tujuannya untuk Memanfaatkan lahan tidur yang dibiarkan untuk pengembangan tanaman; Meningkatkan populasi dan produksi daun dan biji kelor sebagai bahan pangan maupun bahan baku industri; Memenuhi kebutuhan gizi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan masyarakat; Meningkatkan pendapatan melalui penjualan bahan baku kelor dan peningkatan nilai tambah produk olahan kelor. Sasarannya: Terlaksananya penanaman kelor oleh masyarakat baik kelompok tani di daerah sebanyak 125.000 benih; Terpenuhinya gizi masyarakat dengan pemanfaatan kelor sebagai Pangan Alternatif serta untuk menekan laju angka Stunting di 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Malaka, Ngada dan Sumba Timur.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah:

- Tanaman kelor lebih bertahan hidup bila disemai pada musim panas dan ditanam pada awal musim hujan, namun karena adanya perubahan anggaran, maka penanaman baru dilaksanakan pada musim hujan;

- Pada persemaian kelor, kondisi suhu mengalami peningkatan sehingga prosentase tumbuh benih kecil dan harus disemai kembali. Hal ini berlanjut pada penilaian anakan dari 125.000 anakan, yang lolos sertifikasi hanya sebanyak: 84.186 (67 %);
- Perubahan anggaran yang terjadi pada triwulan IV berakibat pada menumpuknya anggaran pada akhir tahun, dengan keterbatasan GUP, mengakibatkan kegiatan kelor tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran;
- Sumber benih kelor bukan milik pemerintah sehingga tidak terpelihara. Dari luasan 1 ha dengan potensi benih 800.000 anakan, tidak menjamin ketersediaan benih tepat waktu karena pohon sumber benih kurang terpelihara dan mati sehingga ketersediaan benihnya berkurang. Efeknya pada persemaian benih terlihat daya tumbuh benih bervariasi.

❖ **Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

- Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, tujuannya untuk perbanyak benih tanaman hortikultura di Balai Benih Hortikultura. Hasilnya adalah tersedianya alat dan mesin pertanian untuk kegiatan perbanyak benih hortikultura.
- Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan. Target: Padi 11 Ha, Jagung 6 Ha Realisasi/Capaian (Fisik): 100% Tujuannya untuk menyediakan benih padi dan jagung di 9 Balai Balai Benih Induk/Utama Tanaman Pangan dan 1 Kebun Palawija. Hasilnya adalah tersedianya benih padi varietas Ciherang kelas BP sebanyak 6.100 Kg, varietas Inpari 32 kelas BP sebanyak 9.000 Kg dan benih jagung varietas Lamuru kelas BP sebanyak 720 Kg.

Masalah:

- Ketiadaan atau kekurangan air di semua BBI/BBU/BBH mengakibatkan kegiatan yang seharusnya dilakukan pada Balai Benih yang sudah ditentukan harus dialihkan ke lahan BBI/BBU, BBH lain, bahkan berdampak pada kegagalan produksi;

- Sumber daya manusia penunjang kegiatan perbanyak benih baik tanaman pangan maupun hortikultura pada tingkat BBI/BBU dan BBH masih kurang maksimal baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
- Dukungan sarana prasarana sangat kurang karena sudah banyak peralatan yang tua dan rusak menyebabkan tidak maksimalnya kegiatan perbanyak benih pada BBI/BBU dan BBH.

Upaya pemecahan masalah:

- ✓ Penetapan kalender tanam kegiatan perbanyak benih sesuai dengan iklim setempat;
- ✓ Peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan atau magang petugas pengelola Balai Benih;
- ✓ Melakukan kerjasama dengan Balai Besar Padi dan Palawija dalam mempersiapkan benih sumber untuk kegiatan perbanyak pada BBI/BBU.

❖ **Pengembangan ketenagaan Penyuluhan Pertanian**

1) ***Pelatihan Penyegaran Bagi Penyuluh Pertanian (READSI)***

Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh pertanian pendamping program READSI tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung Pembangunan Pertanian di NTT.

Sasarannya adalah Penyuluh Pertanian sebanyak 80 orang yang dibagi dalam 2 tahap dengan Tema tahap I “Teknik Pengelolaan Pertanian” dan tahap II “Teknik Pengolahan Pertanian”.

Hasilnya:

Tahap I

Peningkatan pengetahuan bagi 40 orang penyuluh pertanian yang berasal dari Kabupaten Kupang dan Belu, tentang Kebijakan Pembangunan Pertanian di NTT, Pengendalian hama dan penyakit terpadu, Teknik Konservasi, Pengelolaan sumberdaya air, Ketahanan Iklim, Sistem pertanian konservasi terpadu dan Dinamika Kelompok, Penyusunan RTL.

Tahap II

Peningkatan pengetahuan bagi 40 orang penyuluh pertanian yang berasal dari Kabupaten Kupang dan Belu tentang Kebijakan Pembangunan Pertanian di NTT tentang Kegiatan Panen dan Pasca Panen Pertanian, Pengolahan hasil, Pengolahan limbah pertanian, Pengembangan Agribisnis usaha tani terpadu, Dinamika Kelompok, Penyusunan RTL.

2) **Rapat Koordinasi READSI**

Kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan program READSI Provinsi NTT dengan *stakeholders* terkait; mensosialisasikan Pelaksanaan Program READSI Tahun 2023; memperkuat koordinasi dan sinergitas dalam hal operasional yang lebih teknis.

Sasarannya adalah Pelaksana READSI kabupaten Kupang dan Belu, *Stakeholders* terkait (Dinas PUPR Prov. NTT, Dinas PMD Prov. NTT, Dinas Kesehatan Prov. NTT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. NTT, Bappelitbangda Prov. NTT), Konsultan READSI.

Hasilnya: tersosialisasinya program/kegiatan Instansi dalam mendukung program READSI di Provinsi NTT Tahun 2023 dan adanya pemahaman yang sama antara pelaksana program READSI dengan *stakeholders* dalam program READSI. Rapat dilaksanakan sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 14 Maret 2023 dan 31 Juli 2023 bertempat di ruang rapat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

3) **Magang Bagi penangkar Pemula Benih Padi**

Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap penangkar pemula kegiatan penangkaran padi; meningkatkan kompetensi penangkar dalam penangkaran benih terutama dalam proses produksi dan seleksi benih berkualitas, penyimpanan serta pemasarannya; serta menambah wawasan penangkar bahwa kegiatan penangkaran merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan.

Manfaatnya adalah terbentuknya penangkar-penangkar yang profesional di Kabupaten Belu sehingga berdampak pada tersedianya benih unggul/yang bersertifikat di Kabupaten Belu (mandiri benih).

Hasil Kegiatan:

- ✓ Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap 10 orang penangkar pemula dalam melakukan kegiatan penangkaran padi, terutama dalam proses produksi, persiapan proses pengujian mutu benih, proses penyimpanan benih bermutu, seleksi benih berkualitas, penyimpanan serta pemasarannya;
- ✓ Setelah mengikuti kegiatan, 8 orang peserta yang akan melakukan kegiatan penangkaran di MT.II telah memesan benih padi Ciherang sebanyak 220 kg.

5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Anggaran sebesar Rp.316.260.160,- realisasi sebesar Rp.185.674.398 (58,71%)

❖ ***Kegiatan Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan***

Gerakan pengendalian OPT padi 110 Ha dan bawang merah 20 Ha di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu dan Rote Ndao. OPT yang menyerang tanaman bawang merah adalah hama ulat grayak dan lalat penggorong daun dengan intensitas 10-50%, sedangkan OPT yang menyerang tanaman padi adalah kresek, penggerek batang dan WBC dengan intensitas 5-25%. Bahan pengendalian yang digunakan adalah agens hayati dan pestisida kimia untuk serangan berat.

Tujuannya untuk:

- Mengendalikan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan secara ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan produksi;
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan secara ramah lingkungan di lahan usahatannya;
- Mengamankan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari serangan OPT.

Sasarannya adalah Pengendalian populasi dan intensitas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan seluas 500 ha, sehingga tidak menimbulkan kerugian petani.

Hasilnya: terkendalinya OPT tanaman pangan dan hortikultura seluas 130 ha, menurunnya luas dan intensitas serangan OPT, meningkatnya partisipasi masyarakat dan petani dalam pengendalian OPT secara bersama-sama dalam hamparan yang luas.

Masalah dan Upaya Pemecahan masalah

Masalah:

- Terbatasnya tenaga OPT di lapangan sehingga sehingga tidak dapat melakukan pemantauan secara optimal ke semua lokasi;
- Ketergantungan petani terhadap pestisida kimia cukup tinggi.

Upaya Pemecahan masalah:

- ✓ Melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten untuk menyediakan SDM POPT di daerah;
- ✓ Memberikan bimbingan teknis tentang dampak penggunaan pestisida dan sistem PHT.

❖ *Perbanyak dan Penyebaran Jamur Trichoderma*

Perbanyak massal agensia pengendalian hayati yang efektif, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian hama dan penyakit pada tanaman pertanian dan perkebunan di NTT secara lebih efektif dan ramah lingkungan.

Hasil Perbanyak massal agensia pengendalian hayati:

- Stater Trichoderma sebanyak 35 kg yang siap digunakan, Stater Trichoderma ini dapat digunakan sebagai inokulan awal dalam pengendalian hama dan penyakit pada tanaman pertanian dan perkebunan di NTT;
- Stater Beauveria bassiana sebanyak 40 kg yang siap digunakan, digunakan sebagai inokulan awal dalam pengendalian hama dan penyakit pada tanaman pertanian dan perkebunan di NTT;
- Stater Metarhizium sebanyak 15 kg yang siap digunakan, digunakan sebagai inokulan awal dalam pengendalian hama dan penyakit pada tanaman pertanian dan perkebunan di NTT;

- Stater *Metarhizium rileyi* sebanyak 15 kg yang siap digunakan, digunakan sebagai inokulan awal dalam pengendalian hama dan penyakit pada tanaman pertanian dan perkebunan di NTT;
- Perbanyak Massal *Trichoderma* sebanyak 50 kg, digunakan dalam skala yang lebih besar untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman pertanian dan perkebunan di NTT;
- Perbanyak Massal *Beauveria bassiana* sebanyak 50 kg, digunakan dalam skala yang lebih besar untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman pertanian dan perkebunan di NTT;
- PGPR (*Plant Growth-Promoting Rhizobacteria*) sebanyak 100 liter yang siap digunakan, digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tanaman pertanian dan perkebunan di NTT.

Dengan menerapkan pengendalian hama dan penyakit menggunakan agen pengendali hayati dan PGPR, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida kimia, meningkatkan keberlanjutan pertanian, serta menjaga keseimbangan ekosistem.

✓ **Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Tabel 3.11

Target dan Realisasi PAD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023

Kelompok/Jenis/Obyek/Pendapatan		Target Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase
PENDAPATAN ASLI DAERAH		3,100,000,000	1,739,422,917	56.11
Retribusi Jasa Usaha		3,100,000,000	1,739,422,917	56.11
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		640,000,000	655,808,817	102.47
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		60,000,000	46,500,000	77.5
1	KANTOR DINAS	60,000,000	46,500,000	77.5
	- Sewa Rumah Dinas	43,500,000	30,000,000	68.97
	- Sewa Gerai Pangan /Kantin	16,500,000	16,500,000	100
Retribusi Pemakaian Laboratorium		135,000,000	118,184,817	87.54
3	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih	75,000,000	56,228,817	74.97
4	UPTD Proteksi TPH dan Perkebunan	50,000,000	55,250,000	110.5
5	UPTD Perbenihan Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	10,000,000	6,706,000	67.06
Retribusi Pemakaian Alat		445,000,000	491,124,000	110.36
Retribusi Pemakaian Alat Mesin Pertanian		445,000,000	491,124,000	110.36
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		112,000,000	94,880,000	84.71
UPT Perbenihan Kebun Dinas dan Lab. Hayati		112,000,000	94,880,000	84.71
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		2,348,000,000	988,734,100	42.11
Bibit atau Benih Tanaman		2,348,000,000	988,734,100	42.11
UPTD Perbenihan TPH		2,154,873,600	820,371,000	38.07
Penjualan Hasil Kebun di Balai Benih Tanaman Pangan		939,467,500	322,590,000	34.34
Penjualan Hasil Kebun di BBH Tanaman Hortikultura		644,662,500	321,250,000	49.83
Lain-lain Penerimaan		570,743,600	176,531,000	30.93
UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Lab. Hyt Perkebunan		193,126,400	168,363,100	87.18
Penjualan Hasil Kebun Dinas		193,126,400	168,363,100	87.18
Lain-Lain Pejualan Hasil Produksi Kebun Dinas		62,800,000	61,200,000	97.45

- Retribusi Penyewaan Tanah dan bangunan target Rp.60.000.000,- realisasi Rp.46.500.000,-(77,50%) di rinci sebagai berikut:
 - Sewa Rumah Dinas: Target sebesar Rp.43.500.000,- realisasi sebesar Rp.30.000.000,-(68,97%);
 - Gerai Pangan Lokal “Nona Sari Bahaenol” (No Nasi Satu Hari Bahagia Non Kolesterol) target sebesar Rp.16.500.000,- realisasi sebesar Rp.16.500.000,- (100%).
- Retribusi Pemakaian Laboratorium target Rp.135.000.000,- realisasi Rp.118.184.817,-(87,54%)
 - a) UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura target Rp.112.000.000,- realisasi Rp.118.184.817,- (87,54%);

- b) UPTD Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi NTT dari target PAD sebesar Rp.50.000.000,- realisasi sampai dengan 29 Desember 2023 sebesar Rp.55.250.000,-(110,50%);
- c) UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan, target sebesar Rp.10.000.000,- realisasi Rp.6.706.000,-(67,06%).
- Retribusi Pemakaian Alat target Rp.445.000.000,- realisasi Rp.491.124.000,- (110,36%)
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa target Rp.112.000.000,- realisasi Rp.94.880.000,- (84,71%)
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah target Rp.2.348.000.000,- realisasi Rp.988.734.100,- (42,11%)

3.2.2. Capaian Pelaksanaan Anggaran APBN

Data Target dan Realisasi Anggaran per Program Sumber Dana APBN tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12

Target dan Realisasi Anggaran Per Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Sumber Dana APBN, Sesuai PK Kepala Dinas Tahun 2023

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Target		Realisasi	
			Fisik (%)	Keu (%)	(Rp)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6	7
APBN						
1	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (DK Satker Tanaman Pangan)	3,875,123,000	100.00	96.00	3,846,645,250	99.27
2	Dukungan Manajemen (DK Satker Tanaman Pangan)	60,200,000	100.00	96.00	60,200,000	100.00
3	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP Satker Tanaman Pangan)	2,086,240,000	100.00	96.00	2,070,547,700	99.25
4	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP Satker Tanaman Pangan)	14,972,750,000	100.00	96.00	12,915,510,200	86.26
5	Dukungan Manajemen (TP Satker Tanaman Pangan)	1,392,107,000	100.00	96.00	1,387,743,200	99.69
6	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP Satker Hortikultura)	2,086,240,000	100.00	96.00	2,070,547,700	99.25
7	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP Satker Hortikultura)	3,250,550,000	100.00	96.00	3,246,676,860	99.88
8	Dukungan Manajemen (TP Satker Hortikultura)	250,000,000	100.00	96.00	249,951,420	99.98
9	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (DK Satker Hortikultura)	126,192,000	100.00	96.00	126,120,592	99.94
10	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (DK Satker Hortikultura)	2,870,315,000	100.00	96.00	2,613,541,966	91.05
11	Dukungan Manajemen (DK Satker Hortikultura)	1,274,000,000	100.00	96.00	1,273,559,140	99.97
12	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (DK Satker Perkebunan)	198,400,000	100.00	96.00	195,750,000	98.66
13	Dukungan Manajemen (DK Satker Perkebunan)	396,310,000	100.00	96.00	396,054,100	99.94
14	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP Satker Perkebunan)	1,608,584,000	100.00	96.00	1,551,098,380	96.43
15	Dukungan Manajemen (TP Satker Perkebunan)	225,191,000	100.00	96.00	224,907,900	99.87
16	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	8,166,633,000	100.00	96.00	4,605,734,350	56.40
17	Dukungan Manajemen (TP Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	1,269,930,000	100.00	96.00	1,262,444,650	99.41
18	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (DK Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	566,800,000	100.00	96.00	566,211,650	99.90
19	Dukungan Manajemen (DK Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	340,000,000	100.00	96.00	339,550,650.00	99.87
20	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	14,024,934,000	100.00	96.00	13,268,242,200	94.60
21	Ketersediaan, akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (DK Satker Ketahanan Pangan)	3,437,554,000	100.00	96.00	3,193,120,656	92.89
22	Dukungan Manajemen (DK Satker Ketahanan Pangan)	110,000,000	100.00	96.00	106,892,333	97.17
Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan		62,588,053,000			55,571,050,897	

Berdasarkan Tabel diatas Pagu Anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.62.588.053.000.- realisasi sebesar Rp.55.571.050.897,-

Data Realisasi Anggaran APBN per Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

a) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

▪ **Satker 249099 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT**

Tabel 3.13

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249099 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik
			(Rp)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6
Satker 249099		3,935,323,000	3,906,845,250	99.28	
018.03	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3,875,123,000	3,846,645,250	99.27	
4579	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	2,122,733,000	2,102,350,150	99.04	100.00
4580	Pengelolaan Perlindungan Tanaman	1,752,390,000	1,744,295,100	99.54	100.00
018.03.WA	Program Dukungan Manajemen	60,200,000	60,200,000	100.00	
1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	60,200,000	60,200,000	100.00	100.00

Berdasarkan tabel diatas, Pagu Anggaran Satker 249099 sebesar Rp.3.935.323.000,- realisasi sebesar Rp.3.906.845.250,-(99,28%)

Realisasi Program/Kegiatan Satker 249099:

I. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Anggaran sebesar

Rp.2.122.733.000,- realisasi sebesar Rp.2.102.350.150,-(99,04%). Sub Keegiatannya:

a. Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Padi

1) Perbanyak Benih Dasar Padi (1 Ha)

Tujuannya melakukan produksi Benih Dasar Padi (BD) sebagai benih sumber untuk perbanyak Benih Pokok Padi selanjutnya (BD-BP). Perbanyak ini dilakukan di BBI Noelbaki pada musim tanam asep 2023 dengan menggunakan varietas Ciharang kelas BS seluas 1 Ha. Produksi benih padi kelas BD yang dihasilkan sebanyak 3 ton dari target produksi 2.5 ton. Semua benih kelas BD yang dihasilkan telah disertifikasi serta berlabel dan siap untuk disalurkan.

2) Perbanyak Benih Pokok Padi (7 Ha)

Tujuannya melakukan produksi Benih Pokok (BP) sebagai benih sumber untuk perbanyak Benih Pokok Padi selanjutnya. Perbanyak ini dilakukan di BBI Noelbaki pada musim tanam asep 2023 dengan menggunakan varietas ciherang kelas BD seluas 2 Ha. Produksi benih padi kelas BD yang dihasilkan sebanyak 6 ton dari target produksi 5 ton. Semua benih kelas BP yang dihasilkan dalam proses uji lab dan proses sertifikasi. Perbanyak sebanyak 5 Ha dilakukan pada musim tanam okmar 2023/2024 yang berlokasi di BBI Noelbaki sebanyak 2 Ha dengan menggunakan varietas ciherang kelas BD dan BBU Lembor seluas 3 Ha dengan menggunakan varietas Cakra Buana kelas BD. Untuk 5 Ha ini di kedua lokasi dalam pertanaman.

3) Perbanyak Benih Dasar Sorgum (2 Ha)

Tujuannya menghasilkan Benih Dasar Sorgum. Kegiatan perbanyak benih sorgum dialokasikan 2 Ha dengan target produksi 1 ton. Kegiatan sudah dilakukan penanaman dan produksi yang didapat sebanyak 1 ton dan sementara dilakukan uji laboratorium.

b. Kegiatan Fasilitasi Perbanyak Benih Dasar Jagung**1) Perbanyak Benih dasar Jagung (BS-BD 1 Ha)**

Tujuannya menghasilkan Benih Dasar Jagung. Kegiatan perbanyak benih jagung kelas BD dialokasikan 1 Ha dengan target produksi 1 ton. Kegiatan dilakukan pada musim tanam Okmar 2023/2024 dan kondisi sekarang dalam pertanaman.

2) Perbanyak Benih Pokok Jagung (16 Ha)

Tujuannya menghasilkan Benih Pokok Jagung. Kegiatan perbanyak benih jagung kelas BP dialokasikan 16 Ha dengan target produksi 16 ton. Kegiatan ini dilaksanakan pada BBI Tarus, Kebun Palawija Lembor, dan BBI Tarus Blok Manulai. Kegiatan dilakukan pada musim tanam Asep 2023 dan produksi yang dihasilkan 19,740 ton.

c. Fasilitasi Perbanyak Benih Dasar Kedelai (BD-BP 5 Ha)**1) Perbanyak Benih Sumber Kedelai**

Tujuannya menghasilkan Benih Benih Pokok Kedelai. kegiatan perbanyak benih kedelai kelas BP dialokasikan 5 Ha dengan target produksi 4 ton. Kegiatan ini

dilaksanakan di kabupaten Manggarai Barat pada musim tanam Asep 2023 dengan produksi yang dihasilkan 1,450 ton benih berlabel siap salur dan sudah tersalur sebanyak 800 Kg ke Kabupaten Sumba Timur.

d. **Kegiatan Fasilitasi Perbanyak Benih Pokok Kacang Hijau**

- 1) **Perbanyak Benih Pokok Kacang Hijau**, Tujuannya menghasilkan Benih Dasar dan Benih Pokok Kacang Hijau. Pada tahun 2023 kegiatan Perbanyak Benih Kacang Hijau Kelas BP dialokasikan 3 Ha dengan target produksi 2,4 ton dilaksanakan di Kabupaten Malaka. Kegiatan dilakukan pada Musim Tanam Asep 2023 dengan produksi yang dihasilkan 2,3 ton benih berlabel siap salur.

II. Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan anggaran sebesar Rp.60.200.000,- realisasi sebesar Rp.60.200.000,-(100%) digunakan untuk kegiatan operasional satker.

▪ **Satker 249158 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT**

Tabel 3.14

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249158 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik
			(Rp)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6
Satker 249158		18,451,097,000	16,373,701,100	88.74	
018.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2,086,240,000	2,070,547,700	99.25	
5885	Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	2,086,240,000	2,070,547,700	99.25	100.00
018.03.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	14,972,750,000	12,915,410,200	86.26	
1761	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	150,000,000	145,426,700	96.95	100.00
1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	8,687,500,000	8,331,800,700	95.91	100.00
4579	Pengelolaan Sistem Perbenihan	6,135,250,000	4,438,182,800	72.34	75.50
018.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1,392,107,000	1,387,743,200	99.69	
1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	1,392,107,000	1,387,743,200	99.69	100.00

Berdasarkan tabel diatas, Pagu anggaran Satker 249158 sebesar Rp.18.451.097.000.- realisasi sebesar Rp.16.373.701.100,-(88,74%). Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan anggaran

sebesar Rp.6.135.250.000,- realisasi Rp.4.438.182.800,-(72,34%) dikarenakan adanya keterbatasan benih dalam daerah yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan benih padi.

Realisasi Program/Kegiatan Satrker 249158:

I. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Anggaran sebesar Rp.2.086.240.000,- realisasi sebesar Rp.2.070.547.700,- (99,25%) dengan Sub Kegiatan:

a. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan

1) Pengawasan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan (Provinsi)

Tujuannya untuk mendapatkan kelompok tani yang siap untuk menerima bantuan peralatan Pascapanen sesuai ketentuan yang berlaku. Manfaatnya Bantuan sarana Pascapanen Hasil Tanaman Pangan dapat dimanfaatkan secara baik.

2) Pembinaan dan Pengawasan Sarana Pengolahan Tanaman Pangan, meliputi:

Verifikasi CPCL dan pengawasan bantuan sarana Pengolahan tanaman pangan, dan Honor Tim Teknis. Tujuannya untuk mendapatkan kelompok tani yang siap untuk menerima bantuan peralatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sesuai ketentuan yang disyaratkan. Manfaatnya bantuan sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dapat dimanfaatkan secara baik.

3) Evaluasi Fasilitas Sarana Pascapanen Terhadap Kontribusi Penyelamatan Hasil

Tujuannya mendapatkan nilai kehilangan hasil panen secara kuantitatif pada proses panen padi secara manual dan mekanis.

Hasilnya: mendapatkan data kehilangan hasil panen padi secara manual di kabupaten Kupang dan TTU, dan secara mekanik menggunakan Combine Harvester di kota kupang, dengan manfaat sebagai acuan bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan dalam melakukan proses panen padi sehingga berdampak pada peningkatan produksi dan produktivitas padi bagi petani/kelompok tani.

4) Pengawasan Sertifikasi Produk Tanaman Pangan, meliputi: Rapat/Pertemuan

Apresiasi dan Sosialisasi Sertifikasi Organik, Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Mutu dan Survailen Sertifikat Organik Komoditi Sorgum.

- Pertemuan Apresiasi dan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Kabupaten Sumba Barat dan Manggarai Timur;

- Survailen Sertifikasi Organik Produk Tanaman Pangan (Sorgum) di Kabupaten Flores Timur dan Manggarai Timur;
- Pertemuan Apresiasi dan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Sertifikasi Organik di Kabupaten Sumba Barat dan Manggarai Timur;
- Survailen Sertifikasi Organik Produk Tanaman Pangan (Sorgum) di Kabupaten Flores Timur dan Manggarai Timur.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah:

- Petani yang akan melakukan sertifikasi organik padi gogo masih melakukan pengolahan lahan/pembersihan rumput menggunakan Herbisida.
- Petani/kelompok Tani kurang konsisten dalam menerapkan pertanian organik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sehingga banyak perbaikan yang harus dilakukan.

Pemecahan Masalah:

- ✓ Memberikan pemahaman bahwa sesuai regulasi yang berlaku untuk sertifikasi organik tidak diperbolehkan menggunakan herbisida non organik;
- ✓ Melakukan perbaikan-perbaikan dan penerapan pertanian organik di lapangan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

- 5) **Uji Mutu dan Keamanan Pangan Tanaman Pangan**, meliputi: pengambilan sampel beras, jagung dan sorgum, dan dikirim ke laboratorium (Angler-Surabaya) untuk dilakukan pengujian antitoksin dan pestisida.

Tujuannya untuk:

- ✓ Meningkatkan mutu dan keamanan pangan produk tanaman pangan;
- ✓ Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan.

Sasarannya adalah produk beras, Jagung dan Sorgum yang dihasilkan oleh kelompok tani, untuk produk beras 8 sampel uji, produk jagung 9 sampel uji dan Sorgum 3 sampel Uji yang diambil di 6 Kabupaten yaitu Kab. Kupang, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sikka, Flores Timur, Lembata, TTU dan Malaka.

- 6) **Registrasi Kebun/Lahan Usaha Tanaman Pangan**,

Tujuannya:

- ✓ Menyiapkan Sistem Budidaya Tanaman Pangan yang baik dalam rangka tercapainya penerapan system jaminan mutu dan keamanan pangan;

- ✓ Mempermudah proses penelusuran terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan tanaman pangan;
- ✓ Mendorong percepatan akses pasar produk tanaman pangan;
- ✓ Meningkatkan mutu dan keamanan pada produk tanaman pangan sehingga berdaya saing.

7) Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan PIP (Provinsi)

Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang peluang usaha ekspor, substitusi impor dan pengembangan usaha tanaman pangan (kedelai); meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam pengembangan usaha tanaman pangan (kedelai); merumuskan strategi dan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan peluang usaha ekspor, substitusi impor dan pengembangan usaha tanaman pangan (Kedelai).

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah:

- Petugas lalai untuk melaporkan secara rutin harga ditingkat produsen dan Stok;
- Petugas merangkap banyak pekerjaan Dinas sehingga tidak fokus dalam kegiatan pengambilan data harga harian komoditi pangan;
- Lokasi jangkauan yang jauh, sehingga sedikit data yang dapat dikumpulkan dan dilaporkan;
- Biaya transportasi yang semakin kecil, sementara data yang dikumpulkan meliputi beberapa lokasi kecamatan dengan jangkauan yang sangat jauh serta pengambilan data harus terdokumentasi secara *Open Camera*.

Pemecahan Masalah:

- ✓ Meningkatkan koordinasi secara intens dan terpadu dengan Dinas Pertanian Kabupaten sebagai Pembina Kabupaten dan petugas PIP;
- ✓ Membuat komitmen bersama antara petugas dan dinas sehingga intens dalam menyampaikan laporan harga dan stok secara rutin dan berkualitas melalui link dan group;
- ✓ Melakukan pembinaan dan pengawalan secara berjenjang untuk meningkatkan kualitas pelaporan PIP terhadap harga dan stok;
- ✓ Melakukan koordinasi dengan unit-unit penggilingan padi di 6 wilayah sentra dan kota kupang untuk tetap melaporkan stok beras dan padi.

b. Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan

- 1) Pelayanan Petugas Informasi Pasar Tanaman Pangan meliputi pengambilan data harga, dan pembayaran honor bagi petugas informasi pasar di 6 kabupaten, yaitu: Kab. Kupang, TTS, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya. Tujuan: Melakukan pengambilan data Harga Komoditi Tanaman Pangan dan Stok yang ada di tingkat produsen. Sasarannya: Petani penghasil komoditi tanaman pangan yang siap untuk dijual. Dampaknya Harga di pasar khususnya komoditi tanaman pangan dapat dikendalikan (stabil).

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah: Dalam pelaksanaan tugas PIP di kabupaten sentra belum maksimal dimana pengiriman laporan informasi harga pasar melalui aplikasi "HARGA TANI" belum tepat waktu (masih ada tanggal-tanggal yang bolong), beberapa petugas kabupaten belum mengirimkan data analisa usaha tani komoditi tanaman pangan.

Pemecahan Masalah: Untuk kelancaran pengiriman laporan perkembangan harga pasar dan laporan analisa usaha tani komoditi tanaman pangan maka petugas pelayanan informasi pasar terus dilakukan pembinaan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangan masing-masing.

- 2) Koordinasi Peluang Usaha Ekspor, Substitusi Impor dan Pengembangan Usaha Produk Tanaman Pangan

Tujuannya:

- ✓ Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang peluang usaha ekspor, substitusi impor dan pengembangan usaha tanaman pangan (kedelai);
- ✓ Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam pengembangan usaha tanaman pangan (kedelai);
- ✓ Merumuskan strategi dan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan peluang usaha ekspor, substitusi impor dan pengembangan usaha tanaman pangan (Kedelai).

c. Sertifikasi Produk

Tujuannya untuk melakukan pengujian sampel beras, jagung dan Sorgum di Laboratorium.

Sasarannya:

- ✓ Kelompok Tani penerima bantuan kegiatan Sertifikasi Organik tahun 2023 yaitu Kelompok Tani Maroda Ate di Kabupaten Sumba Timur dan Kelompok Tani Demar di Kabupaten Manggarai Timur;
- ✓ Kelompok Tani Sorgum penerima bantuan kegiatan Sertifikasi Organik Tahun 2022 yaitu kelompok tani Sorgum Likotuden Herin Lela di Kabupaten Flores Timur dan Kelompok Tani Ca Nai di Kabupaten Manggarai Timur.

Manfaatnya: sebagai acuan bagi petani dalam menentukan harga jual produk organiknya. Dengan adanya Sertifikat Organik dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual khusus produk beras padi gogo dan sorgum.

d. Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

Tujuannya:

- ✓ Penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan pascapanen tanaman pangan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil panen;
- ✓ Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil tanaman pangan adalah untuk pengolahan lanjutan dari hasil komoditi tanaman pangan sehingga dapat dipasarkan dan mendapatkan penghasilan dari hasil pengolahan yang dilakukan oleh kelompok tani yang bergerak dibidang usaha pengolahan hasil;
- ✓ Sasaran Sasaran dari penyediaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan adalah petani dan pelaku usaha pertanian.

Kegiatan ini bermanfaat dalam membantu petani melakukan kegiatan panen dan pascapanen tanaman pangan sehingga berdampak pada peningkatan produksi dan produktifitas komoditi tanaman pangan bagi petani/kelompok tani.

e. Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Kegiatan ini berupa bantuan sarana atau peralatan pengolahan hasil tanaman pangan bagi kelompok tani penerima bantuan Unit Pengolahan Hasil.

Tujuannya:

- ✓ Meningkatkan nilai tambah produk olahan sehingga mampu berdaya saing dan meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya;
- ✓ Memperbanyak aneka produk olahan.

Manfaatnya petani dapat menghasilkan aneka produk olahan dari komoditi pertanian tanaman pangan.

Masalah dan Pemecahan Masalah

Masalah :

- Pemanfaatan sarana pengolahan hasil tanaman pangan belum optimal karena tingkat pengetahuan dan keterampilan petani masih kurang;
- Tidak adanya pendampingan dan bimbingan lanjutan dari petugas Kabupaten;
- Kabupaten tidak mengalokasikan dana pelatihan dan pendampingan sehingga banyak peralatan yang tidak dimanfaatkan.

Pemecahan Masalah :

- ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan bagi kelompok penerima bantuan sarana pasca panen yang sudah diberikan secara berkelanjutan;
- ✓ Pihak kabupaten harus dapat mengalokasikan dana untuk melakukan monitoring, evaluasi dan bimbingan lanjutan;
- ✓ Melakukan pelatihan dan pendampingan secara terus menerus;
- ✓ Apabila peralatan tersebut tidak dimanfaatkan dalam kurun waktu 2 tahun maka segera di realokasi ke kelompok yang masih membutuhkan.

II. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

a. Bantuan Budidaya Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)

Anggaran sebesar Rp.7.967.500.000,- realisasi Rp.7.643.550.000,-(95,93%). Lokasi kegiatan Bantuan Budidaya Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) tersebar di 13 Kabupaten dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.15

Alokasi Kegiatan Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) di Provinsi NTT Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Bantuan Benih		Pupuk NPK (Kg)	Pupuk Hayati Cair (Ltr)
		Padi Kaya Gizi Luas (Ha)	Kebutuhan Benih (Kg)		
1.	TTS	500	12.500	50.000	1.500
2.	TTU	500	12.500	50.000	1.500
3.	Rote Ndao	350	8.750	35.000	1.050
4.	Alor	300	7.500	30.000	900
5.	Sabu Raijua	300	7.500	30.000	900
6.	Sumba Timur	400	10.000	40.000	1.200
7.	Sumba Tengah	500	12.500	50.000	1.500
8.	Sumba Barat	400	10.000	40.000	1.200
9.	Sumba Barat Daya	200	5.000	20.000	600
10.	Lembata	250	6.250	25.000	750
11.	Ngada	500	12.500	50.000	1.500
12.	Manggarai	500	12.500	50.000	1.500
13.	Manggarai Timur	300	7.500	30.000	900
Total Prov. NTT		5.000	125.000	500.000	15.000

Sasarannya pada daerah-daerah dengan angka gizi buruk (stunting) masih tinggi. Realisasi bantuan benih seluas 4.194 ha (104.850 kg atau 83,88 ha%), dengan saprodi berupa pupuk NPK non subsidi sebanyak 500.000 kg (100%) dan pupuk hayati cair sebanyak 15.000 liter (100%). Jenis bantuan yang diberikan kepada petani berupa: Benih Padi Kaya Gizi varietas Inpari Ir Nutrizinc sebanyak 25 kg/hektar; Pupuk NPK Non subsidi: 100 kg/hektar; Pupuk Hayati Cair: 3 liter/hektar.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah:

- Keterbatasan penangkaran dalam daerah menyebabkan terlambatnya penyediaan benih sebar, Benih sertifikasi lokal cukup banyak yang tidak lulus uji laboratorium;
- Benih yang didatangkan dari luar daerah masih cukup banyak yang tidak lulus uji laboratorium;
- Keterlambatan pendropingan benih menyebabkan pergeseran tanam hingga ke bulan November-Desember;

Upaya pemecahan masalah:

- ✓ Mengoptimalkan produksi benih dalam daerah dengan memberdayakan penangkar-penangkar lokal untuk memenuhi kebutuhan benih;
- ✓ Melakukan pelabelan ulang benih yang masih bias digunakan;
- ✓ Berkoordinasi dengan kabupaten pelaksana kegiatan terkait pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.

- b. **Bantuan Benih Padi Inbrida** anggaran sebesar Rp.4.125.000.000,- realisasi Rp.2.583.350.000,-(62,63%)

Target kegiatan penyaluran bantuan benih padi inbrida adalah bantuan benih padi inbrida seluas 15.000 ha (375.000 kg). Realisasi penyaluran benih seluas 8.291 ha (207.275 kg atau 55,27%).

Jenis bantuan yang diberikan kepada petani berupa benih padi inbrida sebanyak 25 kg/hektar. Lokasi kegiatan di 19 kabupaten dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.16

Alokasi Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida di Provinsi NTT Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Bantuan Padi	
		Padi Inbrida Sawah Luas (Ha)	Kebutuhan Benih (Kg)
1.	Kupang	1.000	25.000
2.	TTS	750	18.750
3.	TTU	750	18.750
4.	Belu	500	12.500
5.	Malaka	750	18.750
6.	Rote Ndao	1.000	25.000
7.	Alor	650	16.250
8.	Sabu Raijua	300	7.500
9.	Sumba Timur	1.250	31.250
10.	Sumba Barat	1.000	25.000
11.	Sumba Barat Daya	1.000	25.000
12.	Flores Timur	300	7.500
13.	Sikka	750	18.750
14.	Ende	750	18.750
15.	Nagekeo	750	18.750
16.	Ngada	750	18.750
17.	Manggarai Timur	750	18.750
18.	Manggarai	1.000	25.000
19.	Manggarai Barat	1.000	25.000
Total NTT		15.000	375.000

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan pangan yang cukup dimasyarakat. Sasarannya daerah-daerah yang memiliki areal persawahan baik irigasi maupun non irigasi yang masih dapat ditingkatkan indeks pertanamannya.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah:

- Masih cukup banyak benih sertifikasi yang tidak lulus uji laboratorium;
- Keterbatasan penangkaran dalam daerah menyebabkan terlambatnya penyediaan benih sebar untuk pengembangan;

- Keterlambatan pendropingan benih menyebabkan pergeseran tanam hingga ke bulan Desember sampai dengan Januari 2024;

Upaya pemecahan masalah:

- ✓ Mengidentifikasi lokasi-lokasi pengembangan yang penanamannya pada periode ASEP sehingga produksinya bisa berkontribusi pada tahun berjalan;
- ✓ Penyediaan benih di masing-masing Kabupaten perlu ditingkatkan dengan memberdayakan penangkar lokal sehingga ketersediaan benih sesuai dengan jadwal tanam petani dan kebutuhan dalam daerah masing-masing Kabupaten;
- ✓ Berkoordinasi dengan kabupaten pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan kegiatan.

- c. **Mandiri Benih** anggaran sebesar Rp.50.250.000,- realisasi Rp.50.250.000,- (100%). Lokasi sasaran tersebar di 3 Kabupaten yaitu: Kabupaten TTS 15 Ha, Ende 10 Ha dan Manggarai 5 Ha.

Tujuannya:

- Menghasilkan benih Padi Sawah label BP/BR untuk memenuhi kebutuhan benih bagi pengembangan Padi Sawah di NTT;
- Menumbuhkan petani penangkar benih.

Jenis bantuan yang diberikan kepada petani/penangkar berupa:

- Benih sumber/tetua berasal dari varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian atau varietas lokal;
- Benih sumber atau tetua/*parent seed* dari masing masing varietas benih yang akan ditangkarkan berasal dari Badan Litbang Pertanian atau produsen benih. Untuk tetua/*parent seed* diluar varietas Badan Litbang Pertanian tidak dibantu Pemerintah;
- Pupuk Anorganik (Urea/SP 36/KCL/NPK dll) dan Organik yang digunakan adalah pupuk bersubsidi atau non subsidi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), bersertifikat organik atau memenuhi persyaratan teknis minimal serta terjamin efektivitasnya;
- Pestisida (insektisida/fungisida/rodentisida) dan Herbisida yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan memiliki izin edar yang masih berlaku.

Dari 3 kabupaten yang mendapatkan alokasi, kabupaten TTS dan Manggarai telah menyelesaikan tahap pasca panen dan penyaluran benih, sedangkan Kabupaten Ende tidak lolos uji laboratorium sebanyak 40 ton sehingga dijual untuk konsumsi.

Hasilnya sampai tanggal 31 Desember 2023 total calon benih sebanyak 105,66 ton, benih bersertifikat sebanyak 15,98 ton.

Manfaatnya:

- Ketersediaan benih padi untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan ataupun swadaya petani;
- Adanya peningkatan produksi benih padi.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah:

- Proses sertifikasi belum dikawal dengan baik pada setiap tahapannya;
- Benih sertifikasi masih ada yang tidak lulus uji laboratorium;
- Penanganan pasca panen sampai pelabelan belum terproses dengan baik;
- Belum semua petani/kelembagaan penangkar komitmen untuk benihnya diambil dalam mendukung program pengembangan;
- Sebagian produksi benihnya belum bisa digunakan pada tahun berjalan;
- Harga beras yang naik melebihi harga benih.

Upaya Pemecahan Masalah:

- ✓ Pelaksanaan penanamannya pada bulan April - Mei sehingga hasil produksi pada bulan September-Oktober dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan benih tahun berjalan;
- ✓ Penentuan lokasi kegiatan mandiri benih harus memperhatikan ketersediaan air dilokasi kegiatan agar terhindar dari kekeringan yang akan berdampak pada menurunnya produksi;
- ✓ Proses kegiatan dilapangan sampai dengan produksi calon benih yang dihasilkan harus dikawal oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT) di setiap kabupaten sehingga tidak ada kelompok atau penangkar yang tidak tersertifikasi;
- ✓ Seleksi kelompok yang berkomitmen untuk melaksanakan dan penangkaran dan benihnya untuk mendukung pengembangan program pemerintah (APBN).

- d. **Display Varietas** anggaran sebesar Rp.120.000.000,- realisasi Rp.85.825.200,-(71,52%). Tujuannya mensosialisasikan varietas unggul baru kepada petani. Sasarannya di 3 Kabupaten: Kabupaten Kupang 10 Ha, Alor 5 Ha dan Sumba Timur 5 Ha. Jenis bantuan yang diberikan kepada petani berupa : saprodi dan HOK sebesar Rp. 6.000.000,-/ha. Realisasi tanam per 31 Desember 2023 seluas 5 ha (25%) yakni pada Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan pada Kabupaten Kupang 10 ha dan Alor 5 ha masih dalam persemaian dengan umur pertanaman 19 hari setelah tanam (HST). Realisasi tanam belum mencapai 100% dikarenakan :
- Kesulitan mencari benih sesuai persyaratan teknis terutama varietas unggul baru;
 - Keterlambatan pendropingan benih hibrida dan inbrida untuk Kabupaten Alor dan Kupang karena benih dikirim dari luar NTT sehingga proses pengirimannya membutuhkan waktu yang lama;
 - Curah hujan belum merata sehingga waktu tanam bergeser sampai ke Januari 2024.

Masalah dan Upaya Pemecahan

Masalah:

- Belum semua petani mengetahui varietas unggul baru dikarenakan lambatnya proses transfer teknologi akibat kurangnya sosialisasi tentang adanya varietas unggul baru yang telah dilepas;
- Ketersediaan dan akses benih hibrida dan varietas unggul baru terbatas;
- Pengiriman laporan dari kabupaten pelaksana tidak berjalan dengan baik.

Upaya pemecahan dari masalah:

- ✓ Terus mensosialisasikan kepada petani varietas unggul baru sehingga petani tidak lagi menanam varietas yang berulang kali secara terus menerus yang akan berpengaruh menurunnya produktivitas dan ketahanan terhadap hama dan penyakit;
- ✓ Adanya kerjasama dan pengawalan dari Pengawas Benih Tanaman (PBT), pengawas organisme pengganggu tanaman (POPT);
- ✓ Memberdayakan penangkar-penangkar yang sudah ada, sehingga ketersediaan benih untuk program/kegiatan tahun depan dapat terpenuhi/tersedia;
- ✓ Melakukan koordinasi dengan kabupaten untuk pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.

e. **Bantuan Benih Jagung Hibrida**

Anggaran sebesar Rp.1.575.000.000,- realisasi Rp.1.545.000.000,-(98,10%) Target kegiatan bantuan benih 30.209 ha (TP Provinsi 2.500 ha dan TP Pusat 27.709 ha). Sasarannya di 5 kabupaten: Kabupaten Timor Tengah Selatan 500 Ha, Malaka 500 Ha dan Manggarai 100 Ha.

Jenis bantuan yang diberikan kepada petani berupa benih jagung hibrida sebanyak 15 kg/hektar. Realisasi kegiatan bantuan benih jagung hibrida baik TP Provinsi maupun Pusat mencapai 100% yakni 629.775 kg.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan luas areal tanam jagung yang dibiayai petani secara mandiri berbasis teknologi;
- Meningkatkan Produktivitas dan produksi jagung;
- Meningkatkan pendapatan petani;
- Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
- Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat;
- Menuju pertanian terintegrasi.

Realisasi tanam jagung hibrida sumber dana APBN TP Provinsi seluas 2.500 ha per tanggal 31 Desember 2023 pada 5 Kabupaten Pelaksana TP Provinsi tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Realisasi Tanam Jagung Hibrida, Sumber Dana APBN TP Provinsi per 31 Desember 2023

No	Kabupaten	Alokasi (ha)	Jadwal tanam	Varietas	Kebutuhan benih (kg)	Realisasi salur (%)	Realisasi tanam (ha)	Realisasi panen (ha)		
								Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/ha)
1	TTS	500	Okmar	Bima Uri 20	7,500	100	315			-
2	Malaka	500	Maret	Bima 14 Batara	7,500	100	275	257		-
3	Manggarai	100	Asep	Bima Uri 20	1,500	100	100			-
4	SBD	1,000	Maret	Bima 14 Batara	15,000	100	1000	1,000	2,700	3
5	Belu	400	Okmar	Bima Uri 20	6,000	100	400			-
TOTAL		2.500			37.500		2.090	1.257	2.700	2

Realisasi tanam jagung hibrida sumber dana APBN TP Pusat seluas 27.709 ha per tanggal 31 Desember 2023 pada 12 Kabupaten Pelaksana TP Provinsi tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.18

Realisasi Tanam Jagung Hibrida, Sumber Dana APBN TP Pusat per 31 Desember 2023

No	Kabupaten	Alokasi (ha)	Jadwal tanam	Varietas	Kebutuhan benih (kg)	Realisasi salur (%)	Realisasi tanam (ha)	Realisasi panen (ha)		
								Luas (ha)	Produksi (ton)	Provititas (ton/ha)
1	Sumba Timur	1,200	Okdes	Hj 21 agritan (ar 21)	18,000	100	-	-	-	-
2	Sumba Barat Daya	5,000	Okdes	Nasa 29	75,000	100	5,000	5,000	11,110	2.2
		5,000	Okdes	Hj 21	75,000	100	5,000	5,000	12,030	2.4
3	Ngada	200	Des	Bisi bima uri	3,000	100	-	-	-	-
4	Sikka	2,000	Des	Hj 21 agritan (kana 21)	30,000	100	-	-	-	-
5	Nagekeo	500	Okdes	Bima uri 20	7,500	100	500	-	-	-
6	Lembata	2,000	Okdes	Betras 7	30,000	100	-	-	-	-
		500	Okdes	P35/ biosed/	7,500	100	500	-	-	-
7	Malaka	400	Okdes	Jh - 45	6,000	100	-	-	-	-
8	TTS	1,409	Okdes	Betras i	21,135	100	452	-	-	-
9	Kupang	2,000	Nop	Hj 21 agrtan	30,000	100	27	-	-	-
		500	Nop	Hj 21 agrtan	7,500	100	-	-	-	-
10	Sumba Tengah	4,000	Okdes	Pioner 15	60,000	100	3.461	-	-	-
11	TTU	2,500	Okt	Hj 21 ar	37,500	100	2,500	-	-	-
12	Ende	500	Des	Hj 21 ar	7,500	100	490	-	-	-
TOTAL		27,709			415,635		17,930	10,000	23,140	2.3

Masalah dan Upaya Pemecahan

Masalah:

- Lokasi CPCL (petani/kelompoktani) yang tersebar menyulitkan pendropingan benih/sarana produksi serta pendampingan/pembinaan;
- Curah hujan yang tidak menentu dan ketersediaan sumber air yang terbatas untuk usahatani jagung;
- Sarana Produksi pertanian belum dapat disiapkan penyedia tepat waktu;
- Ketersediaan benih yang masih belum memenuhi kebutuhan;
- Petani masih ada yang menanam dengan tidak memberikan pupuk dan atau dipupuk dalam jumlah yang terbatas;
- Kelas kemampuan kelompoktani pelaksanaan yang masih didominasi dengan pemula.

Upaya Pemecahan Masalah:

- ✓ Melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dan pengawalan sampai dengan tingkat lapangan;
- ✓ Melakukan koordinasi secara periodik dengan pusat dan Kabupaten dalam persiapan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan;

- ✓ Melakukan pertemuan koordinasi, teknis, monitoring perkembangan dan evaluasi secara periodik;
- ✓ Perlu dilakukan pemetaan lokasi CPCL berbasis potensi/sentra untuk mendukung pengembangan kawasan jagung.

b) Direktorat Jenderal Hortikultura

▪ **Satker 249030 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT**

Tabel 3.19

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249030 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik
			(Rp)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6
Satker 249030		4,270,507,000	4,013,221,698	93.98	
018.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	126,192,000	126,120,592	99.94	
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	126,192,000	126,120,592	99.94	100.00
018.04.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2,870,315,000	2,613,541,966	91.05	
1773	Perlindungan Hortikultura	1,015,000,000	762,872,650	75.16	76.55
4581	Perbenihan Hortikultura	1,855,315,000	1,850,669,316	99.75	100.00
018.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1,274,000,000	1,273,559,140	99.97	
1774	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	1,274,000,000	1,273,559,140	99.97	100.00

Berdasarkan tabel diatas, Alokasi Anggaran Satker 249030 sebesar Rp.4.270.507.000,- realisasi sebesar Rp.4.013.221.698,-(93,98%)

Realisasi Program/Kegiatan Satker 249030:

I. Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri

Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Anggaran sebesar Rp.126.192.000,- realisasi sebesar Rp.126.120.592,- (99,94%) dengan Sub Kegiatan:

a. Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) Hortikultura

Dilaksanakan di 2 Kelompok Tani di Kabupaten Kupang yakni: Kelompok Tani Manekat, Desa Fatukanutu Kecamatan Amabi Oefeto (Pisang) dan Kelompok Tani Kanaan Desa Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah (Jeruk)

Tujuannya adalah:

- Memberikan acuan, petunjuk dan pemahaman praktis bagi petani di lapangan berkaitan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan SL-GAP;
- Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani/pelaku usaha komoditi hortikultura dalam melaksanakan teknologi budidaya yang baik melalui penerapan GAP/SOP komoditi hortikultura;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil sesuai standard mutu.

Sasaran kegiatan adalah kelompok tani yang mendapat alokasi kegiatan Penerapan GAP Hortikultura komoditi pisang cavendish dan jeruk di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2023

Hasilnya adalah:

- Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan sikap petani/kelompok tani dalam menerapkan Good agriculture Practices (GAP) Hortikultura (Buah, Sayuran dan Tanaman Obat);
- Petani/Kelompok Tani mampu menerapkan budidaya yang baik sehingga dapat meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil hortikultura (Buah, Sayuran dan Tanaman Obat);
- Petani/kelompok tani dapat memperbaiki manajemen usahanya sehingga produk hortikultura yang dihasilkan berkualitas baik dan memenuhi standar kesehatan dan keamanan bahan makanan.

b. Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Hortikultura

Tujuannya adalah:

- Sebagai acuan bagi petugas dan pembina PIP di daerah;
- Memberi acuan dalam metode pengambilan data di lapangan;
- Menyajikan data yang up to date guna menghasilkan informasi pasar yang akurat, kontinyu, relevan dan mudah diakses;
- Mengembangkan Sistem PIP yang terintegrasi;
- Memfasilitasi akses pasar berupa pasar tani guna membantu pelaku usaha khususnya kelompok tani/gapoktan, KWT serta kelompok pengolahan skala kecil/ *home industry* dalam memasarkan hasil taninya secara langsung ke konsumen.

Sasarannya adalah Kelompok/Gapoktan yang mengusahakan hasil hortikultura dan petugas informasi pasar di 4 daerah sentra produksi hortikultura yaitu Kabupaten Sumba Barat, Belu, Manggarai dan Provinsi.

Hasilnya adalah: data dan informasi harga komoditi hortikultura kepada masyarakat secara luas yang berkualitas, akurat, *up to date*, kontinyu dan lengkap; adanya integrasi dalam sistem pelayanan.

II. Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas

❖ **Perlindungan Hortikultura** anggaran sebesar Rp.1.015.000.000,- realisasi sebesar Rp.762.872.650,- (75,16%) dengan Sub Kegiatan:

a. **Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura**, yang terdiri dari: Inventarisasi Data/Persiapan; Fasilitasi Sarana Penanganan DPI; Pendampingan dan Pengawasan. Kegiatan fasilitasi bantuan sarana prasarana penanganan DPI untuk mengatasi permasalahan kerusakan tanaman hortikultura akibat dampak perubahan iklim akibat kekeringan/banjir yang disebabkan keterbatasan ketersediaan ataupun kelebihan air untuk pertumbuhan dan pengembangan komoditas hortikultura pada kampung/kawasan hortikultura.

Bantuan Sarpras DPI ini, diharapkan adanya peningkatan luas tanam yang semula satu 1 ha, menjadi 3 s/d 4 ha sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas cabe dan bawang merah serta komoditi hortikultura lainnya seperti sayur-sayuran dan pisang yang ditanam disekitar lahan kampung/kawasan hortikultura.

Permasalahan dan Upaya pemecahan Masalah

Permasalahan:

- Adanya cuaca ekstrim/El Nino yang menyebabkan air bagi pertanaman yang bersumber dari air kali mengalami kekeringan;
- Terkendala dengan ternak yang masuk dalam lahan pertanaman sehingga meskipun air sumur masih tersedia, petani belum melakukan penanaman dikarenakan sementara menyelesaikan pembuatan dan perbaikan pagar agar ternak tidak bisa masuk merusak tanaman.

Upaya Permasalahan:

- ✓ Melakukan pergeseran waktu tanam untuk menekan kerusakan tanaman dari kekeringan, pendampingan yang kontinyu dari petugas PPL dan PPOT kepada kelompok tani sehingga pemanfaatan debit air yang terbatas dengan menggunakan pompa air dapat dioptimalkan sehingga dapat bermanfaat bagi tanaman hortikultura;

- ✓ Pemantauan secara berkala oleh petugas POPT, Rapat koordinasi yang melibatkan Kepala Desa, Camat, Tokoh Masyarakat, Bupati, OPD/Stake Holder terkait untuk membahas peraturan agar ada kekuatan hukum untuk melakukan tindakan bagi ternak lepas yang merusak tanaman.

b. Area Pengendalian OPT Hortikultura

Tujuannya adalah sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pengendalian OPT baik hama maupun penyakit tanaman hortikultura yang ramah lingkungan karena bebas residu; Meningkatkan kualitas produk tanaman hortikultura yang dibudidayakan oleh petani, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan dapat menciptakan ekosistem yang lestari dan ramah lingkungan.

Masalah: Realisasi penanaman cabai dan bawang merah belum mencapai 100 % dikarenakan air belum tersedia sebagai dampak El Nino, sehingga stok APH yang diproduksi disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Upaya Pemecahan Masalah: Volume APH yang diproduksi untuk kegiatan gerakan pengendalian OPT disesuaikan dengan luas lahan yang sudah ditanami komoditas cabai dan bawang merah, khususnya di daerah kampung horti.

Masalah:

- Masih dijumpai petani yang belum memanfaatkan keberadaan Klinik PHT dalam menjalankan system budidaya hortikultura;
- Klinik PHT belum banyak dikenal dan diketahui oleh petani;
- Masih banyak petani yang belum bisa membuat dan mengaplikasikan APH di lahan usaha taninya;
- Belum ada campur tangan pemerintah daerah dalam pengembangan klinik PHT untuk mendukung budidaya tanaman sehat.

Upaya Pemecahan Masalah:

- ✓ Perlu terus dilakukan bimbingan, pengawasan dan pembinaan klinik PHT baik oleh petugas lapangan (POPT-PHP) maupun BTPH agar keberadaan klinik PHT tetap eksis dan semakin berkembang;
- ✓ Perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan antara kelompok tani pengelola klinik PHT dengan pihak-pihak terkait agar keberadaannya semakin dikenal luas;

- ✓ Perlu pelatihan keterampilan dalam pembuatan jenis agens hayati dan pestisida nabati yang lebih banyak lagi;
- ✓ Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kegiatan pengembangan/ perbanyak agens hayati.

c. **Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu**

- 1) **Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)** sebanyak 3 unit yakni PPHT bawang merah di Kabupaten Kupang dan Belu, PPHT Cabe di Kabupaten Kupang. Masing-masing unit melibatkan 25 orang petani sebagai peserta. Kegiatan Penerapan PHT dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan penerapan/demo plot PHT dan dilaksanakan selama 1 musim tanam mulai dari persiapan lahan, penanaman sampai panen. Pelatihan dilaksanakan selama 10 kali pertemuan dengan interval 1 minggu 1 kali dan dipandu oleh Pemandu Lapangan II/POPT. Pada proses pembelajaran di lapang petani sendiri mengalami, menganalisis, mengambil keputusan dan menerapkan PHT. Petani juga diberikan bimbingan teknis/praktek pembuatan pupuk trichokompos, PGPR, pestisida nabati, MOL dan pembuatan perangkap hama.

Masalah dan Upaya pemecahan masalah:

Masalah: Tingkat pendidikan petani yang rendah rata-rata SD, SMP berpengaruh pada daya serap terhadap materi dan pelaksanaan praktek lapangan, Kebiasaan/ketergantungan petani menggunakan pestisida kimia dalam pengendalian OPT.

Upaya pemecahan masalah: pendampingan lanjutan dari petugas/pemandu/pendamping.

- 2) **Fasilitasi Pengendalian OPT Hortikultura**

Gerakan Pengendalian OPT (Bawang Merah, Cabai, Jeruk, Jahe dan Mangga), tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku perlindungan dalam pengembangan penerapan teknologi pengendalian OPT dengan sarana pengendalian yang ramah lingkungan serta mengamankan produksi tanaman hortikultura dari serangan OPT. Sasarannya adalah kelompok tani penerima bantuan Kampung/kawasan hortikultura/sentra produksi.

Masalah dan Upaya Pemecahan masalah:**Masalah:**

- Terbatasnya tenaga OPT di lapangan sehingga sehingga tidak dapat melakukan pemantauan secara optimal ke semua lokasi;
- Rendahnya pemahaman petani tentang OPT dan sistim PHT

Upaya Pemecahan masalah:

- ✓ Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten untuk menyediakan SDM POPT di daerah;
- ✓ Memberikan bimbingan teknis tentang dampak penggunaan pestisida dan sistim PHT.

❖ Perbenihan Hortikultura anggaran sebesar Rp.1.855.315.000,- realisasi sebesar Rp.1.850.669.316,- (99,75%) dengan Sub Kegiatan:

a. Perbanyak benih sumber batang Mangga

Tujuannya menyediakan benih tanaman mangga untuk kegiatan kampung buah dengan sasaran: Kelompok tani penerima bantuan Kampung Buah. Kegiatan dilaksanakan di BBH Nonbes, BBH Mbay, BBH Lambanapu, BBH Lembor dan UPTD Perbenihan.

b. Perbanyak benih sumber batang Jeruk

Tujuannya Menyediakan benih tanaman jeruk untuk kegiatan Kampung Buah.

c. Perbanyak benih sumber batang durian

Tujuannya menyediakan benih tanaman durian untuk kegiatan Kampung Buah.

Sasarannya adalah Kelompok tani penerima bantuan kampung buah. Kegiatan dilaksanakan di BBH Detubapa dan BBH Lembor.

Hasilnya adalah Kegiatan Perbanyak Benih 45.000 batang sedangkan 4.500 batang untuk mengatasi angka kematian benih.

Dampaknya:

1. Meningkatnya penggunaan benih/bibit bermutu dikalangan masyarakat,petani, penangkar dan kelompok tani hortikultura;
2. Balai Benih Hortikultura lebih dikenal di masyarakat;
3. Produksi benih/bibit hortikultura lebih optimal;
4. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil penjualan benih/bibit hortikultura;

5. Meningkatnya produk hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan di daerah sentra pengembangan pertanian.

▪ **Satker 249159 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT**

Tabel 3.20

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249159 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik
			(Rp)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6
Satker 249159		4,889,494,000	4,883,340,780	99.87	
018.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1,388,944,000	1,386,712,500	99.84	
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1,388,944,000	1,386,712,500	99.84	100.00
018.04.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3,250,550,000	3,246,676,860	99.88	
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1,678,600,000	1,675,630,760	99.82	76.55
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	1,571,950,000	1,571,046,100	99.94	100.00
018.03.WA	Program Dukungan Manajemen	250,000,000	249,951,420	99.98	
1774	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	250,000,000	249,951,420	99.98	100.00

Berdasarkan tabel diatas, Alokasi Anggaran Satker 249159 sebesar Rp.4.889.494.000,-Realisasi Anggaran sebesar Rp.4.883.340.780,- (99,87%)

Realisasi Program/Kegiatan Satker 249159:

II. Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas

1. **Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat** anggaran sebesar Rp.1.678.600.000,- realisasi sebesar Rp.1.675.630.760,- (99,82%) dengan Sub Kegiatan:

Sarana Pengembangan Kawasan

a. Kawasan Bawang Merah

Anggaran sebesar Rp.138.400.000,- realisasi Rp.138.187.760,-(99,85%) Target fisik kegiatan Pengembangan kawasan Bawang Merah adalah: Tersedianya Benih dan sarana produksi meliputi Pupuk NPK, Pupuk Organik, Pupuk Hayati Cair; Pengembangan Kawasan Bawang Merah dengan Luas/jumlah per kabupaten Kabupaten Belu 10 Ha, Manggarai Barat 10 Ha. Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dimana Sarana Produksi yang ditargetkan sudah disalurkan ke Kelompok Tani. Tujuannya untuk membantu Petani/Kelompok Tani dalam rangka Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan meningkatkan Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Bawang Merah pada kawasan pengembangan Bawang Merah.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah**Masalah :**

- Realisasi luas tanam di Kabupaten Belu 2,1 ha dari target 10 ha karena adanya perbaikan jaringan irigasi yang baru selesai pada bulan Oktober 2023;
- Keterlambatan penyaluran benih oleh penyedia menyebabkan pergeseran waktu tanam sehingga produksi bawang merah tidak maksimal;
- Kabupaten pelaksana Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah belum menyampaikan laporan kegiatan secara rutin ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Pemecahan Masalah:

- ✓ Kelompok tani akan melakukan penanaman setelah selesai perbaikan jaringan irigasi;
- ✓ Percepatan proses pengadaan agar benih dan sarana produksi tersedia tepat waktu sesuai jadwal tanam petani;
- ✓ Koordinasi dengan Kabupaten pelaksana kegiatan agar rutin menyampaikan laporan kegiatan pengembangan kawasan bawang merah.

b. Kawasan Aneka Cabai

Anggaran sebesar Rp.1.401.200.000,- realisasi Rp.1.398.980.200,-(99,84%) Sarana Produksi yang ditargetkan sudah disalurkan ke Kelompok Tani dengan Luas Tanam 120 Ha yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Malaka, Flores Timur, Manggarai Barat, Nagekeo, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah masing-masing 10 Ha.

Tujuannya untuk meningkatkan luas areal tanam, luas panen serta meningkatkan produksi dan produktivitas aneka cabai di kawasan pengembangan aneka cabai.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah**Masalah:**

- Terjadi revisi anggaran pada kegiatan pengembangan kawasan cabai sehingga terjadi keterlambatan proses pengadaan benih dan sarana produksi yang berdampak pada pergeseran jadwal tanam;
- Areal penanaman masih bersifat spot-spot belum menerapkan kampung Cabai, petani belum menerapkan budidaya tanaman cabai dengan baik (GAP);

- Kondisi kekeringan/terbatasnya ketersediaan air pada lokasi penanaman sehingga target luas tanam tidak tercapai;
- Pengujian pupuk organik (pupuk organik remah dan pupuk organik cair) membutuhkan waktu yang lama sehingga terjadi keterlambatan proses penyaluran sarana produksi ke kelompok tani;
- Kabupaten pelaksana Kegiatan Pengembangan Kawasan Aneka Cabai belum menyampaikan laporan kegiatan secara rutin ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Pemecahan Masalah:

- ✓ Memantapkan proses perencanaan untuk menghindari terjadinya revisi anggaran ketika kegiatan akan dilaksanakan, melakukan verifikasi dengan baik terhadap kelompok tani yang diusulkan dengan memperhatikan persyaratan kampung sayuran dan tanaman obat untuk kawasan aneka cabai;
- ✓ Sosialisasi terhadap kelompok tani pelaksana terkait budidaya tanaman cabai yang baik (GAP), kelompok tani akan tetap melakukan penanaman ketika kondisi ketersediaan air mencukupi;
- ✓ Percepatan proses pengujian pupuk organik oleh penyedia dimana pengambilan sampel pupuk harus segera dilakukan setelah penandatanganan kontrak kerja mengingat pengujian dilakukan diluar Provinsi NTT;
- ✓ Berkoordinasi dengan Kabupaten pelaksana kegiatan agar rutin menyampaikan laporan kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai.

c. Kawasan Jahe

Anggaran sebesar Rp.139.000.000,- realisasi sebesar Rp.138.462.800,- (99,61%) Target fisik kegiatan Pengembangan kawasan Jahe adalah bantuan 20.000 Kg benih jahe dan sarana produksi meliputi 4.000 Kg Pupuk NPK Non Subsidi dan 14.000 Kg Pupuk Organik Remah. Realisasi fisik kegiatan Pengembangan Kawasan Jahe mencapai 100 % dimana Sarana Produksi yang ditargetkan sudah disalurkan ke Kelompok Tani dan Luas Tanam Jahe seluas 20 Ha. Penanaman dilakukan pada bulan Oktober-November 2023 sehingga belum ada data produksi. Perkiraan panen pada bulan April- Mei 2024. Tujuannya untuk meningkatkan luas areal tanam, luas panen serta meningkatkan Produktivitas dan Produksi Jahe di kawasan Sentra Jahe.

Sasarannya adalah Kelompok Tani Pengembang Jahe di Kabupaten Manggarai 10 ha, Sumba Barat Daya 5 ha dan Ende 5 Ha.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah:

- Terjadi revisi anggaran pada kegiatan pengembangan kawasan jahe sehingga terjadi keterlambatan proses pengadaan benih dan sarana produksi;
- Pengujian pupuk organik membutuhkan waktu yang lama;
- Kabupaten pelaksana Kegiatan Pengembangan Kawasan Jahe belum menyampaikan laporan kegiatan secara rutin ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Pemecahan Masalah:

- ✓ Memantapkan proses perencanaan untuk menghindari terjadinya revisi anggaran ketika kegiatan akan dilaksanakan;
- ✓ Percepatan proses pengujian pupuk organik oleh penyedia dimana pengambilan sampel pupuk harus segera dilakukan setelah pndatanganannya kontrak kerja mengingat pengujian dilakukan diluar Provinsi NTT;
- ✓ Berkoordinasi dengan Kabupaten pelaksana kegiatan agar rutin menyampaikan laporan kegiatan pengembangan kawasan jahe.

2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura anggaran sebesar Rp.1.571.950.000,- realisasi sebesar Rp.1.571.046.100,- (99,94%)

a. Kawasan Jeruk

Anggaran sebesar Rp.453.950.000,- realisasi sebesar Rp.453.930.000,-(99,98%) Target Bantuan Pemerintah meliputi anakan Jeruk sebanyak 15.000 anakan, Pupuk NPK Non Subsidi 15.000 Kg, dan Pupuk Organik 42.500 Kg, dengan luas lahan 50 Ha. Realisasi fisik kegiatan Pengembangan Kawasan Jeruk dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Anakan Jeruk merupakan hasil perbanyakan benih oleh UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan alokasi anggaran Direktorat Perbenihan Hortikultura Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 untuk memenuhi kebutuhan Kawasan Tahun 2023;
- Sarana produksi untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Jeruk di Kabupaten Kupang telah disalurkan seluruhnya (100%) ke kelompok tani.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah**Masalah:**

- Pengujian pupuk organik membutuhkan waktu yang lama, karena dilakukan di luar NTT sehingga terjadi keterlambatan proses penyaluran sarana produksi ke kelompok tani;
- Kabupaten pelaksana Kegiatan Pengembangan Kawasan Jeruk belum menyampaikan laporan kegiatan secara rutin ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Pemecahan Masalah:

- ✓ Percepatan proses pengujian pupuk organik oleh penyedia dimana pengambilan sampel pupuk harus segera dilakukan setelah penandatanganan kontrak kerja mengingat pengujian dilakukan diluar Provinsi NTT, dan juga terhadap Lembaga pengujian pupuk yang kompeten di NTT;
- ✓ Koordinasi dengan Kabupaten pelaksana kegiatan agar rutin menyampaikan laporan kegiatan pengembangan Kawasan Jeruk;
- ✓ Penyediaan benih dan sarana produksi tepat waktu sesuai jadwal tanam petani.

b. Kawasan Durian

Anggaran sebesar Rp.258.000.000,- realisasi sebesar Rp.257.748.800,- (99,90%)
Target fisik kegiatan Pengembangan Kawasan Durian adalah: Bantuan Pemerintah meliputi Pupuk NPK Non Subsidi sebanyak 6.000 kg dan Pupuk Organik sebanyak 30.000 kg dengan luas lahan 20 Ha di Kabupaten Manggarai dan Sumba Barat Daya 20 Ha. Realisasi fisik kegiatan Pengembangan Kawasan Durian dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Anakan Durian merupakan hasil perbanyakan benih oleh UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan alokasi anggaran Direktorat Perbenihan Hortikultura Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 untuk memenuhi kebutuhan Kawasan Tahun 2023;
- Sarana produksi untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Durian di Kabupaten Manggarai dan Sumba Barat Daya 100%.

Tujuannya untuk meningkatkan luas areal tanam, luas panen serta meningkatkan Produksi dan Produktivitas pada lokasi Kawasan Durian. Sasarannya pada 11

Kelompok Tani di Kabupaten Sumba Barat Daya 2 kelompok dan Manggarai 9 kelompok.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah:

- Pengujian pupuk organik membutuhkan waktu yang lama sehingga terjadi keterlambatan proses penyaluran sarana produksi ke kelompok tani;
- Kabupaten pelaksana Kegiatan Pengembangan Kawasan Durian belum menyampaikan laporan kegiatan secara rutin ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Pemecahan Masalah:

- ✓ Percepatan proses pengujian pupuk organik oleh penyedia dimana pengambilan sampel pupuk harus segera dilakukan setelah penandatanganan kontrak kerja mengingat pengujian dilakukan diluar Provinsi NTT;
- ✓ Berkoordinasi dengan Kabupaten pelaksana kegiatan agar rutin menyampaikan laporan kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai.

c. Kawasan Mangga

Anggaran sebesar Rp.325.000.000,- realisasi sebesar Rp.324.574.400,-(99,87%). Sasarannya pada 8 Kelompok Tani di 3 kabupaten yakni Kabupaten Manggarai 4 kelompok, Lembata 2 kelompok dan Flores Timur 2 kelompok.

Hasilnya: Penyaluran Bantuan meliputi Pupuk NPK Non Subsidi dan Pupuk Organik, dengan luas lahan 50 Ha di Kabupaten Manggarai 20 ha, Flores Timur 15 ha dan Lembata 15 ha dengan rincian sebagai berikut:

- Anakan Mangga merupakan hasil perbanyakan benih oleh UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan alokasi anggaran Direktorat Perbenihan Hortikultura Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 untuk memenuhi kebutuhan Kawasan Tahun 2023;
- Sarana produksi untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Mangga di Kabupaten Manggarai, Flores Timur dan Lembata, 100%.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah**Masalah:**

- Terjadi revisi anggaran pada kegiatan pengembangan kawasan mangga sehingga terjadi keterlambatan proses pengadaan benih dan sarana produksi,
- Pengujian pupuk organik membutuhkan waktu yang lama sehingga terjadi keterlambatan proses penyaluran sarana produksi ke kelompok tani;
- Kabupaten pelaksana Kegiatan Pengembangan Kawasan Mangga belum menyampaikan laporan kegiatan secara rutin ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Pemecahan Masalah:

- ✓ Memantapkan perencanaan kegiatan agar tidak terjadi revisi ketika kegiatan akan dilaksanakan,
- ✓ Percepatan proses pengujian pupuk organik oleh penyedia dimana pengambilan sampel pupuk harus segera dilakukan setelah pndatangan kontrak kerja mengingat pengujian dilakukan diluar Provinsi NTT;
- ✓ Berkoordinasi dengan Kabupaten pelaksana kegiatan agar rutin menyampaikan laporan kegiatan pengembangan kawasan jahe.

d. Kawasan Alpukat

Anggaran sebesar Rp.325.000.000,- realisasi sebesar Rp.324.966.900,- (99,99%).

Tujuannya untuk meningkatkan luas areal tanam, luas panen serta meningkatkan Produksi dan Produktivitas di lokasi pengembangan Kawasan Alpukat. Sasarannya di 8 Kelompok Tani di Kabupaten Sikka.

Hasilnya: Bantuan Pemerintah meliputi anakan Alpukat sebanyak 5.000 anakan, Pupuk NPK Non Subsidi dan Pupuk Organik, dengan luas lahan 50 Ha di Kabupaten Sikka.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah**Masalah:**

- Anakan disalurkan lebih cepat dari jadwal tanam sehingga beresiko mati sebelum penanaman;
- Kondisi kekeringan/terbatasnya ketersediaan air pada lokasi penanaman sehingga target luas tanam tidak tercapai;

- Pengujian pupuk organik (pupuk organik remah dan pupuk organik cair) membutuhkan waktu yang lama sehingga terjadi keterlambatan proses penyaluran sarana produksi ke kelompok tani;
- Kabupaten pelaksana Kegiatan Pengembangan Kawasan Alpukat belum menyampaikan laporan kegiatan secara rutin ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Pemecahan Masalah:

- ✓ Penyaluran anakan dan saprodi menyesuaikan jadwal tanam petani;
- ✓ Kelompok tani akan tetap melakukan penanaman ketika kondisi ketersediaan air mencukupi;
- ✓ Percepatan proses pengujian pupuk organik oleh penyedia dimana pengambilan sampel pupuk harus segera dilakukan setelah penandatanganan kontrak kerja mengingat pengujian dilakukan diluar Provinsi NTT;
- ✓ Berkoordinasi dengan Kabupaten pelaksana kegiatan agar rutin menyampaikan laporan kegiatan pengembangan kawasan alpukat.

e. Kawasan Krisan

Anggaran sebesar Rp.210.000.000,- realisasi sebesar Rp.209.826.000,- (99,88%).

Sasarannya adalah Kelompok Tani Pengembang Krisan di Kabupaten Kupang.

Hasilnya: tersalurkannya bantuan Pemerintah berupa bangunan green house, untuk mendukung pengembangan Kawasan Krisan seluas 300 m² di Kabupaten Kupang.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah:

- Terjadi revisi anggaran pada kegiatan pengembangan kawasan krisan sehingga terjadi keterlambatan proses pengadaan/pengerjaan Green House yang berdampak pada keterlambatan penanaman krisan;
- Kabupaten pelaksana Kegiatan Pengembangan Kawasan Krisan belum menyampaikan laporan kegiatan secara rutin ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Pemecahan Masalah:

- ✓ Memantapkan proses perencanaan untuk menghindari terjadinya revisi anggaran ketika kegiatan akan dilaksanakan;

- ✓ Berkoordinasi dengan Kabupaten Kupang sebagai pelaksana kegiatan agar rutin menyampaikan laporan kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai;
- ✓ Melakukan sosialisasi terhadap kelompok tani pelaksana terkait budidaya tanaman tanaman krisan.

Direktorat Jenderal Perkebunan

- **Satker 249031 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT**

Tabel 3.21

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249031 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik
			(Rp)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6
Satker 249031		594,710,000	591,804,100	99.51	
018.05.EC	Program Nilai Tamabah dan Daya Saing Industri	198,400,000	195,750,000	98.66	
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	198,400,000	195,750,000	98.66	99.25
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	396,310,000	396,054,100	99.94	
1780	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Perkebunan	396,310,000	396,054,100	99.94	100.00

Berdasarkan tabel diatas, Pagu Anggaran Satker 249031 sebesar Rp.594.710.000,- Realisasi sebesar Rp.591.804.100,- (99,51%).

Realisasi Program/Kegiatan Satker 249031:

I. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

1. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- a. **Perangkat Perlindungan Perkebunan** anggaran sebesar Rp.198.400.000,- realisasi sebesar Rp.195.750.000,- (98,65%) dengan Sub Kegiatan:

❖ **Operasional Laboratorium Lapangan (LL)**

❖ **Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT**

Gerakan Pengendalian OPT (tanaman Jambu Mete). Tujuannya melaksanakan bimbingan teknis pengendalian OPT tanaman perkebunan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku perlindungan dalam pengembangan penerapan teknologi pengendalian OPT sesuai prinsip PHT dengan sarana pengendalian yang ramah lingkungan.

Masalah dan Upaya Pemecahan masalah**Masalah:**

- Terbatasnya tenaga OPT Perkebunan di lapangan sehingga sehingga tidak dapat melakukan pemantauan secara optimal ke semua lokasi;
- Rendahnya pemahaman petugas pengamat hama (UPPT) lapangan tentang cara pengelolaan OPT perkebunan di daerah.

Upaya Pemecahan masalah:

- ✓ Melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten dan Ditlin Perkebunan untuk menyediakan SDM POPT di daerah;
- ✓ Memberikan bimbingan teknis tentang cara pengenalan dan pengelolaan OPT perkebunan.

❖ Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan (BPT)

- Operasional Brigade Proteksi Tanaman. Tujuannya untuk memberdayakan perangkat perlindungan dalam rangka pengamatan dan pengendalian OPT dan mencegah terjadinya eksplosif OPT Perkebunan, dengan sasaran Petugas Brigade Proteksi Tanaman dan RPO (petugas dan petani).
- Operasional Regu Pengendali OPT (RPO).
Tujuannya Melaksanakan pengamatan dan pengendalian OPT dan mencegah terjadinya eksplosif OPT Perkebunan dengan sasaran Tim /petani anggota RPO.
Hasilnya tersedianya laporan/data serangan OPT Perkebunan dan terkendalinya OPT pada tanaman perkebunan.

Masalah dan Upaya Pemecahan masalah

Masalah: RPO yang terbentuk masih terbatas pada 1 Kabupaten (TTU), dengan biaya operasional yang minim sehingga petugas RPO tidak dapat melakukan pengamatan dan pengendalian OPT antar Desa/Kecamatan.

Upaya pemecahan masalah: mengusulkan ke Ditjen Perlindungan Perkebunan untuk membentuk RPO di kabupaten lain yang potensi perkebunannya besar dan meningkatkan biaya operasional /insentif RPO.

II. Program Dukungan Manajemen

1. **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan** anggaran sebesar Rp.396.310.000,- realisasi sebesar Rp.396.054.100 (99,94%) dengan Sub Kegiatan:

- a. **Layanan Manajemen Kinerja Internal**

- ❖ **Layanan Perencanaan dan Penganggaran:** Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Satker Sub Kegiatan yang dilaksanakan: Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan, Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan; Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN); Penyusunan dan Pengelolaan Data Statistik, Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi; Penerapan SPI Pembangunan Perkebunan; Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK); Inventarisasi dan Pengendalian Sisa Kredit Sertifikat Petani Eks Proyek UPP; Pemantapan Sistem Akuntansi, Verifikasi Anggaran dan TLHP; Penyelesaian Aset BMN; Kegiatan SAI.

- **Satker 249160 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT**

Tabel 3.21

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249160 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik
			(Rp)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6
Satker 249160		1,833,775,000	1,776,006,280	96.85	
018.05.EC	Program Nilai Tamabah dan Daya Saing Industri	1,608,584,000	1,551,098,380	96.43	
5889	Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1,176,167,000	1,118,764,200	95.12	98.81
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	432,417,000	432,334,180	99.98	100.00
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	225,191,000	224,907,900	99.87	
1780	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Perkebunan	225,191,000	224,907,900	99.87	99.90

Berdasarkan tabel diatas, Pagu Anggaran Satker 249160 sebesar Rp.1.833.775.000,- Realisasi Rp.1.776.006.280,- (96,85%).

Realisasi Program/Kegiatan Satker 249160:

I. Program Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri

1. **Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan** anggaran sebesar Rp.1.176.167.000,- realisasi sebesar Rp.1.118.764.200,- (95,12%) dengan Sub Kegiatan:

a. **Koordinasi: Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan.**

❖ **Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Tanaman Perkebunan**

dilaksanakan di Provinsi dan 5 Kabupaten daerah sentra produksi tanaman perkebunan yaitu Kabupaten Sumba Timur, Ende, Ngada, Alor dan Belu. Kegiatannya meliputi pengumpulan data, pengumpulan informasi kualitatif, pengolahan data, analisis data dan penyebarluasan informasi pasar dengan melakukan inovasi dalam pengembangan pemasaran hasil perkebunan melalui aplikasi Sistem Informasi Pasar Produk Perkebunan Unggulan (SIPASBUN) yang langsung dilakukan oleh Petugas informasi pasar kabupaten Sentra dan Petugas Informasi Pasar Provinsi yang ditetapkan dengan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.

Permasalahan dan Upaya pemecahan

Permasalahan:

- Pengumpulan data di tingkat pedagang pengumpul sulit diperoleh dari pedagang pengumpul;
- Sering terjadi kesalahan penginputan data dalam aplikasi SIPASBUN.

Upaya Pemecahan:

- ✓ Pada saat pengumpulan data di tingkat pedagang pengumpul sebaiknya petugas membawa surat pengantar dari Dinas sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan;
- ✓ Harus ada koordinasi dan konsultasi antara Petugas Provinsi dan Kabupaten tentang proses penginputan data.

b. **Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan**

1. **Penyediaan Prasarana dan Sarana Pascapanen Perkebunan:**

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pascapanen Kelor di Kabupaten Ngada, Tujuannya menyediakan sarana pascapanen tanaman kelor. Sasarannya Kelompok tani Wonga Wali, Desa Inerie, Kecamatan Inerie yang berdampak pada: meningkatnya jumlah dan kualitas hasil olahan komoditas perkebunan

yang dihasilkan kelompok/gapoktan; meningkatnya pendapatan petani/pelaku agribisnis.

Hasil Pengolahan Kelor yang dilakukan oleh kelompok telah memproduksi Daun Kering sebanyak 71 box dan dikirm ke New Eden Moringga Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat dengan harga perbox Rp.200.000, sehingga penghasilan sebesar 71 box x Rp.200.000 = Rp. 14.200.000 (Hasil kotor).

Masalah dan Upaya pemecahan

Permasalahan: yang dihadapi ketersediaanya bahan baku yang tidak cukup akibat musim kemarau yang berkepanjangan dan listrik yang sering mengalami pemadaman mengakibatkan pengolahan tidak dapat berjalan dengan baik.

Upaya pemecahan: akan diadakan bantuan oleh pemerintah setempat untuk menanggulangi pemadaman listrik dengan meningkatkan daya pada gardu di daerah tersebut dan Kelompok akan menyediakan Jenzet untuk membantu proses pengolahan apabila terjadi pemadaman listrik.

2. Penyediaan Sarana Pengolahan Komoditas Perkebunan

Peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan hasil juga sangat perlu diperhatikan. Proses pengolahan hasil selain bertujuan untuk mengatasi karakteristik produk perkebunan yang mudah busuk, musiman (seasonal), serta meningkatkan nilai jual produk. Salah satu bentuk kegiatan ke arah program tersebut adalah dengan memfasilitasi Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (poktan/gapoktan) dan kelompok masyarakat lainnya sarana pengolahan hasil perkebunan, memberikan pelatihan-pelatihan, serta pembinaan dan pengawalan pengolahan hasil perkebunan. Tujuannya untuk menyediakan sarana fasilitasi pengolahan kopi di Kabupaten Ende, Kelompok Tani Wua Mesu Desa Wologai Barat Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende. Dampak dari kegiatan ini:

- Untuk mesin sangrai Total yang dihasilkan sampai dengan bulan Desember sebesar 108,5 kg x Rp.20.000 = Rp.2.170.000;
- Untuk Pembubuk total yang dihasilkan sebesar 118 kg x Rp.10.000 = Rp.1.180.000;
- Semua peralatan dan mesin berfungsi dengan baik dari saat melakukan uji coba sampai dengan awal Desember.

Masalah dan Upaya Pemecahan

Masalah:

- Kelompok belum memiliki Sarana Pascapanen kopi untuk dapat menghasilkan kopi berasan (*green bean*) sehingga kegiatan pascapanen kelompok masih menggunakan sarana di luar kelompok;
- Belum adanya kemasan yang baik untuk produk pengolahan kopi sehingga kopi bubuk yang dihasilkan masih dalam bentuk kemasan yang sangat sederhana.

Upaya Pemecahan:

- ✓ Pembinaan dan sosialisasi dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten berupa: perbaikan mutu produk yang dihasilkan sehingga memiliki daya saing di pasar; sosialisasi tentang persyaratan proses perijinan usaha; sosialisasi dan dukungan dalam pemasaran hasil olahan;
- ✓ Perlu menjalin kerjasama kemitraan dalam proses pemasaran hasil yang diusahakan lewat pemanfaatan peralatan tersebut;
- ✓ Kelompok melakukan komunikasi dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten/Provinsi ketika terdapat kendala dalam pengembangan usaha untuk mencari solusi terbaik.

II. **Program Dukungan Manajemen** anggaran sebesar Rp.225.191.000,- realisasi sebesar Rp.224.907.900,- (99,87%) dengan Sub Kegiatan:

a. Layanan Manajemen Kinerja Internal, Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Satker: Inventarisasi dan Pengendalian Sisa Kredit dan Sertifikat Petani Eks Proyek UPP Di NTT Rp.27.750.000,- Realisasi Keuangan Rp.27.658.000,- (99,67%) Kegiatan ini meliputi: biaya operasional bagi petugas dalam menyelesaikan sisa kredit proyek pola UPP sejak tahun 1980an yang masih tertunggak hingga saat ini. Kegiatan UPP tersebut didanai dari APBN maupun Bantuan Luar Negeri dengan sistem kredit lunak jangka panjang bagi petani pelaksana proyek perkebunan pada lahannya yang dimiliki secara komunal/keluarga atau pada lahan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan kebun. Kegiatan dilaksanakan di 14 Kabupaten, hingga saat ini kondisi pembayaran angsuran kredit petani pada berbagai proyek tersebut relatif masih rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah, terutama menyangkut tingkat kesadaran petani dalam melunasi kewajibannya, kondisi keberhasilan pembangunan kebun yang

beragam serta menurunnya perhatian pendamping lapangan terhadap masalah pengumpulan cicilan kredit petani di tingkat lapangan yang disebabkan karena otonomi daerah, banyak petugas yang menangani baldit di mutasi ke instansi lain dan memasuki masa purnabakti.

d) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

▪ Satker 249033 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

Tabel 3.22

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249033 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik
			(Rp)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6
Satker 249033		906,800,000	905,762,300	99.89	
018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	566,800,000	566,211,650	99.90	
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	85,000,000	84,970,700	99.97	100.00
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	431,800,000	431,524,800	99.94	100.00
3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	50,000,000	49,716,150	99.43	100.00
018.08.WA	Program Dukungan Manajemen	340,000,000	339,550,650	99.87	
1797	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	340,000,000	339,550,650	99.87	100.00

Berdasarkan tabel diatas, Pagu Anggaran Satker 249033 sebesar Rp.906.800.000,- Realisasi Anggaran Rp.905.762.300,- (99,89%).

Realisasi Program/Kegiatan Satker 249033:

- I. **Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas** anggaran sebesar Rp.566.800.000,- realisasi sebesar Rp.566.211.650,- (99,90%)
 - a. **Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian** meliputi Koordinasi: Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Irigasi Pertanian
 - b. **Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian**
 1. **Koordinasi:** Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Perluasan dan Perlindungan Pertanian
 2. **Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup:**
 - ❖ **Penyusunan Peta Geospasial Perluasan Sawah (TA. 2016-2018)** dengan Skala 1:5000. Tujuannya agar dapat menghasilkan peta perluasan sawah (TA.2016 - 2018) skala 1 : 5.000 dengan citra satelit keluaran tahun 2023 dan tersedianya

data atribut dan informasi terkini kegiatan perluasan sawah TA. 2016-2018. Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya peta perluasan sawah (TA.2016-2018) untuk lahan seluas 2.482,321 hektar yang berbasis spasial, menggunakan citra satelit dengan skala 1 : 5.000, yang tersebar pada 17 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adanya data Peta Geospasial Perluasan Sawah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan informasi tiap hamparan seperti tahun alokasi kegiatan perluasan sawah, luas hamparan, nama kelompok tani, wilayah administrasi (Desa, Kecamatan dan Kabupaten), indeks pertanaman, produktivitas, dokumentasi hamparan, dan data atribut lain yang diperlukan untuk penyusunan kajian pemanfaatan kegiatan perluasan sawah TA. 2016 – 2018.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah

- Terdapat lahan hasil cetak sawah yang termanfaatkan secara terputus/ tidak kontinu (Zona Kuning) 35,45% dari luas 879,92 ha dan yang beralih fungsi atau menyemak (Zona Merah) 8,84% dari luas 219,503 ha;
- Kelangkaan air masih dialami oleh petani yang melakukan kultivasi padi di atas lahan pencetakan sawah tahun 2016-2018;
- Modal tunai (daya beli masyarakat yang rendah) yang relatif terbatas mengakibatkan akses ke sarana produksi penting seperti pupuk dan benih berkualitas relatif terbatas dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga berimplikasi pada indeks Pertanaman, yakni rata-rata IP baru mencapai 1,36.

Upaya Pemecahan Masalah

- ✓ Pengembangan dan pembangunan infrastruktur irigasi diwaktu yang akan datang sebaiknya dilakukan pada areal yang telah dirintis petani termasuk sawah tadah hujan untuk meningkatkan IP yang lebih tinggi. Selain mendorong pengecer untuk menyediakan sarana produksi lebih dekat ke hamparan lahan agar mengurangi biaya produksi;
- ✓ Pengelolaan infrastruktur irigasi secara aktif masyarakat perlu dilibatkan dengan menggunakan berbagai strategi agar kelembagaan pengelolaan air dapat efisien;

- ✓ Sinergitas pemerintah kabupaten/kota dan propinsi dibutuhkan terutama dalam perbaikan teknis irigasi terutama jaringan tersier dan sebagian sekunder agar kelangkaan air dari hasil pencetakan sawah dapat diminimalisir;
- ✓ Sinergitas kedua level pemerintah juga dibutuhkan untuk terus memberdayakan potensi-potensi masyarakat terutama dalam mendukung kinerja kelembagaan pengatur air agar lebih efisien dalam pemanfaatan air yang adil dan merata;
- ✓ Dalam level nasional, dibutuhkan kerjasama yang simultan antar kementerian (terutama kementerian PUPR dan pertanian) untuk pengadaan atau penggalian sumur dalam untuk mendukung sumber air bagi irigasi, yang selama ini sangat bergantung keberadaan sungai-sungai yang sering kering pada musim kemarau.

❖ **Fasilitasi Pembiayaan Pertanian**

Koordinasi: Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Pembiayaan Pertanian. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu Program Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Target KUR di NTT Tahun 2023 sebesar 2,728 triliun rupiah dengan rincian untuk subsektor tanaman pangan sebesar 1,378 triliun, subsektor hortikultura sebesar 250 Miliar, subsektor perkebunan sebesar 1,100 triliun.

Kegiatan dilaksanakan di 2 Kabupaten: Kabupaten Kupang dan Malaka, melibatkan Tim Pusat dan Pihak Lembaga Keuangan sebagai penyalur KUR. Sosialisasi, Pembinaan dan monitoring telah dilakukan dan dikoordinasikan dengan pihak lembaga keuangan/bank dan Tim Pusat Pelaksana KUR. Realisasi untuk provinsi NTT per Desember 2023 Rp. **426,529,373,000,-**

Masalah dan Upaya Pemecahan

Masalah: Kurangnya pendampingan dan pembinaan untuk petani pelaku usaha tani dalam memberikan pemahaman petani tentang proses pengajuan KUR dan proses pengembalian angsuran pinjaman pada bank penyalur KUR.

Upaya Pemecahan Masalah: Melakukan sosialisasi pentingnya KUR sebagai modal usaha tani bagi petani pada setiap kesempatan kegiatan dinas, dan memfasilitasi hubungan antara petani pelaku usaha tani dengan pihak lembaga yang memberikan kontribusi untuk kelancaran usaha taninya dengan tujuan agar jika terjadi kerugian, petani tidak lagi meminjam modal kepada tengkulak yang justru merugikan.

II. Program Dukungan Manajemen

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian anggaran sebesar Rp.340.000.000,- realisasi sebesar Rp.339.550.560,- (99,87%)

a. Layanan Manajemen Kinerja Internal digunakan untuk Layanan Manajemen Keuangan.

▪ Satker 249165 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

Tabel 3.23

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 249165 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik
			(Rp)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6
Satker 249165		9,436,563,000	5,868,179,000	62.19	
018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	8,166,633,000	4,605,734,350	56.40	
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	7,047,662,000	3,515,252,350	49.88	54.74
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	360,000,000	350,692,000	97.41	100.00
3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	714,116,000	697,835,000	97.72	93.98
3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	44,855,000	41,955,000	93.53	100.00
018.08.WA	Program Dukungan Manajemen	1,269,930,000	1,262,444,650	99.41	
1797	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1,269,930,000	1,262,444,650	99.41	100.00

Berdasarkan tabel diatas, Pagu Anggaran Satker 249165 sebesar Rp.9.436.563.000,- Realisasi Anggaran Rp.5.868.179.000,- (62,19%).

Realisasi Program/Kegiatan Satker 249165:

I. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas anggaran sebesar Rp.8.166.633.000,- realisasi sebesar Rp.4.605.734.350,- (56,40%)

1. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Kegiatan Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan:

- ❖ **Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian** untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RP-LP2B) TA. 2023 di 3 Kabupaten: TTS, TTU dan Malaka. Anggaran tersebut dibagi untuk provinsi sejumlah Rp.320.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.319.591.650,- (99,87%). Sedangkan untuk ketiga kabupaten masing-masing dialokasikan anggaran sejumlah Rp.250.000.000,-. Kabupaten TTS realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.249.550.000,- (99,82%); Kabupaten TTU realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.249.900.000,- (99,96%); Sedangkan Kabupaten Malaka realisasi anggarannya sebesar Rp.249.870.000,- (99,95%). Dengan demikian yang direalisasikan sebesar Rp.1.068.911.650,- (99,90%). Pelaksanaan Kegiatan RP-LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dilakukan secara kolaboratif antara pihak Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian di 3 Kabupaten. Masing-masing pihak memiliki tanggungjawabnya sesuai arahan dalam pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Hasilnya adalah realisasi pelaksanaan fisik dari Kegiatan RP-LP2B TA. 2023 di 3 Kabupaten mencapai 100%. Ketiga kabupaten tersebut berhasil menetapkan produk Keputusan Bupati tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kabupaten masing-masing. Secara ringkas hasil penetapan data luasan LP2B, LCP2B dan KP2B oleh Pokja LP2B di 3 kabupaten dapat diuraikan sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

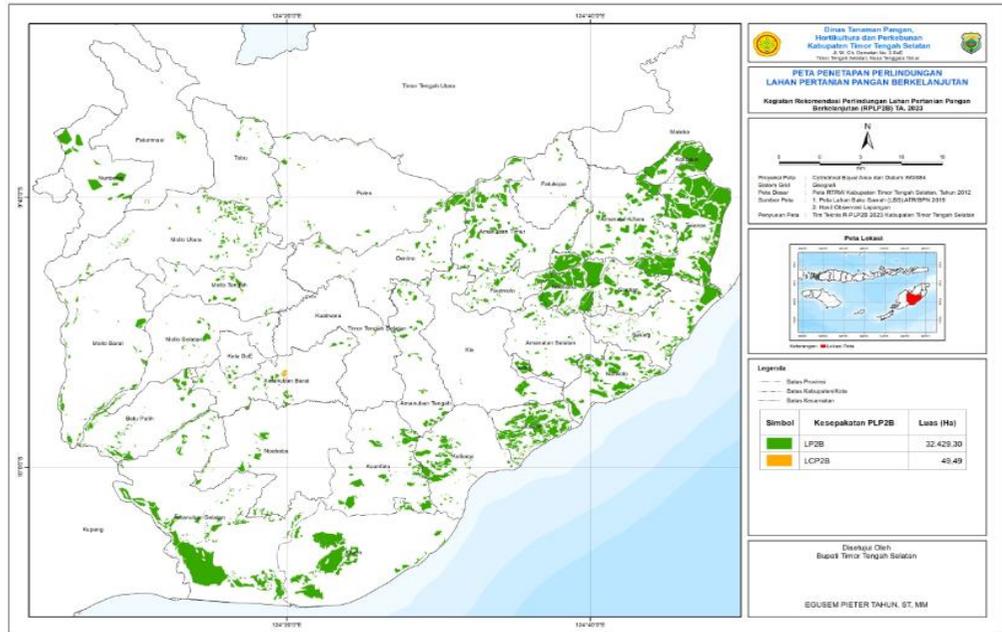
Tabel 3.24

Data Realisasi Penetapan LP2B, LCP2B dan KP2B di 3 Kabupaten Prov. NTT TA. 2023

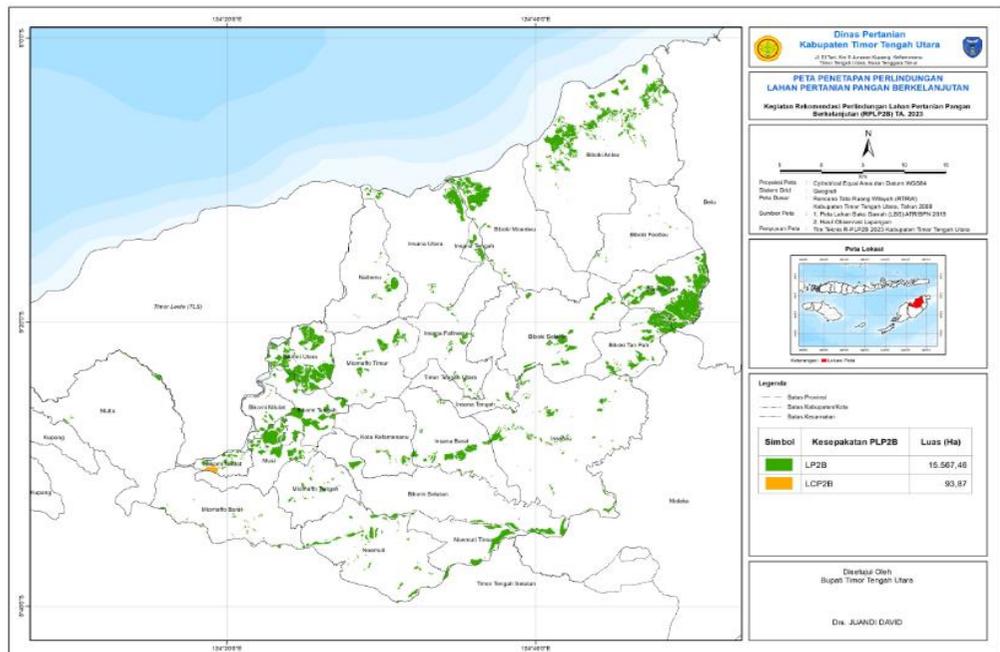
NO.	KABUPATEN	LBS 2019 (Ha)	HASIL PENETAPAN LP2B			HASIL PENETAPAN LCP2B (Ha)	HASIL PENETAPAN KP2B (Ha)	KELUARAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PLP2B KABUPATEN TAHUN 2023
			SAWAH (Ha)	TEGALAN PANGAN (Ha)	TOTAL (Ha)			
1.	TIMOR TENGAH SELATAN	5.256,36	4.226,22	28.203,08	32.429,30	49,49	32.478,78	Keputusan Bupati TTS Nomor: 284/KEP/HK/2023, tanggal 15 Desember 2023, tentang Penetapan LP2B dalam Wilayah Kab. TTS.
2.	TIMOR TENGAH UTARA	8.421,23	8.288,99	7.278,46	15.567,46	93,87	15.661,33	Keputusan Bupati Nomor: 74 Tahun 2022, tanggal 11 Nopember 2022, tentang Perubahan Luas LP2B dan LCP2B di Kab. Timor Tengah Utara.
3.	MALAKA	4.901,38	4.547,99	17.015,66	21.563,65	223,81	21.787,46	Keputusan Bupati Nomor: 230/HK/2023, tanggal 01 Desember 2023, tentang Penetapan Luas dan Sebaran LP2B dan LCP2B di Kab. Malaka.
TOTAL		18.578,97	17.063,20	52.497,20	69.560,41	367,17	69.927,57	

Hasil dari pelaksanaan fisik kemudian diekspose dalam rapat ekspose hasil secara nasional di Provinsi Bali. Ke tiga kabupaten tersebut berhasil memperbaharui data luasan LP2B, LCP2B dan KP2B oleh Pokja LP2B yang sudah diklarifikasi oleh tim pokja, dan selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan dalam keputusan bupati di masing-masing kabupaten.

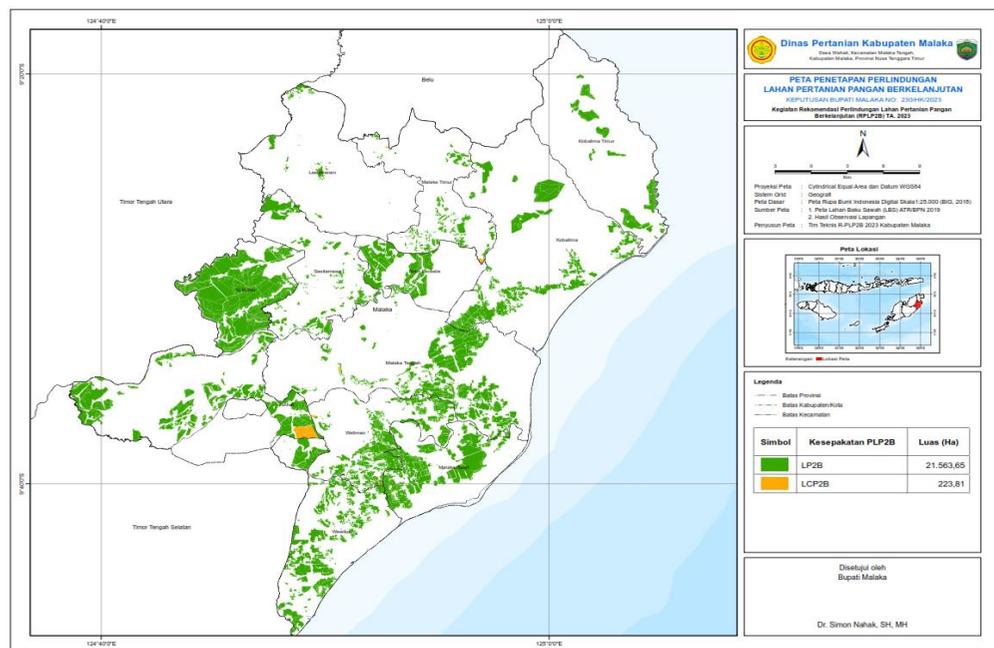
Peta LP2B, LCP2B dan KP2B di 3 Kabupaten sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1.
Peta LP2B, LCP2B Kabupaten Timor Tengah Selatan



Gambar 3.2.
Peta LP2B dan LCP2B Kabupaten Timor Tengah Utara



Gambar 3.3.
Peta LP2B dan LCP2B Kabupaten Malaka

- ❖ **Pengembangan Lahan Pertanian Produktif pada Areal Tanaman Pangan Lahan Kering** dilaksanakan di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Ende 50 Ha, Sikka 50 Ha dan Flores Timur 50 Ha. Tujuannya menghasilkan produksi tanaman pangan pada lahan kering dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan kebutuhan petani. Hasilnya adalah bertambahnya luas baku lahan tanaman pangan lahan kering dan areal tanam pada wilayah-wilayah pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah:

- Status lahan bermasalah;
- Usia tenaga kerja yang sudah tua;
- Sering terjadinya kesalahan dalam Penunjukan dan penempatan calon petani lokasi/calon petani tidak sesuai dengan petunjuk teknis;
- Terjadinya penolakan pembebasan lahan guna kegiatan yang dimaksud dengan alasan lahan belum memiliki sertifikat dan masih tanak adat/ulayat
- Keterlambatan dalam memenuhi target pemberkasan guna pengajuan Tahap I dan II;

- Pelaksanaan pekerjaan fisik di kelompok tani Rii Anak dari target 50 Ha, yang mampu di laksanakan hanya 46 Ha.karena 4 ha lahan masih dalam kepemilikan tanah ulayat yang belum dibagi ke masing masing penerima hak kepemilikan.

Upaya Pemecahan Masalah:

- ✓ Setelah penunjukan CP/CL oleh Tim Teknis Kabupaten dilakukan Monitring dan Verifikasi ulang Calon Lahan yang diajukan Oleh Kabupaten;
- ✓ Kelompok tani membuat RUKK yang disesuaikan dengan keadaan dilapangan;
- ✓ Sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp.30.000.000 di kelompok tani Ri'l Anak sehingga disetor kembali ke kas Negara;
- ✓ Melakukan Pendekatan dengan Desa, Kecamatan,Toko Adat, dan SKPD yang membidangi Pertanahan guna Penyelesaian legalitas lahan dan status lahan;
- ✓ Selalu melakukan Koordinasi dan evaluasi setiap bulan antara Dirjen PSP Pusat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi, Kabupaten dan Kelompok Penerima Bantuan;
- ✓ Telah dibuat pernyataan dari masing masing anggota yang lahannya masih masuk dalam kepemilikan tanah ulayat untuk mengembalikan dana yang sudah diterima.

2. Fasilitas Pupuk dan Pestisida

Kegiatan meliputi: Belanja Bahan, Belanja Honor Output Kegiatan, anggarannya dikelola oleh 22 Kabupaten/Kota.

- a. **Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi** dilaksanakan di 22 Kabupaten/Kota Provinsi NTT dari awal bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023, sesuai jadwal verifikasi dan validasi yang ditetapkan dari tanggal 1 s/d 10 dalam bulan berjalan dan pada bulan Desember pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan dari tanggal 1 s/d 31 Desember tahun 2023.

Hasil pelaksanaan sesuai data yang terverifikasi dan tervalidasi dalam aplikasi e-Verval yang telah dilakukan persetujuan ditingkat kecamatan sampai dengan persetujuan ditingkat pusat dari Januari sampai dengan Desember untuk 2 jenis pupuk bersubsidi di 22 Kabupaten/Kota Provinsi NTT tahun 2023. Total jumlah persetujuan penyaluran per bulan untuk 2 jenis pupuk subsidi hasil verifikasi dan validasi yang mendapat persetujuan dari tim admin kecamatan dan pusat.

b. **Penyusunan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023**

Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2023, mengacu pada Permentan Nomor 734/Kpts/SR.320/M/09/2022, tanggal 26 September 2022 dan SK Gubernur NTT Nomor 316/Kep/HK/2022, tanggal 17 Oktober 2022 sebesar 280.059 Ton dan terinput serta disahkan Bupati/Walikota sebesar 175.625 Ton (62.71 %) dan ditindaklanjuti oleh Penetapan Alokasi oleh Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota, sesuai Permentan 10 tahun 2022 untuk 2 (dua) jenis pupuk bersubsidi yakni Urea dan NPK (NPK Formula Khusus). Alokasi pupuk bersubsidi di 22 kab/kota kebutuhan tahun 2023, sesuai SK Gubernur NTT No. 316/Kep/HK/2022 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.25

Alokasi Awal Pupuk Bersubsidi Tahun 2023

KAB/KOTA	UREA	NPK	NPK FORMULA
	ALOKASI 2023	ALOKASI 2023	ALOKASI 2023
ALOR	28	13	-
BELU	6,133	3,200	-
ENDE	3,940	3,141	869
FLORES TIMUR	1,865	1,293	12
KOTA KUPANG	726	835	-
KUPANG	9,573	9,395	2
LEMBATA	775	364	-
MALAKA	4,612	2,300	-
MANGGARAI	5,021	9,565	25
MANGGARAI BARAT	7,236	9,981	-
MANGGARAI TIMUR	3,746	6,233	7
NAGEKEO	3,193	4,771	151
NGADA	3,268	3,165	199
ROTE NDAO	3,913	6,165	18
SABU RAIJUA	1,251	1,966	-
SIKKA	8,000	3,500	900
SUMBA BARAT	1,735	5,000	-
SUMBA B. DAYA	4,379	3,826	-
SUMBA TENGAH	1,101	1,764	-
SUMBA TIMUR	4,104	7,300	107
TTS	4,692	2,885	2
TTU	3,568	3,185	3
TOTAL	82,857	89,845	2,293

➤ **Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2023**

Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Kepmentan Nomor 744 Tahun 2023, tentang HET pupuk bersubsidi dipatok masing-masing senilai:

- Rp.2.250,00 per kg untuk pupuk urea;
- Rp.2.300,00 per kg untuk pupuk NPK 15-10-12 ; dan
- Rp.3.300,00 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus Bun.

➤ **Realisasi Pupuk Besubsidi 22 Kab/Kota di Provinsi NTT TA. 2023**

Pada tahun 2023 penyaluran pupuk yang terealisasi di 22 kabupaten/kota Provinsi NTT yang disalurkan oleh KPL/pengecer dengan yang terverifikasi dan tervalidasi dari tingkat kecamatan dan pusat yang penebusan serta penyaluran dari Januari sampai November 2023, dengan total penyaluran pupuk bersubsidi urea sebanyak 24.076 ton dari alokasi sebanyak 82.440 ton dengan prosentase penyaluran sebesar 24.20 %, NPK realisasi sebanyak 26.886 ton dari alokasi sebanyak 89.442 ton dengan prosentase penyaluran sebesar 30 %, sedangkan NPK Formulasi Khusus Bun tidak ada Realisasi penyaluran. Penyaluran 2 (dua) jenis pupuk bersubsidi (Urea dan NPK) dengan rincian penyaluran Kab/Kota, perjenis pupuk dari Januari sampai Desember tahun 2023.

c. **Penyusunan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi e-RDCK/e-Alokasi Tahun 2024**

Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah melakukan penyusunan dan penginputan kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2023 sesuai Permentan 10 tahun 2022 dan dosis rekomendasi pemupukan yang dikeluarkan oleh badan Litbang Pertanian Pusat. Hasil penyusunan/penginputan kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai data e-RDCK 2024 yang telah diverifikasi secara berjenjang dan disahkan oleh Kepala Dinas tahun 2023 yakni jumlah petani yang terinput sebanyak 301.497 Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta total kebutuhan petani/kelompok tani untuk 3 (tiga) jenis pupuk bersubsidi di 22 Kabupaten/Kota sebanyak 190.983 ton sedangkan total alokasi 3 jenis pupuk bersubsidi yang dialokasikan pusat sebanyak 69.922 ton dengan rincian sebagai berikut:

- Urea sebanyak 68.941 Ton yang terinput dan alokasi yang diberikan pusat sebanyak 36,405 ton dengan prosentase 52.81%;

- NPK sebanyak 111.84 ton yang terinput dan alokasi yang diberikan pusat sebanyak 32.858 Ton, dengan prosentase sebesar 29.38%;
- NPK Formula Khusus sebanyak 658 ton yang terinput dan alokasi yang diberikan pusat sebanyak 95 ton sebesar 0.01%.

Tabel. 3.26

Rincian kebutuhan perjenis pupuk bersubsidi di Kabupaten/Kota Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL NIK	TOTAL RENCANA TANAM	USULAN E-RDCK DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2024								
				UREA			NPK			NPK FORMULA KHUSUS		
				E-RDCK KAB/KOTA	ALOKASI PUSAT/GUB	%	E-RDCK KAB/KOTA	ALOKASI PUSAT/GUB	%	E-RDCK KAB/KOTA	ALOKASI PUSAT/GUB	%
1	KUPANG	27,199	40,170	8,829	4,657	52.75	11,329	3,325	29.35	-	-	-
2	TIMOR TENGAH SELATAN	15,118	21,084	3,776	1,944	51.48	3,713	1,439	38.77	-	-	-
3	TIMOR TENGAH UTARA	15,573	20,751	3,688	1,991	53.98	4,896	1,091	22.29	-	-	-
4	BELU	9,131	12,445	2,656	1,401	52.73	3,429	1,006	29.34	-	-	-
5	ALOR	375	358	51	26	52.34	4	1	28.95	-	-	-
6	FLORES TIMUR	4,533	5,092	925	489	52.82	952	279	29.34	-	-	-
7	SIKKA	17,076	19,224	3,426	1,805	52.69	4,832	1,419	29.36	142.61	20.51	14.38
8	ENDE	10,657	11,509	2,426	1,281	52.78	3,199	940	29.40	417.18	60.12	14.41
9	NGADA	12,745	12,403	2,559	1,351	52.81	3,905	1,147	29.38	75.39	10.84	14.38
10	MANGGARAI	30,552	24,707	4,344	2,297	52.88	8,555	2,520	29.46	6.00	0.88	14.67
11	SUMBA TIMUR	18,119	27,680	3,697	1,952	52.82	9,466	2,780	29.37	4.89	0.70	14.31
12	SUMBA BARAT	10,742	12,533	1,558	824	52.92	4,662	1,369	29.36	-	-	-
13	LEMBATA	4,002	2,571	481	254	52.74	374	110	29.27	-	-	-
14	ROTE NDAO	18,234	21,867	3,893	2,053	52.73	6,143	1,804	29.37	-	-	-
15	MANGGARAI BARAT	29,675	35,286	6,537	3,454	52.85	9,521	2,796	29.37	-	-	-
16	NAGEKEO	11,182	15,795	2,819	1,486	52.74	4,236	1,246	29.43	11.33	1.79	15.80
17	SUMBA TENGAH	7,318	10,074	1,703	900	52.85	3,772	1,107	29.35	-	-	-
18	SUMBA BARAT DAYA	15,705	36,939	6,766	3,577	52.87	14,744	4,331	29.38	-	-	-
19	MANGGARAI TIMUR	19,796	20,124	3,287	1,746	53.13	6,141	1,805	29.40	1.23	0.18	14.66
20	SABU RAJUA	11,808	9,141	1,826	964	52.81	2,906	855	29.42	-	-	-
21	MALAKA	9,063	15,344	3,120	1,647	52.79	4,369	1,284	29.39	-	-	-
22	KOTA KUPANG	2,894	2,381	574	303	52.70	684	202	29.46	-	-	-
	TOTAL NTT	301,497	377,476	68,941	36,405	52.81	111,833	32,858	29.38	659	95	14.43

d. Perkembangan Pelaksanaan Kartu Tani Tahun 2023

Sesuai data yang dikeluarkan oleh pihak Himbara (BRI) progres pelaksanaan Kartu Tani pada tahun 2023 di 22 Kabupaten/Kota dengan realisasi pelaksanaan dari bulan Januari sampai bulan September yakni sebanyak 417.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan jumlah KARTU Tani tercetak sebanyak 407.593 kartu dan dalam proses cetak sebanyak 9.407 kartu.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah:

- Belum pahamnya petugas penyusunan/penginputan Kebutuhan pupuk bersubsidi dalam aplikasi e-Alokasi yang baru;

- Kurang efektifnya waktu penginputan kebutuhan pada aplikasi e-Alokasi sehingga belum semua petani/kelompok tani terinput;
- Masih adanya Petani yang belum tergabung dalam kelompok tani dan belum memiliki identitas (KTP, Kartu Keluarga), sedangkan petani tersebut membutuhkan pupuk bersubsidi;
- Kurangnya dana terkait pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi;
- Masih adanya petani yang terinput dalam e-RDKK tapi tidak terinput dalam sistem penyaluran berbasis elektronik (T-Pubers);
- Pelaksanaan verifikasi dan validasi elektronik (e-Verval) pupuk bersubsidi periode bulan Januari-Desember 2023 belum dilakukan tepat waktu oleh beberapa tim verval kecamatan di Kabupaten/Kota, menyebabkan pembukaan kembali sistem e-Verval oleh tim verval pusat untuk penyelesaian approve data verval kecamatan untuk konsolidasi penyelesaian tagihan pembayaran dana subsidi pupuk dari Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) kepada Direktorat Pupuk dan Pestisida;
- Rendahnya realisasi serapan pupuk bersubsidi di kabupaten/kota disebabkan oleh beberapa hal antara lain Distribusi pupuk, Daya Beli Petani dan Penutupan/Perbaikan embung/bendungan dan musim kemarau yang berkepanjangan.

Upaya Pemecahan Masalah :

- ✓ Perlunya adanya sosialisasi penginputan e-Alokasi dan peran Petugas/Admin dalam pendampingan ke petani/kelompok tani sehingga e-Alokasi yang tersusun valid dalam hal ini berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan luas lahan kepemilikan maupun garapan serta sesuai dengan kemampuan/daya beli petani/ kelompok tani;
- ✓ Perlu dilakukannya Sosialisasi tata cara pengisian e-Alokasi kebutuhan pupuk di tingkat petani secara terus-menerus;
- ✓ Penyusunan/Penginputan e-Alokasi agar sesuai dengan hasil musyawarah kelompok tani sehingga kebutuhan pupuk yang diusulkan sesuai dengan usulan petani/kelompok tani;
- ✓ Perlu adanya perubahan waktu penginputan agar semua petani dapat terinput dalam aplikasi e-Alokasi;
- ✓ Mengarahkan petani/kelompok tani yang belum mempunyai identitas (KTP dan Kartu Keluarga) untuk mengurus identitas tersebut agar bisa di akomodir untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan bantuan lainnya;

- ✓ Perlunya Sosialisasi tata cara penginputan Kebutuhan pupuk bersubsidi dalam aplikasi e-Alokasi;
- ✓ Perlu adanya dana untuk pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi;
- ✓ Perlu adanya keterlibatan semua stake holder untuk mengatasi daya beli petani (Koperasi, Bundes, Swasta, LSM dll).

3. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

Dari jumlah lahan yang sudah mendaftar pada aplikasi SIAP 39.25 ha (DPS), 38.23 Ha (DPD) dengan 14 Polis Asuransi yang terdiri dari 4 Polis Kabupaten Kupang (16.81 Ha) dan 10 Polis dari Kabupaten Malaka (21.44 Ha). Pendaftaran yang tidak direalisasi 0,5 Ha karena kelompok tersebut tidak membayar premi. Petani yang sudah mendaftar menjadi peserta asuransi usaha tani padi di musim tanam (MT) II. Untuk petani yang telah mendaftar dan menjadi peserta dengan membayar swadaya 20% dengan bantuan premi asuransi pemerintah 80% dari nilai pertanggung Rp.180.000/ha/musim tanam. Pelaksanaan kegiatan AUTP telah dilaksanakan di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kupang dan Malaka dengan target 1.500 ha, menjadi 500 Ha dan capaiannya 15.3%. Hal ini disebabkan karena keterlambatan sosialisasi yang di lakukan pada awal bulan Maret, dimana petani sementara berada pada MT. I, sehingga pendaftaran peserta baru dimulai pada awal bulan Juli untuk periode MT. II, setelah pendaftaran peserta yang dilakukan oleh penyuluh pendamping dengan mengisi form.1. peserta yang mendaftar 63 Petani dengan luas lahan 38,25 ha. Setelah pengisian form.1 oleh petani yang didampingi oleh Penyuluh Pendamping, penyuluh pendamping meneruskan ke tim provinsi, tim bersama-sama menginput kembali form.1 pada aplikasi dan meneruskan ke koordinator penyuluh untuk diverifikasi dan diteruskan ke pihak PT. Jasindo. Setelah ada persetujuan dari PT. Jasindo, Petani wajib membayar Premi 20% (Rp.36.000,-) kemudian PT. Jasindo menerbitkan polis, setelah polis AUTP diterbitkan, Tim Kabupaten membuat SK DPD AUTP. Untuk tahun 2023 ada 4 SK DPD (1 kabupaten Kupang dan 3 kabupaten Malaka). Target dan realisasi AUTP tahun 2023 di provinsi NTT meningkat baik dengan capain 15.3% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Masalah dan Upaya Pemecahan

Masalah:

- Kurangnya informasi dan pemahaman petani tentang kegiatan asuransi usaha tani padi yang merupakan program pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada petani dengan memberikan ganti rugi/kompensasi jika terjadi gagal panen tanaman pangan padi sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT;
- Kesadaran petani untuk membayar premi asuransi masih rendah. Petani yang memiliki lahan berisiko tinggi lebih tertarik untuk mendaftarkan AUTP sedangkan petani yang lahan sawahnya berisiko rendah kurang tertarik mendaftarkan AUTP.

Upaya Pemecahan Masalah:

- ✓ Peningkatan sosialisasi AUTP kepada petani pada setiap kesempatan kegiatan dinas, tidak hanya dilakukan di lokasi sentra produksi saja tapi semua lokasi dimana ada petani usaha tani padi agar seluruh petani tersentuh oleh program asuransi;
- ✓ Penyebarluasan informasi melalui Leaflet AUTP dirasa penting untuk mempercepat petugas lapangan dan petani memahami AUTP.

II. Program Dukungan Manajemen

- a. **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Saran Pertanian**
Anggaran sebesar Rp.1.269.930.000,- Realisasi Rp.1.262.444.650,- (99,41%)

e) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

- **Satker 407357 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT**

Tabel 3.27

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 403457 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik
			(Rp)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6
Satker 403457		14,024,934,000	13,268,242,200	94.60	
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	14,024,934,000	13,268,242,200	94.60	
1812	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	14,024,934,000	13,268,242,200	94.60	99.30

Berdasarkan tabel diatas, Pagu Anggaran Satker 403457 sebesar Rp.14.024.934.000,-Realisasi mencapai Rp.13.268.242.200,- (94,60)

Realisasi Program/kegiatan pada Satker 407457:

I. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- a. **Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian** anggaran sebesar Rp.14.024.934.000,- realisasi sebesar Rp.13.268.242.200,- (94,60) dengan Sub Kegiatan:

❖ **Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Provinsi**

Tujuannya untuk meningkatkan kinerja pelaksana kegiatan penyuluhan di Provinsi; mendukung operasional Kegiatan Penyuluhan di Provinsi.

Sasarannya adalah pelaksana kegiatan penyuluhan di Provinsi sehingga berdampak pada tercapainya tujuan dari kegiatan Penyuluhan di Provinsi. Hasilnya: peningkatan kinerja pelaksana kegiatan penyuluhan di Provinsi.

❖ **Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat**

1. Insentif Kinerja THLTB Penyuluh Pertanian

Tujuannya meningkatkan jumlah kelompok tani yang menerapkan inovasi teknologi pertanian di wilayah binaan penyuluh pertanian. Sasarannya Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB PP) Penyuluh Pertanian di 12 Kabupaten/Kota. Manfaatnya penerapan Inovasi Teknologi oleh 370 kelompok tani yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian (THL-TB Penyuluh Pertanian). Dampaknya meningkatnya scoring atau Kenaikan Kelas Kemampuan Kelompok Tani yang dibina penyuluh pertanian (THL-TB Penyuluh Pertanian) dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah: Keterlambatan pengiriman rekomendasi melalui aplikasi e-pusluh penerima; Aplikasi e-pusluh sering dalam perbaikan/error; Terdapat penyuluh yang tidak direkomendasikan karena tidak memasukan/mengupload laporan penyuluhan ke aplikasi e-pusluh dari Kabupaten/Kota.

Upaya Pemecahan Masalah: Melakukan Koordinasi dengan pusat dan daerah untuk percepatan pelaporan oleh penyuluh pertanian.

2. Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian (PNS dan PPPK)

Tujuannya untuk meningkatkan jumlah kelompok tani yang menerapkan inovasi teknologi pertanian di wilayah binaan penyuluh pertanian. Sasarannya Penyuluh Pertanian PNS di Provinsi, BPTP dan 22 Kabupaten/Kota; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) di 20 Kabupaten. Manfaatnya penerapan Inovasi

Teknologi oleh 8.550 kelompok tani yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian (PNS dan PPPK Penyuluh Pertanian).

Dampaknya meningkatnya kinerja penyuluh pertanian (PNS dan PPPK Penyuluh Pertanian) dalam melakukan kunjungan, pendampingan dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha; dan meningkatnya scoring atau Kenaikan Kelas Kemampuan Kelompok Tani yang dibina penyuluh pertanian (PNS dan PPPK Penyuluh Pertanian).

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah: Keterlambatan pengiriman rekomendasi melalui aplikasi e-pusluh penerima Biaya Operasional dan bantuan pulsa Penyuluh Pertanian dan bantuan pulsa baik bagi PNS dan PPPK dari Kabupaten/ Kota. Aplikasi e-pusluh sering dalam perbaikan/error. Terdapat penyuluh yang tidak direkomendasikan karena tidak memasukan/mengupload laporan penyuluh ke aplikasi e-pusluh.

Upaya Pemecahan Masalah: Koordinasi dengan pusat dan daerah untuk percepatan pelaporan oleh penyuluh pertanian.

❖ **Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian**

1. Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian (Sekolah Lapangan (SL))

Kegiatan Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian bertujuan untuk: meningkatkan kapasitas petani milenial/poktan/gapoktan dalam membuat dan menerapkan pupuk organik; dan meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian/ petugas pendamping SL tematik penerapan teknologi pertanian organik.

Sasarannya Penyuluh pertanian pendamping sebanyak 17 orang; kelompok tani sebanyak 30 poktan (10 poktan/BPP), petani peserta sekolah lapangan sebanyak 376 orang di 3 BPP yaitu BPP Alak Kecamatan Alak Kota Kupang, BPP Naibonat kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, dan BPP Kuantana Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Hasilnya adalah:

- Meningkatnya kapasitas peserta dari 30 kelompok tani dari nilai pre tes rata-rata sebesar 60,13 dan nilai post test rata-rata sebesar 92,13. Sehingga pengetahuan dan ketrampilan peserta SL mengalami peningkatan sebesar 53,22 % dalam pembuatan pupuk organik yang terdiri dari pupuk organik padat, pupuk organik cair, biochar, pupuk hayati pestisida alami dan menerapkan penggunaan pupuk organik pada 3 (tiga) BPP;

- Terjadi peningkatan hasil produktivitas di 3 BPP pelaksana Sekolah Lapang, sebelum kegiatan sekolah lapangan rata-rata berkisar 5,19 ton/ha, sedangkan produksi pada kegiatan sekolah lapangan rata-rata berkisar 7,89 ton/ha.

❖ **Fasilitasi Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP)**

Dukungan Penerapan Teknologi CSA Padi atau Non Padi, Pertemuan Koordinasi Komponen A SIMURP, Penguatan BPP, Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar (Marketing Linkage), Fasilitasi Kegiatan Pengolahan Industri Rumah Tangga Hasil Pertanian (KWT).

1. Dukungan Penerapan Teknologi CSA Padi dan Non Padi

Tujuannya meningkatkan produktivitas dan indek pertanaman (IP) di lokasi program SIMURP.

Hasilnya produktivitas padi yang diperoleh melalui penerapan teknologi CSA pada kegiatan Demplot di 24 kelompok tani sebesar 6,15 Ton/ Ha GKP sedangkan kelompok yang tidak menerapkan teknologi CSA sebesar 4,37 Ton/ Ha GKP.

Manfaatnya petani dapat menerapkan teknologi CSA dengan mengedepankan penggunaan air yang efisien tanpa tergantung pada kondisi iklim yang berubah.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah: Indeks Pertanaman (IP) pada tanaman padi tidak naik karena terjadi penutupan irigasi (rehab irigasi) di lokasi SIMURP pada MT II.

Upaya Pemecahan: Mengganti komoditi padi karena terbatasnya air yang tersedia (efisiensi penggunaan air) menjadi komoditi non padi dengan tetap menerapkan teknologi CSA non padi (hortikultura).

2. Pertemuan Koordinasi SIMURP

Tujuannya mengevaluasi Pelaksanaan Program SIMURP Tahun 2023; menyamakan Persepsi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan Program SIMURP Tahun 2023.

Sasaran dari sub Kegiatan ini adalah:

- BAPPELITBANGDA Provinsi NTT ;
- Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II;
- Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT;
- Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT;

- Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT;
- Konsultan SIMURP Provinsi NTT.

Manfaatnya terjalannya kolaborasi kegiatan dengan stakeholder terkait dalam mendukung kegiatan SIMURP, sehingga berdampak pada meningkatnya produksi dan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani di lokasi SIMURP untuk meningkatkan ketahanan pangan.

3. Penguatan BPP

Tujuannya untuk mengoptimalkan peran BPP sebagai kostratani dalam menerapkan teknologi CSA di lokasi pelaksana kegiatan SIMURP yakni BPP Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.

Manfaatnya BPP dapat menjadi garda terdepan dalam pengawalan dan sinergitas kegiatan pertanian khususnya dalam penerapan teknologi CSA melalui peran BPP Kostratani di Kabupaten Nagekeo.

4. Pengembangan Produk dan Jejaring Pasar

Tujuannya untuk memperkuat kelembagaan ekonomi petani melalui bimtek pembinaan dan pengembangan produk dan jejaring pasar dalam skala ekonomi berbasis kawasan pertanian di lokasi pelaksana SIMURP.

Sasarannya:

- Petani muda yang bersedia berkontribusi aktif dan mampu menjadi penggerak penumbuh kembangan KEP;
- Kelembagaan Petani;
- Kelembagaan Ekonomi Petani;
- Penyuluh Pertanian.

Hasilnya adalah meningkatnya pengetahuan dan kapasitas 30 orang anggota KEP Sinai Hortikultura Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo terkait pengembangan produk dan jejaring pasar dalam skala ekonomi berbasis kawasan pertanian.

5. *Fasilitasi Peralatan Pengolahan Industri Rumah Tangga Hasil Pertanian (KWT)*

Tujuannya meningkatkan kapasitas dan pengetahuan petani di lokasi pelaksana SIMURP; serta meningkatkan pendapatan keluarga petani di lokasi pelaksana SIMURP.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh KWT Kemasama Nuakutu adalah Pengolahan pangan berbasis kelor seperti pembuatan biscuit kelor selain daun kelor kering, Tepung kelor, teh kelor dan kiri-kiri/stick kelor. Hasil penjualan produksi rata-rata di tahun 2022 sebesar Rp. 1.995.000,-/bulan meningkat menjadi rata-rata sebesar Rp.2.200.000,-/bulan pada tahun 2023. Terjadi peningkatan pendapatan petani sebesar Rp.205.000,-/bulan dan sebesar Rp.2.460.000,-/tahun.

f) Badan Ketahanan Pangan Nasional

- **Satker 690722 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT**

Tabel 3.28

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satker 403457 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik
			(Rp)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6
Satker 690722		3,547,554,000	3,300,012,989	93.02	
018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3,437,554,000	3,193,120,656	92.89	
6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1,595,883,000	1,409,120,801	88.30	88.44
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	995,975,000	961,460,196	96.53	98.62
6877	Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	845,696,000	822,539,659	97.26	98.14
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	110,000,000	106,892,333	97.17	
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	110,000,000	106,892,333	97.17	98.49

Berdasarkan tabel diatas, dari total Pagu Satker 690722 sebesar Rp.3.547.554.000,- realisasi Rp.3.300.012.989,-(93,02%) dengan 2 Program yaitu **Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**, anggaran sebesar Rp.3.4.37.554.000,- realisasi Rp.3.193.120.656,-(92,89%) dan **Program Dukungan Manajemen** anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- realisasi Rp.106.892.333,-(97,17%).

Rincian Realisasi Program/Kegiatan Satker 690722:

I. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

1. **Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan** Anggaran sebesar Rp.1.595.883.000,- realisasi Rp.1.409.120.801 (88,30%) dengan Sub Kegiatan:

a. Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Tujuannya untuk melindungi masyarakat dengan menyediakan pangan yang aman sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi pangan yang sehat, aman dan bermutu. Sasarannya untuk mendapatkan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang beredar di pasar tradisional dan pasar modern.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya data hasil pengujian dari sampel yang diuji, yaitu:

Tabel 3.29

Data Hasil Pengujian Sampel Standar Keamanan Pangan

No	Komoditas Pangan Segar	Parameter Uji	JumlahSampel	Hasil Uji
1.	Jagung Pipil	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Tidak Ditemukan
2.	Beras Sosoh	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Tidak Ditemukan
3.	Labu Siam	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Tidak Ditemukan
4.	Sawi Manis	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Tidak Ditemukan
5.	Ketimun	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Tidak Ditemukan
6.	Tomat	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Tidak Ditemukan
7.	Cabai Merah	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Tidak Ditemukan
8.	Cabai Rawit	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Tidak Ditemukan
9.	Lemon (Tanpa Kulit)	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Tidak Ditemukan
10.	Lemon (Dengan Kulit)	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Adanya Chlorpyrifos
11.	Seledri	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Tidak Ditemukan
12.	Jeruk (Tanpa Kulit)	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Tidak Ditemukan
13.	Jeruk (Dengan Kulit)	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Tidak Ditemukan
14.	Alpukat (Tanpa Kulit)	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Tidak Ditemukan
15.	Alpukat (Dengan Kulit)	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Tidak Ditemukan
16.	Jambu	Qualitative Screening Analysis \pm 540 Analite	1	Tidak Ditemukan
Total			16	

Manfaatnya untuk meningkatnya pengetahuan akan keamanan dan mutu pangan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat dan beredar di pasar tradisional dan pasar modern. Dampaknya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui konsumsi pangan yang sehat, aman dan bermutu.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan PSAT tidak dapat bertahan lama dan gampang rusak dan waktu pengiriman ke laboratorium di Jawa membutuhkan waktu selama 3 hari.

Upaya Pemecahan Masalah:

- ✓ Sampel yang akan diuji tidak disimpan lama atau langsung dikemas dan dikirim;
- ✓ Pengemasannya menggunakan wadah yang mempunyai sirkulasi udara yang baik
- ✓ Sampel dikemas dalam keadaan kering;
- ✓ Sampel dipisah antar sampel kering dan basah, seperti beras dan jagung di pisah dengan sayur dan buah.

b. Promosi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

Tujuannya untuk memberikan edukasi konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat sejak dini, yaitu kepada siswa sekolah tingkat dasar akan pentingnya makanan yang sehat sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap makanan B2SA dan menerapkannya dalam konsumsi pangan sehari-hari.

Sasarannya siswa-siswi Sekolah Dasar di 10 Sekolah Dasar yang ada di Kota Kupang, yaitu:

1. SD Inpres Oepura 3, Jl. Delima Kel. Sikumana – Kec. Maulafa;
2. SD Negeri Bertingkat Naikoten 1, Jl. Soeharto Kel. Naikoten 1 – Kec. Oebobo;
3. SD GMIT Kuanino 2, Jl. John Amalo Kel. Nunleu – Kec. Kota Raja;
4. SD Inpres Bertingkat Kelapa Lima 1, Jl. Perintis Kemerdekaan kel. Kelapa Lima – Kec. Kelapa Lima;
5. SD Harapan, Jl. Elang Kel. Bonipoi – Kec. Kota Lama;
6. SD Negeri Nunbaun Delha, Kel. Numbaun Delha – Kec. Alak;
7. SD Inpres Oepoi, Jl. Tamrin, Kel. Kayu Putih – Kec. Oebobo;
8. SD GMIT Oebufu, Jl. Soverdi No. 7 Kel. Oebufu – Kec. Oebobo;
9. SD Katolik Muder Teresa, Jl. HTI Kel. Maulfa – Kec. Maulafa;
10. SD Katolik Maria Bunda Karmel, Jl. Tuak Sabu Kel. Lasiana – Kec. Kelapa Lima.

Manfaatnya adalah :

- Pemahaman anak-anak akan pentingnya pola konsumsi atau pola makan sehari-hari yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
- Termotivasi anak-anak SD untuk mengkonsumsi makanan B2SA;
- Pihak sekolah merasa terpanggil untuk melakukan sosialisasi terhadap orangtua tentang pola konsumsi pangan yang B2SA.

Dampaknya adalah terciptanya generasi emas yang sehat, kuat dan produktif dengan pola hidup yang sehat dimulai dari pola makan yang sehat.

c. Kelompok Masyarakat yang Terfasilitasi Penganekaragaman Pangan

Tujuan umumnya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat guna mendukung upaya pengentasan stunting secara nasional.

Tujuan khusus untuk mendorong masyarakat dalam menerapkan pola konsumsi pangan B2SA guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang aktif, sehat dan produktif.

Sasarannya adalah 4 Desa yang ada di 4 Kabupaten/Kota: Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Belu dan Sumba Barat Daya sebagai penerima manfaat Pengembangan Desa B2SA. Pengembangan Desa B2SA ini terdiri dari 3 komponen, yaitu : Teras Pangan Rp.15.000.000,-, Gerai Pangan Rp.15.000.000,- dan Rumah Pangan Rp.45.000.000,- dengan sebaran lokasi sebagai berikut:

Tabel. 3.30
Sebaran Lokasi Pengembangan Desa B2SA

No.	Kabupaten	Kec	Desa/ Kel	Nama Kelompok	Identitas Kelompok Pengemangan Desa B2SA			
					Nama Ketua	No. HP	No.KTP Ketua	Jumlah Anggota
1.	TTS	Oenino	Noeoni	Kuan Na Seo	Tersia Widiastuti	082235253251	1701114708790000	25 orang
2.	Sumba Barat Daya	Loura	Wee Manada	TP-PKK Beina Ole	Koni Magi	-	5318014504760000	25 orang
3.	Kota Kupang	Kelapa Lima	Lasiana	PKK Ita Esa	Marce Efendi Lodika Suy	085238082115	5371034105720000	25 orang
4.	Belu	Tasifeto Timur	Dafala	PKK Desa Dafala	Yustina Trifonia Idik	081267590910	5304026611770000	25 orang

Manfaatnya adalah:

- Kebutuhan pangan dan gizi keluarga khususnya penerima manfaat terpenuhi dengan adanya teras pangan;
- Terjadinya peningkatan berat badan, tinggi badan lingkar lengan dari pemberian makan yang teratur;
- Memudahkan masyarakat dalam mengakses pangan dengan adanya gerai pangan.

Dampaknya adalah:

- Kemudahan dalam mengakses pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga;

- Dengan adanya teras pangan dan gerai pangan dapat menghemat uang belanja dan juga menghemat biaya transportasi ke pasar.

d. *Sertifikasi Sarana dan Produk Pangan Segar yang Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan*

Tujuannya untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan; untuk memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat, untuk mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan pangan produk serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

Manfaatnya adalah terjaminnya keamanan PSAT yang beredar di masyarakat.

Masalah dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah:

- Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam penyediaan PSAT yang aman sehingga masih ada PSAT terkontaminasi cemaran yang beredar;
- Kurangnya sosialisasi tentang regulasi kewajiban ijin edar beras ke pelaku usaha/masyarakat sehingga pemahaman pelaku usaha akan ijin edar masih sangat minim.

Upaya Pemecahan Masalah:

- ✓ Membangun koordinasi yang baik antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sosialisasi tentang regulasi kewajiban ijin edar beras ke pelaku usaha dan sosialisasi tentang penyediaan PSAT yang aman oleh pelaku usaha ke konsumen (masyarakat).

e. *Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan*

Tujuannya adalah:

- Menjaga dan menjamin kualitas/mutu produk PSAT yang beredar;
- Melindungi konsumen dari berbagai bahaya cemaran biologis, kimia maupun fisik lainnya yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Melakukan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman para produsen dan pedagang/distributor akan pentingnya konsumsi produk pangan yang aman dan bermutu.

Sasarannya adalah komoditi cabai keriting dan beras yang beredar di pasar dan distributor. Dari kegiatan ini adalah hasil uji keamanan pangan dari 49 sampel beras yang di ambil, 14 sampel beras terdeteksi mengandung logam berat (arsen dan timbal). Dari 14 sampel tersebut 1 sampelnya melebihi batas maksimum cemaran arsen (beras

dari Desa Matasio Kabupaten Rote Ndao) sesuai SNI 7387.2.2009 tentang Batas Maksimum Logam Berat Dalam Pangan sedangkan mutu pangan dari sampel beras termasuk sub medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional No.2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Untuk cabai keriting sebanyak 9 sampel, hasil uji laboratoriumnya ETO dinyatakan aman/tidak ditemukan.

Permasalahan: pelaku usaha belum semuanya mengetahui pentingnya menjamin pangan yang aman untuk diedarkan.

Upaya Pemecahan Masalah: melakukan sosialisasi dengan penanganan yang baik terhadap PSAT baik untuk diedarkan maupun untuk dikonsumsi.

f. Sertifikasi dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Tujuannya:

- Mendukung peningkatan jumlah pangan segar yang terdaftar;
- Meningkatkan penjaminan keamanan pangan segar yang diedarkan;
- Menjaga kesehatan konsumen.

Kegiatan meliputi: Rapat koordinasi Kelembagaan Keamanan Pangan; Sertifikasi, Registrasi dan Surveilans Pelaku Usaha; Peningkatan Kapasitas Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan. Pada tahun 2023, terdapat 3 Kabupaten yang mengusulkan permohonan ke Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi NTT untuk memperoleh sertifikat Keamanan Pangan, yaitu:

- 1) Kabupaten Sumba Barat Daya oleh PT Talasi True Origin menyampaikan permohonan SPPB-PSAT untuk komoditi Asam Jawa, Lada Hitam, Lada Putih dan Kemiri. Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2023 di PT.Talasi True Origin;
- 2) Kabupaten TTS oleh Kelompok Tunas Muda menyampaikan Sertifikat Prima 3 untuk komoditi Brokoli, Kelompok Harapan Baru menyampaikan sertifikat Prima 3 untuk komoditi Wortel.

Audit lapangan ke 2 kelompok ini dilaksanakan pada tanggal 17 November 2023.

3.3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Efisiensi dan Efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2023 terhadap pencapaian sasaran dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2023, sebagai berikut:

A. APBD

Tabel. 3.31

Efisiensi Anggaran APBD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Alokasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi		Efisiensi Anggaran	
						(Rp)	Keu (%)	(Rp)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Share PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	42,799,275,667	229.87	39,779,896,471	92.95	3,019,379,196	7.05
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17,015,773,000		14,816,044,791	87.07	2,199,728,209	12.93
			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13,927,671,505		10,172,393,934	73.04	3,755,277,571	26.96
2	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Nilai Tukar Petani (NTP)	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	316,260,160	92.90	185,674,398	58.71	130,585,762	41.29
3	Meningkatnya Keanekaragaman Pangan yang dikonsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	662,000,000	104.75	359,831,750	54.36	302,168,250	45.64

B. APBN

Tabel. 3.32
Efisiensi Anggaran APBN

No	Satker	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik (%)	Efisiensi Anggaran	
			(Rp)	Keu (%)		Rp	%
1	2	3	4		5	6	7
1	Satker 249099	3,935,323,000	3,906,845,250	99.28	100.00	28,477,750	0.72
2	Satker 249158	18,451,097,000	16,464,801,100	89.23	89.40	1,986,295,900	10.77
3	Satker 249030	4,270,507,000	4,013,221,697	93.98	94.11	257,285,303	6.02
4	Satker 249159	4,889,494,000	4,883,340,780	99.87	100.00	6,153,220	0.13
5	Satker 249031	594,710,000	591,804,100	99.51	100.00	2,905,900	0.49
6	Satker 249160	1,833,775,000	1,772,306,280	96.65	96.66	61,468,720	3.35
7	Satker 249033	906,800,000	905,762,300	99.89	100.00	1,037,700	0.11
8	Satker 249165	9,436,563,000	5,898,219,000	62.50	62.59	3,538,344,000	37.50
9	Satker 690722	3,547,554,000	3,300,012,989	93.02	93.04	247,541,011	6.98
10	Satker 403457	14,024,934,000	13,268,242,200	94.60	95.00	756,691,800	5.40

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun keempat dari Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dan merupakan penjabaran dari P-RPJMD Tahun 2021-2023, Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahunan 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Terbatasnya alokasi anggaran dan adanya refocusing anggaran yang terjadi beberapa kali sepanjang tahun anggaran 2023 berakibat cukup signifikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan.

Penyusunan LKIP didasarkan pada hasil seluruh pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023. Hasil capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT tahun 2023, merupakan evaluasi atas kinerja hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Demikian LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan di tahun anggaran berikutnya.



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Lecky Frederich Koli, STP**
Jabatan : **Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ayodhia G. L. Kalake**
Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

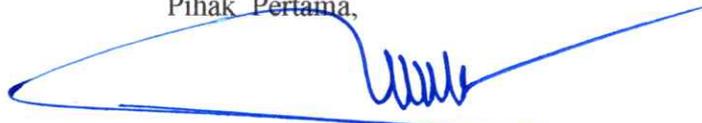
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 7 Desember 2023

Pihak Kedua,


Ayodhia G. L. Kalake

Pihak Pertama,


Lecky Frederich Koli, STP

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI		FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Share PDRB sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB (%)	12,31	12.72	Nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) / nilai tambah barang dan jasa dari seluruh sektor ekonomi dalam kurun waktu 1 tahun x 100%
2	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Nilai Tukar Petani (Poin)	95,22	105	Indeks harga yang diterima petani / Indeks harga yang dibayar petani x 100%
3	Meningkatnya keanekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	75,30	71	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 74.720.980.332,-	Realisasi minimal 85%
	1. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 662.000.000,-	Realisasi minimal 90%

	2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 42.799.275.667,-	Realisasi minimal 85%
	3. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 17.015.773.000,-	Realisasi minimal 85%
	4. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 13.927.671.505,-	Realisasi minimal 85%
	5. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 316.260.160,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 3.100.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 77.820.980.332,-	
2.	APBN		
	Program Dekonsentrasi		
	1. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker Tanaman Pangan)	Rp. 3.875.123.000,-	Realisasi minimal 90%
	2. Dukungan Manajemen (Satker Tanaman Pangan)	Rp. 60.200.000,-	Realisasi minimal 90%
	3. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Satker Hortikultura)	Rp. 126.192.000,-	Realisasi minimal 90%
	4. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker Hortikultura)	Rp. 2.870.315.000,-	Realisasi minimal 90%
	5. Dukungan Manajemen (Satker Hortikultura)	Rp. 1.274.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	6. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Satker Perkebunan)	Rp. 198.400.000,-	Realisasi minimal 90%
	7. Dukungan Manajemen (Satker Perkebunan)	Rp. 396.310.000,-	Realisasi minimal 90%
	8. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	Rp. 566.800.000,-	Realisasi minimal 90%
	9. Dukungan Manajemen (Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	Rp. 340.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	10. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Satker Penyuluhan)	Rp. 14.024.934.000,-	Realisasi minimal 90%
	11. Ketersediaan, akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker Ketahanan Pangan)	Rp. 3.437.554.000,-	Realisasi minimal 90%
	12. Dukungan Manajemen (Satker Ketahanan Pangan)	Rp. 110.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Dekonsentrasi	Rp. 27.279.828.000,-	
	Program Tugas Pembantuan		
	1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Satker Tanaman Pangan)	Rp. 2.086.240.000,-	Realisasi minimal 90%
	2. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker Tanaman Pangan)	Rp. 14.972.750.000,-	Realisasi minimal 90%

3. Dukungan Manajemen (Satker Tanaman Pangan)	Rp.	1.392.107.000,-	Realisasi minimal 90%
4. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Satker Hortikultura)	Rp.	1.388.944.000,-	Realisasi minimal 90%
5. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker Hortikultura)	Rp.	3.250.550.000,-	Realisasi minimal 90%
6. Dukungan Manajemen (Satker Hortikultura)	Rp.	250.000.000,-	Realisasi minimal 90%
7. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Satker Perkebunan)	Rp.	1.608.584.000,-	Realisasi minimal 90%
8. Dukungan Manajemen (Satker Perkebunan)	Rp.	225.191.000,-	Realisasi minimal 90%
9. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	Rp.	8.166.633.000,-	Realisasi minimal 90%
10. Dukungan Manajemen (Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	Rp.	1.269.930.000,-	Realisasi minimal 90%
Jumlah Tugas Pembantuan	Rp.	34.610.929.000,-	
Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp.	61.890.757.000,-	

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Penyampaian LKPD, LKPPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);

F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90 %;

G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APSP sebagai berikut:

1. TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
2. TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal minimal 2 (dua) Jenis;

I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;

J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);

L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,

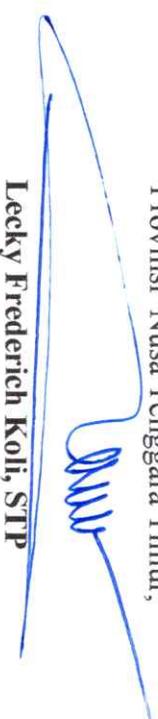


Ayodhia G. L. Kalake

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	

Kupang, 7 Desember 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Lecky Frederich Koli, STP

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	

**RENCANA KINERJA TAHUN (RKT)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	OUTCOME
1.	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan perkapita sesuai Angka	2,42%	2,72%	Meningkatnya Konsumsi Sayuran, Buah dan Protein Hewani
2.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Benih Bersertifikat	100%	100%	Tersedianya Benih/Bibit Tanaman Pangan yang memenuhi persyaratan mutu, penyediaan benih dan peredaran
3.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :			
		- Produksi Jagung	54,38% (767.054 Ton)	100% (1.856.552 Ton)	Tersedianya produksi Jagung
		- Produksi Padi	55,13% (772.475 Ton)	100% (1.471.176 Ton)	Tersedianya produksi Padi
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Areal Serangan OPT yang Dikendalikan	75%	75%	Terkendalinya Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Lecky Frederich Koli, S.TP

Pembina Utama Muda

NIP. 196402101986031029

